

**PERAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
DALAM OTONOMI DAERAH SERTA  
KONSISTENSI PERATURANNYA  
(Studi Kasus di Kota Tegal)**

**TESIS**

Disusun dalam rangka memenuhi persyaratan  
Program Magister Ilmu Hukum



Oleh :

**MIRZA KURNIADI, SH.**  
**NIM B.4A.098.060**

Pembimbing:

**Prof. Dr. H. MIYASTO**  
**Dr. MOEMPOENI, SH.**

**PROGRAM PASCA SARJANA ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2002**

**PERAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
DALAM OTONOMI DAERAH  
SERTA KONSISTENSI PERATURANNYA  
( Studi Kasus di Kota Tegal )**

Disusun oleh:

**MIRZA KURNIADL,SH**  
**NIM. B.4A.098.060**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada tanggal .....2002

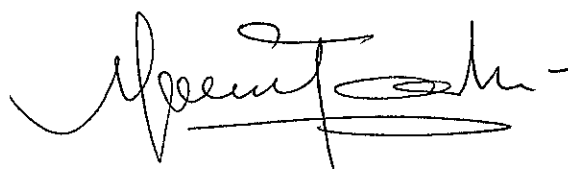
Tesis ini telah diterima  
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar  
Magister Ilmu Hukum

Pembimbing I



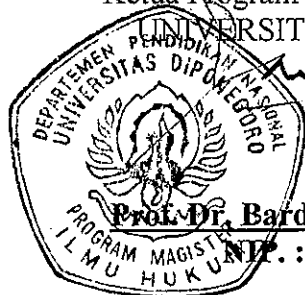
**Prof. Dr. H. Miyasto**  
**NIP.130.516.585**

Pembimbing II



**Dr. Moempoeni Martoyo, SH**  
**NIP. 130.324.140**

Ketua Program Magister Ilmu Hukum  
UNIVERSITAS DIPONEGORO



**Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH**  
**NIP. : 130.350.519**

## MOTTO

*“Hai orang-orang yang beriman !  
Hendaklah kamu menjadi orang-orang  
yang kuat menegakkan keadilan, menjadi  
saksi kebenaran karena Tuhan, biarpun  
terhadap dirimu sendiri atau ibu  
bapakmu atau kerabatmu; ataupun  
kepada orang kaya atau miskin, karena  
Tuhan dekat pada keduanya, Sebab itu  
janganlah kamu turutkan kemauan yang  
rendah (hawa nafsu) untuk tidak berlaku  
adil. Kalau kamu memutarbalikkan  
(kata-kata) dan enggan menjadi saksi,  
sesungguhnya Tuhan itu tahu benar apa  
yang kamu kerjakan“*

(QS. An-Nissa' : 135)

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadlirat Allah SWT,berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat meyelesaikan Tesis ini untuk memenuhi persyaratan Pendidikan Pasca Sarjana Program Magister, Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro Semarang.

Topik penulisan Tesis ini diangkat dari persoalan titik berat kesiapan Kota Tegal terhadap peningkatan pendapatan daerah sebagai salah satu penopang untuk pembiayaan pembangunan dalam mendukung otonomi daerah.

Tesis ini mengambil judul “PERAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM OTONOMI DAERAH SERTA KONSISTENSI PERATURANANNYA“ ( Studi kasus di Kota Tegal).

Pada kesempatan ini, peneliti mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Ir. H. Eko Budiharjo, MSc selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. Barda Nawawi Arif, SH selaku Ketua Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak Prof. Dr. H. Miyasto selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan Tesis ini, yang telah memberikan bimbingan dan masukan, sehingga tesis ini dapat selesai.
4. Ibu Dr. Moempoeni Martoyo,SH selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan Tesis ini, yang telah memberikan bimbingan dan masukan, sehingga tesis ini dapat selesai.
5. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Program Pascasarjana Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
6. Ketua BAPPEDA Propinsi Jawa Tengah beserta staf yang telah memberikan bantuan bagi peneliti dalam melakukan penelitian.

7. Kepala DIPENDA Propinsi Jawa Tengah, Biro Hukum Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Tengah, Biro Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Tengah yang telah memberikan bantuan bagi peneliti dalam melakukan penelitian.
8. Ketua BAPPEDA Kota Tegal beserta staf yang telah memberikan bantuan bagi peneliti dalam melakukan penelitian.
9. Kepala DIPENDA Kota Tegal, beserta staf yang telah memberikan bantuan bagi peneliti dalam melakukan penelitian.
10. Kepala Bagian Hukum Kota Tegal, beserta staf yang telah memberikan bantuan bagi peneliti dalam melakukan penelitian.
11. Ketua Komisi A DPRD Kota Tegal beserta staf yang telah memberikan bantuan bagi peneliti dalam melakukan penelitian.
12. Ayah / Ibunda yang tercinta yang telah banyak memberikan dorongan dan do'a dalam menyelesaikan tesis ini.
13. Rekan-rekan Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberikan bantuan bagi peneliti dalam melakukan penelitian.
14. Seluruh staf administrasi Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberikan bantuan bagi peneliti dalam melakukan penelitian.

Akhirnya semoga segala bantuan dan jasa baiknya mendapat kehormatan dan balasan yang lebih baik dari Allah SWT.

Semarang, Juni 2002

Penulis,

Mirza Kurniadi,SH

## ABSTRAKSI

Penelitian ini berangkat dari keinginan peneliti untuk mengetahui peran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Tegal dalam melaksanakan Otonomi Daerah, dimana sektor Pajak Daerah dan Retribusi daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah untuk menggerakkan roda pembangunan bagi Kota Tegal. Penelitian ini juga dilatarbelakangi oleh diberlakukannya aturan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengatur secara regulatif tentang cara pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Dalam penelitian ini peneliti menganalisis beberapa permasalahan pokok berkenaan dengan seberapa jauh peran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Otonomi Daerah di Kota Tegal ? Bagaimanakah konsistensi peraturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Otonomi Daerah di Kota Tegal ? dan faktor-faktor apa yang menjadi kendala untuk berperannya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Otonomi Daerah di Kota Tegal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempunyai peranan dalam pembangunan di Kota Tegal dan memberikan kontribusi yang signifikan sebagai komponen Pendapatan Asli Daerah. Berkenaan dengan konsistensi peraturan ditemukan banyaknya peraturan daerah yang diberlakukan sebagai aturan pelaksanaan dari perundang-undangan pemerintahan pusat yang mempunyai konsistensi atau berkesesuaian diantara peraturan tersebut namun sosialisasinya masih kurang. Sedangkan faktor yang menjadi kendala untuk berperannya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Tegal adalah pada dasarnya dikarenakan para wajib pajak baik perorangan maupun badan walaupun mereka sudah mengetahui arti penting pajak daerah dan retribusi daerah untuk pembangunan daerah. namun kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengakibatkan ada sebagian masyarakat masih cenderung untuk menghindari dari kewajibannya, namun masih cenderung untuk menghindari dari kewajiban tersebut.

## ABSTRACTION

This study begin from the researcher's desire to know the region's tax and retribution's role at Tegal city in region autonomy implementation, whereas the region's tax and retribution sector are on of region's original income source to move the development of Tegal city.

In this study, the researcher analyze some of basic problems related with how far is the region tax and retribution's role in the region autonomy at Tegal city ? And what factors wich become a problem of region tax and retribution's role in the region autonomy at Tegal city.

The result of this study indicates that the region tax and retribution have an important role in the Tegal city's development and it give a significant contribution as region's original income component. In connection with the rule consistency is found many of the regions rule wich effective as implementation rule from the central government's legislation wich has consistency between the rule, and less in the socialization. Whereas the factor of problem are the region tax and retribution's role at Tegal city is caused although both personal tax's payer and institution realize their obligation but they still tend to evade taxes.

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN MOTTO .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
ABSTRAKSI .....	v
ABSTRACTION .....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan masalah .....	11
C. Kerangka Teoritis .....	12
D. Tujuan dan Kontribusi Penelitian .....	22
E. Metodologi Penelitian .....	23
F. Sistematika Penulisan .....	27
<b>BAB II KERANGKA PEMIKIRAN .....</b>	<b>29</b>
A. Pengertian Pajak .....	29
B. Azas dan Teori Pemungutan Pajak .....	34
C. Teori Hukum Dalam Otonomi Daerah .....	51
D. Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Daerah .....	53
E. Fungsi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah .....	58
F. Peraturan-Peraturan Daerah Mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah .....	65
G. Kendala-Kendala Umum Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Otonomi Daerah .....	79



BAB III HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN .....	82
A. Peran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Otonomi Daerah .....	82
B. Konsistensi Peraturan Pajak Daerah dan Retribusi Terhadap Otonomi Daerah di Kota Tegal .....	98
C. Faktor-Faktor Yang Menjadi Kendala Untuk Berperannya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Otonomi Daerah di Kota Tegal .....	117
BAB IV PENUTUP .....	130
A. Kesimpulan .....	130
B. Saran .....	131
DAFTAR PUSTAKA .....	132
LAMPIRAN .....	149

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 1 : Hubungan Teori dan Analisis Penelitian Mengenai Permasalahan Nomor 1.....	83
Tabel 2 : Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Tegal Periode 1996/1997-2000 .....	84
Tabel 3 : Target dan Realisasi Pajak Daerah Kota Tegal Periode 1996/1997-2000 .....	85
Tabel 4 : Target dan Realisasi Retribusi Daerah Kota Tegal Periode 1996/1997-2000 .....	86
Tabel 5 : Anggaran P.A.D, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Prosentase-periode 1996/1997-2000 .....	87
Tabel 6 : Pertumbuhan Penduduk Kota Tegal Periode 1996/1997-2000 ..	88
Tabel 7 : Hubungan Teori dan Analisis Penelitian Mengenai Permasalahan Nomor 2.....	103
Tabel 8 : Hubungan Konsep Teori dan Analisis Penelitian Mengenai Permasalahan Nomor 3.....	127

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Ditinjau dari sejarahnya, masalah pajak sudah ada sejak zaman dahulu walaupun pada saat itu belum dinamakan “pajak” namun masih merupakan pemberian yang bersifat sukarela dari rakyat kepada rajanya. Perkembangan selanjutnya pemberian tersebut berubah menjadi upeti yang sifat pemberiannya dipaksakan dalam arti bahwa pemberian itu bersifat “wajib” dan ditetapkan secara sepihak oleh negara. Dengan kata lain “pajak” yang semula merupakan pemberian sukarela berubah menjadi pungutan yang sifatnya wajib. Dengan demikian, sejarah pemungutan pajak mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan negara baik di bidang ekonomi, sosial dan kenegaraan.<sup>1</sup>

Sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat modern, masyarakat hidup dalam organisasi yang permanen disebut dengan negara. Bagi suatu negara pajak memegang peranan penting, yaitu sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Ada dua fungsi utama pajak yang tidak dapat ditinggalkan dalam suatu sistem negara, yaitu pajak berfungsi sebagai *budget* dan pajak berfungsi sebagai *regulasi*. Dalam fungsi *budget*, pajak diartikan sebagai upaya pemerintah untuk mengumpulkan iuran wajib dari masyarakat yang nantinya akan digunakan sebagai salah satu sumber untuk membiayai kegiatan-kegiatan rutin pemerintah dan

---

1. H.S Munawir, *Perpajakan*, Liberty, Yogyakarta, 1997, Hal. 3.

kegiatan-kegiatan pembangunan. Dalam fungsi *regulasi* pajak dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk mengatur irama kegiatan-kegiatan ekonomi, realokasi sumber-sumber ekonomi, retribusi pendapatan dan persaingan.<sup>2</sup>

Fungsi apapun yang dilakukan oleh pajak, sistem perpajakan suatu negara harus mampu menunjukkan bahwa pajak seharusnya berperan untuk memungut dari orang-orang kaya yang hasilnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas, terutama masyarakat yang kurang mampu. Namun demikian realita perpajakan di negara Indonesia sering terjadi konflik pengaturan pajak, hal ini terjadi karena adanya inkonsistensi dalam norma-norma hukum pajak atau dalam implementasi norma tersebut. Konflik-konflik tersebut mengakibatkan dan menimbulkan kebingungan bagi aparat perpajakan dan wajib pajak, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian kebijakan perpajakan nasional.

Sehubungan dengan definisi pajak, Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. memberikan definisi yang lebih luas, dalam bukunya "*Azas Dan Dasar Perpajakan Jilid I*". Secara lengkap definisi tersebut adalah sebagai berikut.<sup>3</sup>

*"Pajak adalah perikatan yang timbul karena undang-undang (jadi dengan sendirinya) yang mewajibkan seseorang yang memenuhi syarat (Tatbestand) yang ditentukan dalam undang-undang, untuk membayar suatu jumlah tertentu kepada negara (masyarakat) yang dapat dipaksakan, dengan tiada imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara (pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan, fungsi budgeter)".*

Dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah sebagai berikut :

- 
2. Prof. Miyasto, *Sistem dan Pelaksanaan Perpajakan di Indonesia*, Bahan Untuk Seminar Nasional Perpajakan Dalam Rangka Dies Natalis ke 41, 1991, UNDIP.
  3. Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H, "*Azas Dan Dasar Perpajakan Jilid I* ", PT. Refika Aditama, 1998, Bandung, Hal. 51.

- a. Berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan); Dalam arti walaupun negara mempunyai hak untuk memungut pajak namun pelaksanaannya dengan persetujuan dari rakyat yaitu melalui undang-undang;
- b. Iuran masyarakat kepada negara; dalam arti bahwa yang berhak melakukan pemungutan pajak hanyalah negara dengan alasan apapun swasta atau partikelir tidak boleh memungut pajak, pajak adalah suatu pungutan yang merupakan hak prerogatif pemerintah;
- c. Tanpa jasa timbal (prestasi) dari negara yang dapat langsung ditunjuk; dalam arti bahwa jasa timbal atau kontra prestasi yang diberikan oleh negara kepada rakyatnya tidak dapat dihubungkan secara langsung dengan besarnya pajak;
- d. Untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang bersifat umum; dalam arti bahwa pengeluaran-pengeluaran pemerintah tersebut mempunyai manfaat bagi masyarakat secara umum.<sup>4</sup>

Dalam sistem dan pelaksanaan perpajakan di Indonesia sudah diadakan perubahan tiga kali reformasi di bidang perpajakan. Ketiga reformasi tersebut dilatarbelakangi oleh kondisi lingkungan yang berbeda. Perbedaan kondisi lingkungan ini menyebabkan perbedaan orientasi strategis dari kebijakan-kebijakan perpajakan. Dalam reformasi perpajakan pertama dimulai pada Tahun 1983, dengan dikeluarkannya tiga Undang-Undang Pajak baru yaitu: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Barang Mewah. Kemudian Tahun 1985 dikeluarkan Undang-Undang

---

4. Munawir, Op. Cit.

Nomor 12 Tahun 1985, yaitu Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, semua itu dilatar-belakangi oleh kesulitan dana pembangunan yang disebabkan turunnya harga minyak bumi di pasar dunia.

Dalam reformasi perpajakan pertama ini terdapat suatu perubahan sistem yang sangat mendasar, yaitu dari *official assesment* menjadi *self assesment*. Dalam *self assesment* wajib pajak tidak hanya menjadi obyek tetapi justru menjadi subyek yang diharapkan aktif berpartisipasi dalam sistem perpajakan nasional. Kemudian pada dekade Tahun 1994 reformasi perpajakan kedua dimulai dengan dilatar belakangi oleh kondisi lingkungan yang berbeda dengan yang dihadapi pada saat reformasi perpajakan pertama dan diarahkan untuk mengelaborasi permasalahan dengan kemajuan yang sangat pesat di era globalisasi dan di bidang teknologi maka mendorong dilakukan perubahan terhadap peraturan perpajakan. Perubahan tersebut meliputi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Barang Mewah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994. Kemudian Tahun 1985 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, yaitu Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Hal ini tercemin pada peraturan-peraturan perpajakan baik yang terdapat dalam hukum pajak formal, maupun hukum pajak materiil.<sup>5</sup>

---

5. Miyasto, Op. Cit.

Dalam upaya untuk lebih memberikan keadilan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan agar lebih dapat menciptakan kepastian hukum pada Tahun 2000 dilakukan reformasi perpajakan ketiga terhadap peraturan perpajakan terhadap perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Barang Mewah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000.

Undang-Undang perpajakan sebagai sebuah kebijaksanaan agar dapat mencapai tujuan dari adanya kebijaksanaan, maka harus diimplementasikan. Implementasikan kebijaksanaan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang dipilih dengan menggunakan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu. implementasi kebijaksanaan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijaksanaan.

Di samping pemungutan oleh negara dalam bentuk pajak, pemerintah juga melakukan pungutan-pungutan lain, diantaranya retribusi, sumbangan, bea dan cukai. *Retribusi* adalah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan dapat jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan dalam retribusi bersifat ekonomis, karena siapa yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah dia tidak dikenakan iuran tersebut, misal retribusi parkir, pasar, uang kuliah, uang ujian dan sebagainya. Dengan perkataan lain retribusi adalah pungutan yang dikaitkan secara

langsung dengan balas jasa yang yang diberikan oleh pemerintah kepada pembayar retribusi. Semua pungutan tersebut dilakukan oleh negara terhadap kekayaan rakyat, yang akan digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan negara yang hasilnya langsung atau tidak langsung dapat dirasakan oleh rakyat.

Hasil reformasi perpajakan ketiga dalam perpajakan daerah adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 pada tanggal 23 Mei 1997<sup>6</sup> yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan hasil dari reformasi perpajakan ke tiga yang disahkan pada tanggal 20 Desember 2000. Dengan demikian, pajak hanya dapat dipungut oleh pemerintah dan pemerintah baru dapat memungut pajak kalau sudah ada undang-undangnya serta peraturan pelaksanaannya. Pajak merupakan kewajiban bagi masyarakat yang bila diabaikan akan terkena sanksi sesuai dengan undang-undang pajak tersebut.

Dari uraian di atas dapat dinyatakan bahwa reformasi perpajakan ketiga telah melahirkan ketentuan-ketentuan perpajakan yang relatif lebih akomodatif terhadap perubahan eksternal dibandingkan dengan ketentuan-ketentuan perpajakan dalam reformasi perpajakan pertama, akan tetapi masih ada beberapa masalah yang perlu mendapat perhatian, terutama berkaitan dengan *azas keadilan* dalam perpajakan dan konsistensi dari ketentuan-ketentuan perpajakan tersebut. Kedua hal ini yang sering menimbulkan konflik antara wajib pajak dengan fiskus.

Maka pada Tahun 2000 melalui Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dilakukan kembali reformasi perpajakan ketiga yang dilatarbelakangi dengan keluarnya Undang-Undang Nomor

---

6. Munawir, Loc. Cit., Hal 3.



22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah. Maka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang lebih luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah dipandang perlu menekankan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, dan akuntabilitas serta memperkuat potensi dan keanekaragaman daerah. Untuk itu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 perlu disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan dalam bentuk sesuai dengan otonomi daerah.

Terlepas dari konflik yang sering ditimbulkan antara wajib pajak dengan fiskus melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah dalam melaksanakan otonominya, di samping penerimaan yang berasal dari pemerintah berupa subsidi/bantuan dan bagi hasil pajak dan bukan pajak. Sumber pendapatan daerah tersebut diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

Dengan pertimbangan bahwa dalam perkembangannya, negara Republik Indonesia, telah menghasilkan pembangunan yang pesat dalam kehidupan nasional, yang perlu dilanjutkan dengan dukungan pemerintah dan seluruh potensi masyarakat, karena itu menempatkan perpajakan sebagai suatu perwujudan kewajiban negara yang merupakan sarana peran serta dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Disamping itu, pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai

penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab dengan titik berat pada Daerah Tingkat II.

Sejalan dengan program pengembangan penyelenggaraan pemerintah daerah pada saat ini telah menjadi perhatian khusus pemerintah guna peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah dan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, guna terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945. Melalui upaya penataan wilayah/daerah diharapkan dapat mewujudkan keserasian dan keseimbangan laju perkembangan pembangunan antar wilayah/daerah. Namun demikian setiap pemekaran wilayah/daerah tentu diperlukan suatu pertimbangan dan pengkajian secara mendalam dan mendasar. Pembentukan daerah urgensinya harus benar-benar bermanfaat bagi pembangunan nasional pada umumnya, peningkatan pendapatan daerah pada khususnya, dapat meningkatkan pelayanan kebutuhan masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pembentukan daerah otonomi saat ini tidak sama dengan kebanyakan pembentukan daerah otonomi sebelum adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pembentukan daerah pada masa lalu sebagian besar hanya didasarkan pada faktor politis dan sejarah sedang di era reformasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah harus benar-benar didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab. Selain itu pembentukan daerah harus memperhatikan jumlah penduduk, luas daerah dan kemampuan ekonomi suatu daerah.

Intensifikasi pendapatan asli daerah tidak lepas dari penyelenggaraan pemerintahan di daerah; khususnya hal-hal yang melandasi dasar hukum suatu negara serta pemberian otonomi kepada daerah seperti yang telah ditegaskan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Penegasan oleh GBHN tersebut dituangkan dalam bentuk undang-undang yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah upaya pelaksanaan intensifikasi asli daerah khususnya disektor pajak dan retribusi daerah merupakan suatu kewajiban bagi pemerintahan di daerah itu sendiri untuk melaksanakannya.

Dalam melaksanakan kewajibannya pemerintah di daerah harus tunduk dan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 yang berbunyi :

*"Pembagian Daerah Indonesia atas Daerah Besar dan Kecil dengan bentuk dan susunan Pemerintahan ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal usul dalam daerah yang bersifat istimewa".*

Dalam penjelasan dari pasal tersebut antara lain dikemukakan bahwa negara Indonesia itu suatu *eenheidstaat*, maka Indonesia tidak akan mempunyai daerah dalam lingkungannya yang bersifat *staat* juga. Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah propinsi dan daerah propinsi akan dibagi dalam daerah yang lebih kecil. Daerah-daerah itu bersifat otonom atau bersifat administrasi belaka. Semuanya menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.<sup>7</sup> Ditegaskan pula bahwa setiap daerah yang bersifat otonom akan diadakan Badan Perwakilan Daerah.

Ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut mempunyai aspirasi untuk menyelenggarakan otonomi dengan memberikan kewenangan yang luas,

---

7. Biro Organisasi Depdagri, 23 Maret 2000, *Kebijakan Organisasi Pemerintah Propinsi, Kabupaten dan Kota* disampaikan pada rapat koordinasi teknis Dirjen Pemerintahan Umum Daerah.

nyata dan bertanggung jawab sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia TAP MPR-RI Nomor XV/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah: Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia TAP MPR-RI Nomor XV/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah : Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia mengamanatkan penyelenggaraan otonom daerah dilaksanakan dengan memberikan wewenang yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional. Disamping itu penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Peran serta masyarakat, pemerintah dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Jadi implikasi pelaksanaan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia TAP MPR RI Nomor XV/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah: Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan, Sumber Daya Nasional yang berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia tersebut, diwujudkan dengan penyempurnaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.

Pengimplementasian peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan pemerintah tersebut diatas tentang peran pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka otonomi daerah di kota Tegal adalah suatu realitas sosial yang bersifat konsekuensi

logis terhadap penyelenggaraan otonomi daerah dengan segala konsekuensi strategi-strategi pemberdayaannya. Hal ini semakin diperkuat adanya informasi tentang meningkatnya pendapatan pemerintah Kota Tegal (suara merdeka, April, 2000), tetapi berdasarkan kecurigaan intelektual perlu dipertanyakan dan diadakan penelitian tentang sinyalemen akumulasi informasi mengenai peningkatan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Tegal. Tanpa mengabaikan arti penting dari pungutan yang dilakukan oleh negara terhadap rakyat, dalam penelitian ini yang akan dijadikan fokus hanya terbatas kepada pajak daerah dan retribusi daerah.

Secara normatif kita telah melakukan beberapa reformasi tentang hukum pajak yang terakhir dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang memberi kewenangan kepada daerah untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah dalam rangka memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan dapat dirumuskan beberapa perumusan permasalahan antara lain :

1. Seberapa jauh peran pajak daerah dan retribusi daerah dalam otonomi daerah di Kota Tegal ?
2. Bagaimanakah konsistensi peraturan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap peran pajak daerah dan retribusi daerah dalam otonomi daerah di Kota Tegal ?
3. Faktor-faktor apasajakah yang menjadi kendala untuk berperannya pajak daerah dan retribusi daerah dalam otonomi daerah di Kota Tegal ?

## C. Kerangka Teoritis

### C.1. Pengertian Pajak dan Fungsi Pajak

Pajak merupakan peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *publik saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *publik investment*. Pernyataan ini merupakan definisi pajak oleh Prof. DR Rochmat Soemitro.<sup>8</sup> Pajak juga merupakan suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari pada kekayaan ke kas negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.<sup>9</sup>

Dengan demikian pajak mempunyai karakteristik yang antara lain :

1. Pajak dipungut oleh negara;
2. Pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individu oleh pemerintah;
3. Penyelenggaraan pemerintah secara umum merupakan kontra prestasi dari negara;
4. Diperuntukkan bagi pengeluaran rutin bagi pemerintah jika masih surplus digunakan untuk *publik invesmen*;

---

8. Lihat Rocmat Soemitro dalam H.S Munawir, 1999, *Perpajakan*, Liberty, Yogyakarta, Hal. 5. Lihat juga Achmat Cahyono (.et), 2000, *Perpajakan*, Edisi Kedua, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, Hal. 3.  
9. Definisi Pajak menurut Prof S. I. Djajadiningrat dalam Acmad Cahyono, ibid, Hal. 3. Serta Munawir, Ibid.

5. Pajak dipungut disebabkan adanya suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu kepada seseorang;
6. Pajak dapat pula mempunyai tujuan yang tidak *budgeter* yaitu mengatur.<sup>10</sup>

Dengan demikian, pajak hanya dipungut oleh pemerintah dan pemerintah baru dapat memungut pajak kalau sudah ada undang-undangnya serta peraturan pelaksanaannya. Pajak merupakan kewajiban bagi masyarakat yang bila diabaikan akan terkena sanksi sesuai dengan undang-undang pajak tersebut. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, pembenaran pemungutan pajak oleh pemerintah berdasarkan kepada beberapa teori yang antara lain :

- a. Teori Asuransi, yang mengatakan bahwa pajak itu diibaratkan suatu premi asuransi yang harus dibayar oleh setiap orang karena orang mendapatkan perlindungan atas haknya dari pemerintah;
- b. Teori Daya Pikul, setiap orang wajib membayar pajak sesuai dengan daya pikul masing-masing;
- c. Teori Kepentingan, teori ini mengukur sesuai dengan besarnya kepentingan wajib pajak yang dilindungi. Makin besar kepentingan yang dilindungi, makin besar pajak yang harus dibayarkan;
- d. Teori Daya Beli, merupakan teori yang menyedot uang dari rakyat dan dikembalikan dari rakyat;
- e. Teori Kewajiban Pajak Mutlak, teori ini berdasarkan pada organ teori yang menyatakan bahwa negara merupakan satu kesatuan dalam arti, negara memberi hidup kepada warganya maka negara membebani kewajiban.<sup>11</sup>

---

10. Achmad Cahyono, *ibid*, Hal. 3. disamping itu Muqodim juga memberikan kareakteristik tentang pajak, antara lain :

1. Pajak adalah pengalihan sumber-sumber dari sektor swasta ke sektor negara.
2. Berdasarkan Undang-Undang.
3. Tanpa imbalan dari negara yang langsung dapat ditunjuk secara individu.
4. Untuk membiayai pengeluaran pemerintah baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. (Muqodim, *Perpajakan*, UII Press, Yogyakarta, 1999, Hal. 2).

11. Prof. DR. H Rochmat Soemitro, SH., *Op. Cit.*, Hal. 29-31.

Untuk melakukan pemungutan pajak dapat didekati berbagai segi, segi hukum, ekonomi, sosiologi, keuangan, pembangunan dan administratif. Di samping pendekatan tersebut pemerintah juga melakukan pemungutan melalui retribusi, sumbangan, bea dan cukai yang terbagi menurut pemungutannya yakni pajak pusat dan pajak daerah.\* Pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah juga memuat pokok-pokok pemikiran yang dituangkan secara regulatif yang memuat syarat-syarat pembuatan undang-undang pajak, dasar pelaksanaan undang-undang pajak, dasar-dasar mendapat keadilan dalam hukum pajak, dasar ekonomi pajak, sumber keuangan negara, dasar sosiologis pajak, dasar penggunaan hasil pajak dan dasar politik dan kebijaksanaan pajak.<sup>12</sup>

Berdasarkan lembaga pemungutan pajak yang terdiri dari pajak pusat dan pajak daerah, sesuai dengan judul tesis, maka terminologi visi lebih difokuskan pada analog-analog tentang pajak daerah dan retribusi daerah.\*

Pajak daerah dan retribusi daerah adalah pungutan pajak yang

---

\* Untuk menginterpretasikan pandangan tersebut diatas, pendeskripsian tentang visi ini, yang dimaksud pajak pusat adalah:

1. Pajak yang dipungut oleh Dirjen Pajak:
    - Pajak Penghasilan;
    - PPN (penyerahan Lokal);
    - Pajak Bumi dan Bangunan;
    - Bea Materai;
    - Bea Lelang.
  2. Pajak yang dipungut Bea Cukai (Dirjen Bea Cukai),
  3. Pajak Daerah adalah:
    - Pajak Tingkat Propinsi :
      - Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
      - Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air;
      - Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
      - Pajak Pengambilan dan pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
    - Pajak Tingkat Kabupaten/Kotamadya :
      - Pajak Hotel ;
      - Pajak Restoran;
      - Pajak Hiburan ;
      - Pajak Reklame;
      - Pajak Penerangan jalan;
      - Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C ;
      - Pajak Parkir.
  12. Lihat Soemitro, *Asas Dan Dasar Perpajakan*, Jilid I, Grafika Aditama, Bandung, 1999, Hal. 50.
- \* Yang merupakan objek Retribusi Daerah dalam tulisan ini adalah :  
Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Perizinan Tetentu.



dilakukan oleh pemerintah daerah, baik itu pemerintah propinsi maupun pemerintah kabupaten/kotamadya. Pemungutan pajak diatur melalui perundang-undangan. Merujuk kepada pengaturan tentang pajak daerah dan retribusi daerah dapat dikemukakan, bahwa yang dimaksud dengan :

Pajak Daerah, yang selanjutnya di sebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.<sup>13</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau di berikan pemerintahan daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.<sup>14</sup>

## C.2. Pengertian dan Dasar Hukum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku secara nasional diantaranya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah agar daerah dapat melaksanakan otonominya, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.<sup>15</sup>

---

13. Lebih jelas lihat Pasal 1 angka 6 Undang-Undang 18 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

14. Lebih jelas lihat Pasal 1 angka 26 Undang-Undang 18 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

15. H.S Munawir, Op.Cit., Hal. 289.

Mengenai pengaturan pajak daerah retribusi daerah di Indonesia pada awalnya diatur dengan Undang-Undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 Tentang Peraturan Umum Pajak Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 Tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah. Pada waktu ini peraturan khusus tentang sesuatu jenis pajak dan retribusi agar berlaku sebagai pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan peraturan daerah.

Dalam perkembangan kehidupan negara Republik Indonesia dengan pelaksanaan pembangunan nasional memerlukan dukungan dana dari pihak pemerintah dan potensi masyarakat, untuk itu aspek perpajakan merupakan sarana yang mempunyai peran dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Disamping itu, pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah guna pembiayaan pembangunan dalam rangka otonomi daerah. Maka pada tanggal 23 Mei 1997 telah disahkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan demikian pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah secara nasional diatur dengan satu perundang-undangan.

Dalam era reformasi saat ini agar pembangunan secara nasional dapat terlaksana secara demokratis dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia maka Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang disahkan pada tanggal 20 Desember 2000.

Dengan pandangan di atas terlihat bahwa pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sangat erat kaitannya dengan pembangunan ekonomi. Menurut Todaro bahwa keberhasilan ekonomi ditunjukkan oleh tiga nilai pokok, yaitu :<sup>16</sup>

1. Berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (*Basic needs*);
2. Meningkatnya rasa harga diri (*self-esteem*) masyarakat sebagai manusia;
3. Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memilih (*freedom from servitude*) yang merupakan salah satu hak asasi manusia.

Berarti antara pembangunan ekonomi dengan perpajakan (pajak daerah dan retribusi daerah) mempunyai hubungan yang bersifat interdependensi. Artinya keberhasilan pembangunan ekonomi akan mampu menaikkan penarikan pajak dan retribusi yang akan dilakukan oleh pemerintahan daerah, sebaliknya dengan penarikan pajak dan retribusi daerah akan mampu pula meningkatkan pelaksanaan pembangunan ekonomi di daerah. Inilah yang merupakan urat nadi dari pelaksanaan otonomi daerah seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dengan perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Seiring dengan perkembangan masyarakat dan politik, Indonesia pada saat sekarang ini memasuki era globalisasi dan reformasi. Dimana pengalaman masa lalu mengajarkan bahwa kebijaksanaan di daerah yang

---

16. Lincolin Arsyad, *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Eekonomi Daerah*, BPFE, Yogyakarta, 1999, Hal 5-6.

diputuskan dari pusat berdasarkan pendekatan “*top down*” sudah tidak sesuai dengan kondisi dengan daerah. Akibatnya kebijaksanaan tersebut disambut dingin oleh masyarakat di daerah setempat, karena tidak sejalan dengan kebutuhan kebijaksanaan yang diharapkan. Maka pendekatan “*top down*” jelas tidak sejalan dengan kenyataan sosial ekonomi dan kebudayaan daerah. Salah satu cara mengatasi kemacetan dan ketidaksesuaian antara kebijaksanaan yang diputuskan dari pusat dan kondisi daerah adalah harus segera dibuat sebuah kerangka kebijaksanaan yang sangat strategis. Salah satu kebijaksanaan mendasar dengan sesuai keadaan saat ini adalah “otonomi daerah”.<sup>17</sup> Perkembangan masyarakat dan politik ditegaskan oleh Syahda Guruh, negara akan selalu berevolusi beberapa bentuk, berubah sistim, berubah orang dan sebagainya.<sup>18</sup>

Sejalan dengan itu pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui perundang-undangan tentang otonomi daerah yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang berorientasi pada otonomi daerah. Dimana seluruh kebijakan yang diambil melekat pada kepentingan daerah masing-masing, dengan kata lain pemerintah daerah diberi kewenangan untuk membuat kebijakan dan mengatur rumah tangganya sendiri.

Upaya yang paling dominan untuk mengatur dan membiayai rumah tangga pemerintah daerah adalah dengan melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Eksistensi pajak daerah dan retribusi daerah sangat menentukan kelangsungan hidup dan otonomnya daerah bersangkutan.

---

17. Syauckani, *Menatap Harapan Masa Depan Otonomi Daerah*, Gerbang Dayaku, Yogyakarta, 2000, Hal. 139-140.

18. Syahda Guruh, *Menimbang Otonomi VS Federal*, PT. Remaja Rodakarya, Bandung, 2000, Hal. 8.

Berperannya pajak daerah dan retribusi daerah merupakan suatu fenomena dan gejala-gejala yang mengusik peneliti untuk melakukan kajian yang berkaitan dengan otonomi daerah serta konsistensi peraturan-peraturan tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Sebelum kajian yang lebih mendalam tentang fenomena-fenomena dan gejala-gejala tersebut perlu kiranya diungkapkan secara transparan tentang keberadaan otonomi daerah dan konsekuensi logis dari otonomi daerah yang berkaitan dengan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah tersebut. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Hak itu diperoleh melalui penyerahan urusan pemerintah dari pemerintah (pusat) atau pemerintah daerah tingkat atasnya (dalam hal ini Daerah Tingkat I untuk otonomi pada Daerah Tingkat II) sesuai dengan keadaan, kemampuan dan kebutuhan daerah yang bersangkutan. Dalam hubungan ini kebijakan desentralisasi selalu dikaitkan dengan penilaian yang menyeluruh atas keadaan, kemampuan dan kebutuhan daerah untuk menerima sesuatu hak otonomi.

Walaupun demikian dalam sejarah pemerintahan diberbagai negara isu otonomi selalu mengundang perbedaan pendapat dan dalam banyak kasus hak otonom sesuatu daerah hanya diperoleh dari pemerintahan pusat setelah terjadi konflik. Otonomi juga diakui sebagai suatu prinsip yang diperlukan demi efisiensi pemerintah.<sup>19</sup> Dalam rangka peningkatan pendapatan daerah maka pelimpahan wewenang pusat kepada daerah untuk mengelola pembangunan dijalankan secara progresif sehingga dapat memacu gerak pembangunan di daerah. Wewenang pokok yang perlu dilimpahkan terutama harus mencakup bidang perencanaan

---

19. Muh. Ryaas Rasyid, *Kajian Awal Birokrasi Pemerintahan Politik Orde Baru*, Yarsif Watampone (anggota 1 KAPI), Jakarta, 1997, Hal 102.

pembangunan dana subsidi dari pemerintah pusat, pengelolaan sumber-sumber dana untuk peningkatan pendapatan daerah melalui bagi hasil pendapatan negara yang diperoleh dari daerah yang bersangkutan, serta pengendalian dan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan di daerah.

Dalam rangka pembangunan melalui pelaksanaan otonomi daerah selalu dikaitkan dengan kemampuan pemerintah daerah untuk menggali sumber daya keuangannya terutama sektor pajak, maka pajak daerah dan retribusi daerah mempunyai peran yang besar dalam pelaksanaan peningkatan pendapatan daerah.

Pajak daerah dan retribusi daerah sebenarnya merupakan jiwa di daerah, sebab tanpa adanya pajak daerah dan retribusi daerah, daerah tidak akan atau sukar untuk berkembang, kecuali apabila daerah itu mempunyai pendapatan dari sumber-sumber alam yang tinggi atau perdagangan/industri-industri. Jadi pajak-pajak pada hakekatnya mengenai hidup daerah secara ekonomis, bukan hidup secara manusiawi. Kebutuhan daerah adalah kelangsungan hidup daerah secara ekonomis, bukan hidup secara manusiawi. Kebutuhan daerah adalah kelangsungan hidup organ-organ daerah, yang mampu melaksanakan fungsinya masing-masing, yang lain dari kebutuhan manusia secara fisik. Banyak sedikitnya uang yang diperlukan oleh daerah tergantung kepada tingkat ekonomi daerah serta masyarakatnya. Lebih besar tingkat ekonomi suatu daerah, maka lebih besar kebutuhannya, dan lebih besar pula pendapatan yang diperlukan.

Pajak-pajak ditangan pemerintah benar-benar digunakan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, yang akan tercermin dalam tingkat kesejahteraan rakyat. Lebih sejahtera dan lebih makmur masyarakat, lebih tinggi

tingkat ekonominya. Maka dapat dikatakan bahwa pajak-pajak, disamping melangsungkan kehidupan negara (dengan anggaran rutinnya), juga digunakan untuk pembangunan yang akan mensejahterakan dan memakmurkan rakyat Indonesia melalui anggaran pembangunan.<sup>20</sup>

Bagi suatu daerah, pajak daerah dan retribusi daerah memegang peranan penting, yaitu sebagai salah satu sumber penerimaan yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah dan pembangunan serta sebagai alat regulasi pajak yang dapat digunakan untuk mengatur retribusi pendapatan, stabilitas ekonomi, relokasi sumber-sumber ekonomi dan persaingan. Pada masa yang akan datang manajemen pajak akan memegang peranan penting.

Kita memang perlu mengembangkan secara komprehensif kemampuan para aparatur untuk mengambil keputusan strategis yang menjamin terpeliharanya kepentingan nasional Indonesia dalam kompetisi global. Perhatian dan pemahaman yang lengkap terhadap isu-isu lokal, nasional, regional, dan global perlu terus ditingkatkan. Khusus bagi pemerintah pusat, keperluan agar memfokuskan penggunaan waktu dan energi yang dimiliki untuk menyusun berbagai alternatif konsep-konsep strategis dalam kompetisi global itu semakin nyata.

Adapun tentang penanganan isu-isu lokal, seyogyanya sudah dapat diserahkan kepada pemerintah-pemerintah daerah. Pembagian otoritas tanggung jawab ini selayaknya menjadi salah satu motivasi bagi pelaksanaan kebijakan otonomi daerah yang lebih konsisten.

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya

---

20. Rochmat Soemitro, *Op. Cit.*, Hal. 46.

nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat madani yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai subsistem pemerintahan negara dimaksudkan untuk peningkatan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan pertanggung jawaban kepada masyarakat.

#### **D. Tujuan dan Kontribusi Penelitian**

##### **D.1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran pemahaman secara jelas mengenai konsistensi pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah, adapun secara pragmatis penelitian ditujukan guna mencapai tujuan berikut :

- 1) Untuk mengetahui dan memahami peran pajak daerah dan retribusi daerah dalam otonomi daerah di Kota Tegal ?
- 2) Untuk mengamati dan mempelajari konsistensi peraturan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap peran pajak daerah dan retribusi daerah dalam otonomi daerah di Kota Tegal ?
- 3) Untuk melakukan inventarisasi faktor-faktor yang menjadi kendala untuk berperannya pajak daerah dan retribusi daerah dalam otonomi daerah di Kota Tegal ?



## D.2. Kontribusi Penelitian

- 1) Diharapkan dalam penelitian ini masyarakat dan pembuat kebijakan serta pemerintah daerah dapat memahami dan mempelajari serta sebagai bahan komparatif untuk membuat keputusan dan menjalankan keputusan terhadap pemberlakuan pajak daerah dan retribusi daerah dalam penerapan otonomi daerah.
- 2) Untuk mengembangkan pandangan keilmuan bagi peneliti dalam rangka memajukan ilmu dan pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan hukum ekonomi dan teknologi dalam bidang hukum pajak berkorelasi dengan pajak daerah dan retribusi daerah dalam otonomi daerah.

## E. Metodologi Penelitian

### E.1. Obyek Penelitian

Untuk melakukan penelitian hal yang paling utama adalah obyek sebagai sasaran penelitian. Dalam penelitian ini objeknya tentang peran pajak daerah dan retribusi daerah dalam otonomi daerah, sinkronisasi peraturan perundang-undangan atau dokumen-dokumen hukum yang mengatur pajak daerah dan retribusi daerah, kemudian dilengkapi dengan kajian tentang konsistensi pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah yang lokasi penelitian ditetapkan di Kota Tegal. Alasan pengambilan Kota Tegal sebagai lokasi penelitian berdasarkan teknik pengambilan sampel dengan memakai *purpose sampling*. Pendekatan *purpose sampling* dilakukan karena keterbatasan waktu, tenaga dan biaya.<sup>21</sup>

---

21. Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, Hal. 51.

## E.2. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan normatif empiris. Artinya menelusuri melalui penelitian pelaksanaan antara cara dan prosedur pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dengan peraturan perundang-undangan tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Adapun alasan digunakannya pendekatan ini karena permasalahan yang diteliti berkaitan erat dengan pengungkapan seberapa jauh peran pajak daerah dan retribusi daerah yang berkaitan dengan otonomi daerah dapat dilaksanakan oleh pemegang peran dan pembuat keputusan, baik secara vertikal maupun secara horizontal, serta sinkronisasi perundang-undangan sebagai konsistensi peraturan perundang-undangan tentang pajak.

## E.3. Penentuan Sampel

Untuk mendapatkan data di lapangan sampel diambil dengan menggunakan teknik purposive sampling atau penarikan sampel bertujuan, dilakukan dengan cara mengambil subyek didasarkan pada tujuan tertentu.<sup>22</sup>

Alasan digunakan teknik ini adalah karena populasi\* dalam penelitian ini mempunyai karakteristik yang tidak sama, disamping itu dengan menggunakan teknik ini diharapkan sampel yang diambil dapat menjaga sifat representatifnya populasi.

Sampel diambil dari unsur-unsur populasi yang terdiri dari :

- 1) Bappeda Pemerintah Kota Tegal; bagian koordinasi rencana pembangunan

---

22. Ronny Hanitijo Soemitro, Op-Cit, Hal. 51

\* Yang dimaksud dengan populasi disini adalah semua anggota masyarakat yang mempunyai kaitan langsung dengan pajak daerah dan retribusi daerah.

daerah pada dinas ini yang akan dijadikan sampel karena akan memberikan konstruksi informasi tentang pengembangan pembangunan daerah di Kota Tegal.

- 2) Bagian Hukum sekretariat pemerintah Kota Tegal; bagian Perundang-undangan yang akan dijadikan sampel, karena bagian perundang-undangan ini adalah merancang peraturan daerah secara teknis maupun substansial, terutama yang berkaitan dengan pajak daerah dan retribusi daerah.
- 3) Dinas Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Tegal; dijadikan sampel karena akan memberikan informasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dan perkembangan pendapatan daerah di Kota Tegal.
- 4) Komisi A DPRD Kota Tegal; dijadikan sampel, karena komisi ini sebagai pembuat kebijakan (*making decision*) dan memberikan pertimbangan pada pemerintah daerah untuk menjalankan peraturan daerah secara teknis maupun materiil, terutama yang berkaitan dengan pajak daerah dan retribusi daerah.

#### E.4. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari 2 (dua) sumber data yaitu :

- 1) Data primer, diperoleh melalui teknik wawancara melalui kuesioner dengan unsur sampel yang telah ditentukan di atas ;
- 2) Data sekunder, diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara mempelajari literatur, peraturan perundang-undangan, berbagai jurnal hukum, dokumen dan karya ilmiah yang ada kaitannya dengan objek penelitian ini.

#### E.5. Metode Pengumpulan Data.

Metode pengumpulan data dilakukan dua tahap, yaitu :

- 1) Tahap pra-survey; yaitu tahap pengambilan data awal termasuk pengumpulan data sekunder, yang dilakukan pada dinas/instansi terkait dan studi dokumentasi di berbagai perpustakaan yang tujuannya untuk mendapatkan informasi awal dalam penelitian ini, khususnya data mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait.
- 2) Tahap wawancara yang disusun berdasarkan kuisisioner, yaitu tahap untuk mendapatkan data primer, yang diperoleh langsung dari para sampel yang telah ditentukan. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada sampel yang telah ditentukan. Tipe wawancara yang digunakan adalah wawancara yang difokuskan (*focused interview*).<sup>23</sup>

#### E.6. Instrumen Penelitian

Instrumen pendukung dalam pengumpulan data di lapangan nantinya peneliti akan menggunakan alat bantu, seperti daftar kuisisioner, alat-alat tulis, alat perekam (tape recorder), data statistik dari perkembangan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

#### E.7. Teknik Analisis Data

Semua data yang terkumpul secara garis besar analisis data meliputi tiga langkah, dengan langkah sebagai berikut :<sup>24</sup>

- 1) Persiapan, kegiatan dalam persiapan ini antara lain :
  - a. Mengecek nama dan kelengkapan identitas pengisi.
  - b. Mengecek kelengkapan data.
  - c. Mengecek macam isian data.

---

23. Ronny Hanitijo Soemitro, Loc. Cit. Hal. 60.

24. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998, Hal. 240-242.

- 2) Tabulasi, yang termasuk dalam kegiatan ini :
  - a. Memberikan skor (skoring).
  - b. Memberikan kode terhadap item-item yang tidak diberi skor.
- 3) Penerapan data sesuai dengan pendekatan penelitian, sehingga dapat diuraikan dalam bentuk tulisan, pandang-pandangan, tabel beserta lampiran yang akhirnya dapat diadakan pendekatan pengujian melalui validitas data.

#### E.8. Teknik Pengecekan Data

Untuk menguji validitas data, digunakan validitas logis dan validitas empiris, yaitu pengujian yang berpangkal pada konstruksi teoritis, dari konstruksi teoritis diungkapkan definisi-definisi dan ketentuan-ketentuan yang dipakai sebagai standar kerja serta derajat kesesuaian antara apa yang dinyatakan oleh hasil keadaannya yang sebenarnya.<sup>25</sup>

#### F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas, konsistensi pemikiran terhadap permasalahan yang menjadi fokus hasil penelitian yang dilakukan, maka tesis ini tersusun dalam 5 (lima) Bab, yaitu :

BAB I. Dalam menguraikan Bab I sebagai Pendahuluan Bab ini berisikan mengenai latar belakang penulisan Tesis, yang diikuti dengan perumusan permasalahan, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, kerangka teoritis, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan selanjutnya untuk memperoleh gambaran ringkas mengenai kerangka pemikiran, kemudian dalam Bab I juga dibahas mengenai metode

---

25. Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Mandar Maju, Bandung, 1996. Hal.114-118.

penelitian yang digunakan sebagai alat untuk menentukan langkah-langkah penulisan dalam pencarian dan analisis data yang mewujudkan kerangka pemikiran pada Bab II berikutnya yang lebih kongkrit.

BAB II. Dalam Bab ini akan dipaparkan melalui kerangka pemikiran dengan pokok bahasan pengertian pajak, azas dan teori hukum pajak dan teori hukum dalam otonomi daerah, pemerintah daerah dalam otonomi daerah, fungsi pajak daerah dan retribusi daerah, peraturan-peraturan daerah mengenai pajak daerah dan retribusi daerah, kendala-kendala umum tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

BAB III. Dalam Bab ini disajikan hasil-hasil dan analisis penelitian melalui data-data yang terkumpul selama penelitian baik data primer dan sekunder dan dianalisis melalui metodologi yang digunakan. Sub Bab dari Bab III meliputi : peran pajak daerah dan retribusi daerah dalam otonomi daerah di Kota Tegal, konsistensi peraturan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap peranan pajak daerah dan retribusi daerah dalam otonomi daerah di Kota Tegal, faktor-faktor yang menjadi kendala untuk berperannya pajak daerah dan retribusi daerah dalam otonomi daerah di Kota Tegal.

BAB IV. Sebagai Bab kesimpulan dan Saran, dalam Bab ini ditarik kesimpulan dari masing-masing fokus penelitian, terhadap hasil-hasil penelitian dalam kajian akademis dan dikemukakan saran bersifat konstruktif yang bisa menjadi acuan dan pertimbangan untuk penentu kebijakan dan pelaksana kebijakan.

## BAB II

### KERANGKA PEMIKIRAN

#### A. Pengertian Pajak

Pajak sebenarnya adalah utang, yaitu utang anggota masyarakat kepada masyarakat. Dengan demikian masalah pajak adalah masalah setiap orang dalam suatu masyarakat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Barang Mewah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994. Setiap orang yang hidup dalam suatu negara pasti atau harus berurusan dengan pajak, baik mengenai asas-asasnya, jenis atau macam-macam pajak yang berlaku di negaranya, cara penghitungan dan tatacara pembayarannya, serta hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak.<sup>26</sup>

Namun demikian pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam mengoptimalkan setiap keputusan dan kebijakan pemerintah yang berorientasi pada pembiayaan pelaksanaan pembangunan nasional baik di pusat maupun di daerah dalam mencapai tujuan nasional. Oleh karena itu pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan keuangan negara yang ditanggung oleh masyarakat secara bersama-sama.

---

26. H.S Munawir, Loc. Cit., Hal. 3.

Banyak para ahli dalam bidang perpajakan yang memberikan pengertian atau definisi yang berbeda-beda mengenai pajak, namun demikian berbagai definisi tersebut mempunyai inti atau tujuan yang sama.

Ada beberapa definisi yang diungkapkan oleh para pakar antara lain :

1. Menurut Sommerfeld pajak adalah “suatu pengalihan sumber-sumber yang wajib dilakukan dari sektor swasta kepada sektor pemerintah berdasarkan peraturan tanpa mendapat suatu imbalan kembali yang langsung dan seimbang, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya dalam menjalankan pemerintahan.”<sup>27</sup>
2. Menurut Mr. Dr. N.J. Feldmann, dalam bukunya “*De overheidsmidsmiddelen van Indonesia, Leiden, 1949*” *“Belastigen Zijn aan Overheid (Volgen aleggeme, door haar vastgesteelde normen) verschuldigde afdwingbareprestities, waar tegenprestatie tegenover staat en uitsluitend dienen tot dekking van uitgaven”*.  
”Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum) tanpa adanya kontra prestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran umum”.<sup>28</sup>
3. Menurut Prof. DR. M.J.H. Smeets adalah “prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma hukum, dan yang dapat dipaksakan tanpa ada kontra prestasi yang dapat ditunjukan dalam hal individu; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.”<sup>29</sup>

---

27. Muqodim, *Perpajakan Buku Satu*, UII Press, Yogyakarta, 1999, Hal. 1.

28. Erly Suandy, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, 2000, Hal. 7.

29. Brotodiharjo, R.Santoso, 1986, Hal. 6 ; lihat juga Erly Suandy, Ibid.



4. Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjojo dalam disertasinya yang berjudul "Pajak berdasarkan asas gotong royong". Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.<sup>30</sup>
5. Menurut Prancis, termuat dalam buku Leroy Beaulieu yang berjudul "*Traite de la Science des Finances*, 1906 "*L'impôt et la contribution, soit directe soit dissimulée, que La Puissance Publique exige des habitants ou des biens pour subvenir aux dépenses du Gouvernement*".  
"Pajak adalah bantuan, baik langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang, untuk menutup belanja pemerintah."<sup>31</sup>

Namun dari berbagai pengertian tersebut dapat dikemukakan pengertian pajak secara lengkap sebagai berikut :

Pajak adalah suatu pengalihan sumber-sumber yang wajib yang dilakukan dari sektor swasta (dalam pengertian luas) kepada sektor pemerintah (kas negara) berdasarkan undang-undang atau peraturan, sehingga dapat dipaksakan, tanpa ada kontra prestasi yang langsung dan seimbang yang dapat ditunjukan secara individual dan hasil penerimaan pajak tersebut merupakan sumber penerimaan negara yang akan digunakan untuk pengeluaran pemerintah baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.

Dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak sebagai berikut :

---

30. Erly Suandy, Op. Cit

31. Erly Suandy, Loc. Cit.

- a. *Iuran masyarakat kepada negara*; dalam arti bahwa yang berhak melakukan pemungutan pajak hanyalah negara dengan alasan apapun swasta atau partikelir tidak boleh memungut pajak, pajak adalah suatu pungutan yang merupakan hak prerogatif pemerintah.
- b. *Berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan)*; Dalam arti walaupun negara mempunyai hak untuk memungut pajak namun pelaksanaannya persetujuan dari rakyat yaitu melalui undang-undang.
- c. *Tanpa jasa timbal (prestasi) dari negara yang dapat langsung ditunjuk*; dalam arti bahwa jasa timbal atau kontra prestasi yang diberikan oleh negara kepada rakyatnya tidak dapat dihubungkan secara langsung dengan besarnya pajak.
- d. *Untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang bersifat umum*; dalam arti bahwa pengeluaran-pengeluaran pemerintah tersebut mempunyai manfaat bagi masyarakat secara umum.<sup>32</sup>

Mendeskripsikan pengertian pajak dan ciri-ciri pajak tersebut diatas, terdapat kesan seolah olah negara atau pemerintah memungut pajak semata-mata untuk mendapatkan uang atau sumber-sumber dari swasta untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Padahal tidak demikian, pemungutan pajak mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi utama pajak sebagai sumber keuangan negara (*budgeter*) atau dengan kata lain fungsi pajak sebagai sumber penerimaan negara dan digunakan untuk pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan dan fungsi mengatur (*regulerend*) yaitu fungsi mengatur sesuatu keadaan di masyarakat di bidang sosial/ekonomi/politik sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah.

---

32. Munawir, Loc. Cit.

Hukum pajak adalah kumpulan peraturan yang mengatur hubungan hukum antara pemerintah dengan rakyat atau wajib pajak. Pemerintah sebagai pemungut pajak dan wajib pajak atau rakyat sebagai pembayar pajak, hal-hal yang diatur dalam hukum pajak antara lain meliputi : subyek pajak atau wajib pajak, apa kewajiban wajib pajak, apa hak pemerintah, apa obyek yang dikenakan, berapa taripnya, bagaimana cara penagihan pajak, apa dan berapa sanksi tidak memenuhi kewajiban, bagaimana mengajukan keberatan dan lain-lain.

Dengan mengelompokkan hal-hal yang diatur tersebut diatas maka hukum pajak hukum pajak dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam; yaitu hukum pajak materiil dan hukum pajak formil.<sup>33</sup>

Hukum pajak materiil adalah hukum pajak yang memuat norma-norma tentang :

1. Obyek pajak; yaitu obyek apa yang dikenakan pajak
2. Subyek pajak; yaitu siapa yang dikenakan pajak
3. Tarip pajak;

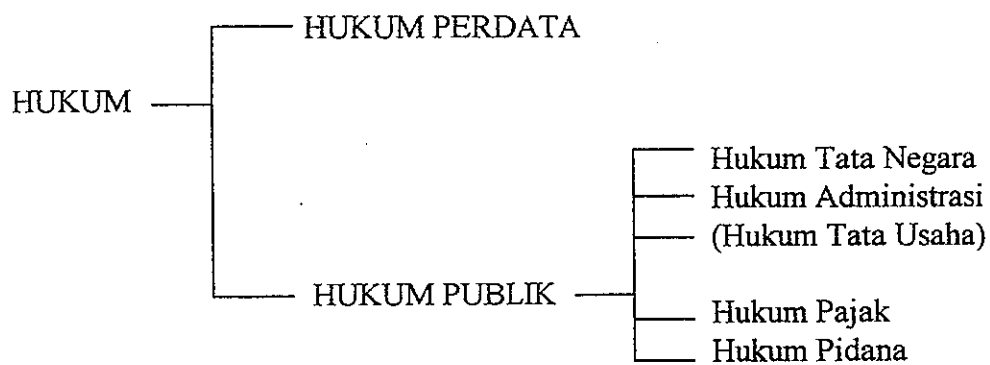
Hukum pajak formiel adalah hukum pajak yang memuat cara-cara untuk mewujudkan hukum pajak materiil menjadi suatu kenyataan atau realisasi. Hukum pajak formiel antara lain memuat :

1. Tata cara (*prosedur*) penetapan jumlah utang pajak.
2. Hak-hak fiskus untuk mengadakan monitoring atau pengawasan.
3. Kewajiban untuk mengadakan pembukuan atau pengawasan.
4. Prosedur pengajuan surat keberatan, banding dan sebagainya..

---

33. Muqodim, Ibid, Hal. 9-10.

Kedudukan hukum pajak menurut Prof.Dr.P.J.A.Adriani mengelompokkan hukum pajak sebagai bagian dari hukum publik sebagaimana terlihat pada skema dibawah ini .



Seperti telah diuraikan di muka bahwa Hukum Pajak termasuk Hukum Publik yang berdiri sendiri terpisah dari Hukum Tata Negara, terpisah dari Hukum Administrasi (Hukum Tata Usaha Negara) maupun Hukum Pidana. Namun ada juga para ahli yang berpendapat Hukum Pajak sebagai bagian dari Hukum Tata Usaha, sehingga Hukum Pajak sebagi bagian dari Hukum Publik tetapi merupakan Sub dari Hukum Tata Usaha Negara atau Hukum Administrasi Negara. Dalam hubungan ini Chidir Ali (1993, hal 48) memberi alasan sebagai berikut : Hukum Pajak itu dikeluarkan oleh Hukum Administrasi Negara dengan tujuan utama demi menyelenggarakan kepentingan umum atau tegasnya kesejahteraan masyarakat dan Hukum Pajak dapat dipaksakan berlaku terhadap penduduk supaya mentaati peraturan pajak, tegasnya mempunyai sifat memaksa.

## **B. Azas dan Teori Pemungutan Pajak**

Pajak merupakan peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor negara, untuk melihat eksistensi pajak, apakah itu pajak pusat maupun pajak daerah dan retribusi daerah, agar pemungutannya tidak menimbulkan berbagai hambatan atau perlawanan, maka harus memenuhi beberapa syarat antara lain :

1. Pemungutan Pajak Harus Adil (syarat keadilan).

Syarat pemungutan pajak pada umumnya harus adil dan merata, yaitu dikenakan kepada orang-orang pribadi sebanding dengan kemampuannya untuk membayar (*ability to pay*) pajak tersebut, dan sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Keadilan disini baik keadilan dalam prinsip mengenai peraturan perundang-undangan maupun dalam praktek sehari-hari. Syarat keadilan dapat dibagi menjadi.<sup>34</sup>

- a. Keadilan Horizontal, Wajib Pajak mempunyai kemampuan membayar (gaya pikul ) sama harus dikenakan pajak yang sama.
- b. Keadilan Vertikal, Wajib Pajak mempunyai kemampuan membayar (gaya pikul ) tidak sama harus dikenakan pajak yang tidak sama.

Oleh karena adil itu relatif maka dalam menentukan keadilan di bidang perpajakan bisa digunakan beberapa acuan atau prinsip seperti :

- a. Keadilan akan terasa bila pajak dikenakan untuk merealisasi tujuan negara untuk kesejahteraan rakyat,
- b. Pedoman untuk mengukur keadilan yaitu asas-asas perbandingan (*evenredigheid*) yang perumusannya adalah setiap anggota masyarakat adalah sama dan sederajat,
- c. Pemungutan pajak harus umum (*algemeenheid*) dan merata (*gelijkheid*).<sup>35</sup>

Pertanyaan yang mendasar yang perlu diajukan, Atas dasar apakah negara mempunyai hak untuk memungut pajak ? Apakah pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara juga berdasarkan asas keadilan ? Adilakah negara memungut pajak dari rakyat ? Santoso Brotodiharjo, dalam bukunya

---

34. Erly Suandy, Loc. Cit., Hal. 23

35. Muqodim, Op. Cit., Hal. 17.

“Pengantar Ilmu Hukum Pajak” memberikan beberapa teori yang memberikan dasar menyatakan keadilan negara dalam pemungutan pajak <sup>36</sup>:

1) Teori Asuransi (*Verzekeringstheory*)

Dalam teori asuransi pada intinya mengatakan bahwa tugas negara adalah untuk melindungi orang dan atau warga dengan segala kepentingannya, yaitu keselamatan dan keamanan jiwa dan harta bendanya. Sebagaimana pada perjanjian asuransi atau pertanggungan maka untuk melindungi tersebut diperlukan pembayaran premi, dan dalam hal ini, pembayaran pajak dianggap atau disamakan dengan pembayaran premi tersebut.

Teori asuransi mengandung kelemahan bila dalam hal terjadi kerugian, tidak ada penggantian dari negara dan tidak ada hubungan langsung antara jumlah pajak yang dibayarkan dengan jasa-jasa yang diberikan oleh negara.

2) Teori Kepentingan (*Belangentheory*)

Teori kepentingan menekankan bahwa pembagian beban pajak pada penduduk seluruhnya didasarkan atas kepentingan orang masing-masing dalam tugas negara/pemerintah, termasuk juga perlindungan atas jiwa serta harta bendanya. Pembayaran pajak hendaknya dihubungkan dengan kepentingan masing-masing wajib pajak terhadap tugas negara. Maka sudah selayaknya bahwa biaya-biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk menunaikan kewajibannya dibebankan kepada seluruh penduduk tersebut.

---

36. Santoso Brotodihardjo, 1998, “Pengantar Ilmu Hukum Pajak”, Jakarta, Hal. 7

Teori ini mulai ditinggalkan karena mengalami beberapa kelemahan antara lain masih dikacaukan pengertian pajak dan retribusi sebab besar kecilnya kepentingan masyarakat dihubungkan dengan tugas atau jasa pelayanan negara, sulit untuk menghubungkan antara kepentingan seseorang dengan jasa yang diberikan oleh pemerintah.

### 3) Teori Gaya Pikul (*Dragkracht Theory*)

Teori gaya pikul mengajarkan bahwa pajak harus dibayar menurut gaya pikul atau kemampuan seseorang. Untuk mengukur gaya pikul seseorang dapat digunakan antara lain berdasarkan jumlah penghasilan, kekayaan, belanja atau pengeluaran dan jumlah keluarga yang menjadi tanggungan.

Menurut Mr. A.J. Cohen Stuart menyarankan bahwa yang sangat diperlukan dalam kehidupan harus dimasukan dalam gaya pikul tersebut, kekuatan untuk menyerahkan uang (pajak) kepada negara barulah ada apabila kebutuhan-kebutuhan primer untuk hidup bagi wajib pajak sudah tersedia.

Dengan demikian teori gaya pikul tidak mencoba menjawab atau membenarkan mengapa suatu negara memungut pajak, tetapi teori ini mencoba mencari dasar keadilan dalam memungut pajak, yaitu tekanan pajak yang harus dirasa sama beratnya untuk setiap orang.

### 4) Teori Bakti

Teori bakti sering disebut juga sebagai teori kewajiban pajak mutlak. Teori ini berdasarkan atas paham organisasi negara (*Organische Staatleer*) yang mengajarkan negara sebagai organisasi mempunyai tugas

untuk menyelenggarakan kepentingan umum dan karenanya dapat dan harus mengambil tindakan-tindakan dalam bidang pajak. Menurut teori ini, dasar hukum atau dasar keadilan pemungutan pajak terletak dalam hubungan rakyat dengan negaranya, justru sifat suatu negara maka timbullah hak mutlak untuk memungut pajak. Rakyat harus sadar bahwa pembayaran pajak sebagai suatu kewajiban asli untuk membuktikan tanda baktinya kepada negara. Negara telah berbuat baik dengan memberikan perlindungan, pengamanan, dan pelayanan, maka sudah selayaknya masyarakat berbakti kepada negara dengan memenuhi kewajiban pajaknya.

Kelemahan teori ini adalah pandangan bahwa negara merupakan lembaga yang bersifat otoriter sehingga mengabaikan atau kurang memperhatikan unsur keadilan dan musyawarah atau persetujuan dalam pemungutan pajak.

##### 5) Teori Azas Gaya Beli

Teori ini mengajarkan bahwa penyelenggaraan kepentingan masyarakat dapat dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak, bukan kepentingan individu dan juga bukan kepentingan negara melainkan kepentingan masyarakat yang meliputi kedua-duanya. Jadi dapat dikemukakan teori ini menitik beratkan ajaran kepada fungsi mengatur. Menurut teori ini pemungutan pajak dapat disamakan dengan pompa, yaitu mengambil gaya beli dari rumah tangga individu masyarakat untuk dimasukan dalam rumah tangga negara dan kemudian mengeluarkan



kembali dari rumah tangga negara kepada masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Jadi teori ini tidak memperhatikan asal mulanya negara memungut pajak atau tidak membenarkan mengapa negara memungut pajak tetapi melihat pengaruh atau akibat pemungutan pajak dan akibat yang baik tersebut sebagai dasar keadilan.

## 2. Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Hukum (*Asas Legal*)

Pemungutan pajak harus didasarkan pada ketentuan yang legal dan formal, atau dengan kata lain harus ada dasar hukumnya. Dasar hukum tersebut haruslah dapat memberi jaminan hukum terhadap negara dan rakyatnya karena sangat penting sekali dalam rangka mendapatkan rasa keadilan yang tegas.

Di negara kita dasar hukum terhadap pemungutan pajak ada pada Undang-Undang Dasar 1945, yaitu tercantum pada Pasal 23 ayat (2) yang berbunyi "*Segala pajak untuk kegunaan kas Negara berdasarkan Undang-Undang*".

Jadi pemungutan pajak harus memperoleh persetujuan dari rakyat melalui Dewan Perwakilan Rakyat atau representasi rakyat melalui pengesahan undang-undang, tanpa adanya undang-undang atau peraturan yang legal maka pemungutan pajak dapat disamakan dengan perampasan atau perampokan.

Dan ternyata falsafah negara kita sama dengan yang falsafah yang pajak yang dianut di Inggris dengan falsafah "*No Taxation Without Representation*", dan falsafah Amerika Serikat "*Taxation Without Representation is Robbery*".

Dalam penyusunan undang-undang secara umum tidak boleh melupakan hak-hak negara sebagai pemungut pajak yang telah diberikan oleh pembuat undang-undang harus dijamin terlaksananya dengan lancar dan juga wajib pajak harus

mendapat jaminan hukum yang tegas agar tidak diperlakukan dengan semena-mena oleh fiscus dengan segala aparturnya. Adanya jaminan hukum terhadap tersimpannya rahasia-rahasia mengenai diri atau perusahaan wajib pajak yang telah disampaikannya kepada instansi-instansi pajak, dan rahasia tersebut tidak disalah gunakan. Tetapi sebenarnya dalam praktek mengalami kesulitan-kesulitan dalam memperhitungkan pajak. Bagi orang yang berpenghasilan tetap tidak menjadi persoalan. Tetapi mereka yang berpenghasilan yang tidak menentu hasilnya, maka sukar sekali untuk menentukan kemampuannya atau daya pikulnya. Untuk itu maka wajib pajak diberi kepercayaan sepenuhnya untuk menghitung sendiri pajaknya dengan cara mengisi surat pemberitahuan (SPT) secara jujur sesuai dengan kenyataan. Keadaan dalam pelaksanaan undang-undang pajak harus diawasi supaya pegawai-pegawai yang diserahi dengan tugas untuk menetapkan pajak, tidak bertindak sewenang-sewenang. Untuk mencegah hal ini Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, memberikan kesempatan kepada wajib pajak yang tidak puas untuk mengajukan keberatan atau banding, begitu juga dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 17 yang menetapkan ketentuan banding, kemudian undang-undang ini dirubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

### 3. Pemungutan Pajak Harus Tidak Mengganggu Perekonomian(*Asas Non distorsi*)

Pemungutan pajak merupakan alat bagi pemerintah untuk melaksanakan politik perekonomian suatu negara. Sehingga dalam pelaksanaan pemungutan pajak harus tetap terjaga keseimbangan kehidupan ekonominya. Syarat ini sejalan dengan fungsi *non budgetair* dan tetap sesuai dengan asas keadilan karena rakyat tidak boleh dibebani pajak yang berat yang tidak sesuai dengan kemampuannya sehingga bisa menyulitkan kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain syarat ekonomis ini sejalan dengan fungsi mengatur, oleh karena itu pemungutan pajak harus diusahakan jangan sampai menghambat kelancaran produksi dan perdagangan, menghambat usaha rakyat mencapai kebahagiaan dan merugikan kepentingan umum dan dapat menciptakan pemerataan pendapatan nasional atau retribusi pendapatan nasional.

#### 4. Pemungutan Pajak Harus Sederhana (*Simplicity*)

Dalam mencapai efisiensi pemungutan pajak serta memudahkan masyarakat untuk menghitung dan memperhitungkan pajaknya, maka harus ditetapkan sistem pemungutan pajak yang sederhana dan mudah dilaksanakan sehingga masyarakat tidak terganggu dengan permasalahan pajak yang sulit. Dengan demikian maka pemungutan pajak harus diusahakan seefektif dan seefisien mungkin sehingga bisa memasukan uang ke kas negara sebanyak-banyaknya dan meminimalkan biaya pemungutan sekecil-kecilnya, dalam pemungutan pajak berlaku pertimbangan analisis biaya dan manfaat (*cost and benefit analysis*).

Dalam pemungutan pajak perlu menerapkan beberapa pedoman agar tujuan perpajakan tercapai secara efisien dan efektif. Salah satu pedoman adalah yang di kemukakan oleh Adam Smith dalam bukunya "*An Inquiry into the Nature*

*and Causes of the Wealth of Nation*". Syarat pemungutan pajak oleh Adam Smith disebut juga dengan "*the Four Maxims*" atau "*the Four Canons*" yaitu :<sup>37</sup>

- a. *Equality* (kesamaan), artinya bahwa dalam pemungutan pajak tidak boleh ada diskriminasi di antara sesama wajib pajak dan dalam keadaan yang sama harus dikenakan pajak yang sama pula.
- b. *Certainty* (kepastian), artinya bahwa pajak yang dibayar oleh wajib pajak harus jelas dan tidak mengenal kompromi, dalam arti bahwa pemungutan pajak ada kepastian hukum mengenai subyek, obyek, tarip, cara dan waktu pembayaran.
- c. *Convinience of payment* (kesenangan), artinya bahwa pajak hendaknya dipungut pada saat yang tepat atau saat yang paling baik bagi wajib pajak yaitu sedekat mungkin dengan saat diterimanya penghasilan.
- d. *Effisiency* (ekonomi), artinya bahwa pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat mungkin, dalam arti bahwa biaya pemungutan pajak hendaknya lebih kecil dari hasil penerimaan pajak.

Seiring dengan pengertian umum pajak tersebut, di bawah ini dapat diungkapkan tentang pengertian pajak daerah dan eksistensinya. Pajak daerah dan rtribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang sangat potensial terutama bagi Daerah Tingkat II oleh karenanya, dalam pengelolaannya telah diatur secara nasional berdasarkan Undang-Undang Nomer 18 Tahun 1997 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomer 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam hal ini penerbitan pengaturan perundang-

---

37. Muqodim, Loc. Cit., Hal. 19.

undangan tersebut dimaksudkan untuk menggali secara optimal paak daerah dan reribusi daerah yang merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab dengan titik berat pada Daerah Tingkat II.

a. Pajak Daerah

Pengertian Pajak Daerah pada prinsipnya sama dengan pajak pada umumnya, yaitu suatu iuran penduduk (rakyat) kepada negara yang berdasarkan undang-undang dapat dipaksakan, dimana pembayarannya tidak mendapat imbalan (*tegen prestasi*) secara langsung yang ditunjuk oleh negara yang gunanya untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan tugas negara harus menyelenggarakan pemerintahan.<sup>38</sup>

Pengertian Pajak Daerah secara khusus telah dirumuskan dalam Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, yaitu :

“Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah”.

Atas dasar pengertian pajak maupun pajak daerah di atas, menunjukkan bahwa pengertian pajak daerah pada dasarnya iuran wajib penduduk kepada daerah yang sifatnya dapat dipaksakan sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku dan pembayarannya tidak memperoleh imbalan secara

---

38. Budiono B, *Uraian Dasar Negara (Umum) dan Administrasinya*, Berita Pajak, Jakarta, 1986, Hal. 5.

langsung yang seimbang. Sedangkan perbedaanya terletak pada subyek pajak atau wajib pajaknya, dimana menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tidak hanya menyebutkan penduduk atau rakyat, melainkan diperinci yang terdiri dari orang pribadi atau badan hukum.

Pengertian pajak negara dan pajak daerah tersebut, menunjukan bahwa subyek pajaknya sama-sama penduduk, sehingga memungkinkan terjadinya pemungutan pajak secara ganda. Oleh karenanya pemungutan pajak di daerah perlu ditetapkan bahwa lapangan pajak daerah adalah pajak yang belum diusahakan atau dipungut oleh negara (pemerintah pusat) sebagai pajak pusat.<sup>39</sup>

Namun demikian dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, maka jenis Pajak Daerah Tingkat I maupun Pajak Daerah Tingkat II telah ditentukan ruang lingkupnya. Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) diatur mengenai Pajak Daerah Tingkat I yang terdiri dari; Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Sesuai sifat pemungutan pajak yang dapat dipaksakan dan subyek pajak (wajib pajak) tidak memperoleh imbalan secara langsung dari negara atau daerah pada dasarnya bukan berarti wajib pajak tidak memperoleh imbalan sama sekali, hal ini dapat dilihat dari fungsi pajak (termasuk retribusi)

---

39. Wajong J, *Administrasi Keuangan Daerah*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1989, Hal.55.

dalam masyarakat yang meliputi fungsi *budgeter* dan fungsi *regulerend*. Fungsi *budgeter* mempunyai tujuan untuk memasukan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara untuk membiayai pengeluaran (belanja) negara (daerah).

Sedangkan fungsi *regulerend* (mengatur) dari pajak adalah bahwa pajak bukan semata-mata untuk memasukan uang (pendapatan) sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara (daerah) melainkan juga digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>40</sup>

Mengingat dasar fungsi pajak terutama fungsi *budgeter*, maka manfaat pajak yang di peroleh bagi wajib pajak maupun pada masyarakat pada umumnya atas pemungutan pajak (terutama retribusi) tersebut adalah digunakannya hasil pemungutan pajak (retribusi) untuk membiayai pelaksanaan pembangunan yang hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Sebagai tindak lanjut dari penerbitan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka tatacara pemungutan dan pengolahan pajak daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomer 19 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah.

Selain pajak ada lagi pungutan oleh negara yang di sebut retribusi, definisinya adalah pungutan yang dilakukan sehubungan dengan sesuatu jasa atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah secara langsung dan nyata kepada pembayar. Contoh: retribusi parkir, retribusi jasa pelabuhan, retribusi pasar dan retribusi tol dan lain sebagainya.

---

40. Rachmat Soemitro, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, Eresco, Bandung, 1982, Hal.2.

Retribusi merupakan pembayaran dari wajib retribusi kepada pemerintah karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh pemerintah bagi wajib retribusi secara perorangan atau dapat diartikan sebagai pemungutan sebagai pembayaran pemakaian karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah bagi yang berkepentingan karena jasa yang diberikan oleh pemerintah dan berdasarkan peraturan umum yang dibuat oleh pemerintah. Dapat ditarik kesimpulan bahwa retribusi adalah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dengan jasa balik langsung yang dapat ditunjuk. Retribusi berbeda dengan pajak dalam hal imbalan jasa retribusi dipungut karena seseorang telah memanfaatkan atau menerima jasa dari negara, sedang pajak dipungut tanpa adanya jasa negara tersebut kepada wajib pajak. Bersifat ekonomis dalam pemaksaan retribusi sehingga siapa saja dapat tidak membayar retribusi, dengan tidak menolak untuk menikmati jasa balik tersebut.

Guna menetapkan kebijaksanaan umum tentang prinsip dan sasaran dalam menetapkan tarif retribusi maka retribusi digolongkan menjadi tiga golongan yaitu :<sup>41</sup>

- 1) Retibusi Jasa Umum;
- 2) Retribusi Jasa Usaha;
- 3) Retribusi Perizinan Tertentu.

Obyek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak untuk dijadikan sebagai obyek retribusi, yang antara lain :

---

41. Muqodim, Loc. Cit., Hal. 116.



- 1) Jasa Umum, antara lain pelayanan kesehatan dan pelayanan persampahan;
- 2) Jasa Usaha, antara lain penyewaan aset yang dimiliki atau dikuasi oleh Pemerintah Daerah, penyediaan tempat penginapan, usaha bengkel kendaraan, tempat pencucian mobil, dan penjualan bibit;
- 3) Perizinan Tertentu, pada dasarnya pemberian izin oleh Pemerintah daerah tidak dipungut retribusi karena fungsi perizinan adalah untuk mengadakan pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan. Namun untuk melaksanakan fungsi tersebut pemerintah daerah masih kekurangan biaya, oleh karena itu terhadap beberapa perizinan tertentu masih dipungut retribusi. Perizinan tertentu yang dapat dipungut retribusi antara lain Izin Mendirikan Bangunan, Izin Peruntukan Penggunaan Tanah.

Berdasarkan hal tersebut diatas pengertian di atas pengertian dari retribusi daerah dapat dipaparkan dibawah ini.

b. Retribusi Daerah

Pengertian retribusi merupakan pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan negara bagi penduduknya secara perorangan.<sup>42</sup> Retribusi juga dapat diartikan sebagai berikut :

“Pemungutan sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh pemerintah dan berdasarkan peraturan umum yang di buat pemerintah”.<sup>43</sup>

---

42. Amin Widjaya Tunggal, *Pelaksanaan Pajak Penghasilan Perorangan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995, Hal. 16.

43. *Manual Administrasi Pendapatan Daerah*, Dirjen Puod Depdagri, Jakarta, 1993, Hal. 6.

Menurut Amin Widjaja Tunggal retribusi dapat diartikan sebagai berikut :

“Retribusi adalah suatu pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan negara bagi penduduk secara perorangan”.<sup>44</sup>

Sedangkan pengertian retribusi daerah telah dirumuskan dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (26) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu :

*“Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus diberikan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang atau badan”.*

Sesuai pengertian retribusi atau retribusi daerah di atas, dapat diketahui bahwa pada hakekatnya pengertian retribusi daerah sama dengan pajak daerah atau iuran wajib penduduk kepada daerah. Sedangkan perbedaanya terletak pada kontra prestasi atas pemungutan tersebut, pada pajak daerah kontra prestasinya tidak diperoleh secara langsung oleh wajib pajak, sementara untuk retribusi daerah kontra prestasinya diperoleh secara langsung oleh wajib retribusi dalam bentuk pelayanan jasa maupun perizinan tertentu.

Jenis reribusi derah yang diatur dalam ketentuan Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, yang terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi perizinan tertentu. Oleh karenanya, obyek retribusi daerah

---

44. Amin Widjaja Tunggal, Op.cit, Hal. 6.

meliputi tiga unsur; yaitu jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu. Dan mengenai tata cara pemungutan dan pengelolaan retribusi daerah di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah.

Berbagai macam jenis retribusi dapat disesuaikan berdasarkan potensi daerah yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut. Rochmat Soemitro mengemukakan berbagai jenis retribusi yang antara lain : retribusi bus, retribusi peron, retribusi angkutan non bus, retribusi kios dan sumbangan listrik, retribusi parkir bus kota, retribusi parkir kendaraan bermotor roda dua dan roda empat, retribusi air minum dan kamar kecil.<sup>45</sup>

J. Wajong juga memberikan beberapa contoh retribusi daerah yang antara lain: retribusi pasar, retribusi pembantaian hewan, retribusi tempat pemandian, retribusi rumah sakit, retribusi air minum, uang leges (materai), retribusi penyeberangan, retribusi pelelangan ikan, uang sekolah, dan retribusi pekuburan.<sup>46</sup>

Hadi Setia Tunggal menyebutkan beberapa perbedaan antara pajak daerah dan retribusi daerah antara lain sebagai berikut :

- 1) Pajak dipungut dengan tidak mempersoalkan ada tidaknya pemberian jasa oleh daerah. Pemungutan pajak didasarkan atas paksaan dengan melalui peraturan perundang-undangan, sedangkan pemungutan retribusi didasarkan atas pemberian jasa kepada pemakai jasa. Kalau ingin memperoleh jasa atau memakai jasa yang disediakan oleh

---

45. Rochmat Soemitro, Loc. Cit., Hal.23.

46. Wajong J, Op. Cit., Hal 17.

pemerintah daerah barulah memakai jasa membayar retribusi. Atau dengan kata lain retribusi dapat dihindari oleh masyarakat dengan tidak memakai jasa pemerintah daerah tersebut.

- 2) Pajak dibayar oleh orang tertentu yaitu wajib pajak, tetapi retribusi dibayar oleh siapa saja yang telah mengenyam jasa dari pemerintah daerah.
- 3) Pajak umumnya dikenakan setahun sekali, yang dapat dibayar sekaligus atau dengan angsuran. retribusi dapat dipungut berulang kali untuk mereka yang menikmati jasa yang disediakan. Karena retribusi kecil jumlahnya, maka umumnya pembayarannya jarang diangsur.<sup>47</sup>

Adapun persamaan antara pajak daerah dan retribusi daerah pada prinsipnya dapat dilihat dari fungsinya. Dalam hal ini baik pajak daerah maupun retribusi daerah hasil pemungutannya dimasukkan dalam kas daerah, yang selanjutnya digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah termasuk pelaksanaan pembangunan daerah.

Disamping itu sifat pemungutan pajak daerah maupun retribusi daerah keduanya dapat dipaksakan oleh pemerintah daerah kepada wajib pajak (penduduk) hal ini sejalan dengan rumusan retribusi yang dikemukakan oleh R.Santoso Brotodihardjo,yaitu :

*"Iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang dikenakan pada seseorang yang mendapat jasa timbal balik secara langsung berdasarkan peraturan yang berlaku umum".<sup>48</sup>*

Sedangkan lebih terperinci lagi menurut Tubagus Chairul Amachi Zandhni, yang meliputi :

---

47. Hadi Setia Tunggal, *Tanya Jawab Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU Nomor 18 Tahun 1997 beserta peraturan Pelaksanaannya)*, Havarindo, Jakarta, 1999, Hal. 3.

- 1) Sebagai alat suatu instrument suatu negara, untuk menjalankan tugas-tugas rutin yang memerlukan biaya, maupun dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional.
- 2) Sebagai alat untuk mendorong investasi, menciptakan iklim investasi yang lebih baik dengan memberikan intensif perpajakan yang sedemikian rupa hingga mamapu mendorong peningkatan investasi.
- 3) Sebagai alat distribusi pengenaan pajak dengan tarif progresif dimaksudkan untuk mengenakan pungutan yang lebih tinggi guna meningkatkan pendapatan negara.<sup>49</sup>

### C. Teori Hukum Dalam Otonomi Daerah

Dalam rangka otonomi daerah, secara formal daerah diberikan kewenangan untuk mengelola pajak daerah dan retribusi daerah (propinsi, kota/kabupaten), maka pemerintah daerah akan berperan mengatur dengan merumuskan aturan hukum tingkat daerah tersebut. Menurut Esmi Warassih<sup>50</sup> dalam menyoroti perumusan hukum dalam menghadapi kemiskinan yang terjadi untuk terciptanya pemerataan pembangunan di Indonesia, mengemukakan langkah yang ditempuh dalam rangka mengimplementasikan pembangunan dengan mengutamakan prinsip demokrasi yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia baik kemiskinan lahir maupun kemiskinan bathin, satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah melaksanakan pembangunan yang dapat memberikan kesempatan kerja pada setiap

---

48. Santoso Brotodiharjo, Op. Cit., Hal. 17.

49. Tubagus Chairul Amachi Zandhani, *Perpajakan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992, Hal. 17.

50. Esmi Warassih, *Kebijakan Pemerataan dalam Pembangunan*, Majalah Hukum Nomor ISSM 0126-1398, Undip Semarang, 1983.

orang, pembangunan yang menaikkan penghasilan setiap orang juga pembangunan yang mencerminkan keadilan sosial dan meningkatkan martabat manusia.

Menurut Satjipto Raharjo<sup>51</sup>, hukum adalah membicarakan hubungan antar manusia yang berarti membicarakan keadilan. Hukum tidak bisa hanya dibicarakan dalam wujud suatu hubungan yang formal tetapi perlu dilihat sebagai ekspresi dari cita-cita keadilan masyarakatnya. Selanjutnya dijelaskan hukum itu merupakan bagian dari perangkat kerja sistem sosial dengan fungsi mengintegrasikan kepentingan-kepentingan anggota masyarakat sehingga tercipta ketertiban, sedangkan tugas hukum adalah menentukan prosedur-prosedur yang harus dilaksanakan dalam hubungan antara satu orang dengan orang lain. Oleh karena itu hukum yang akan dilahirkan oleh pemerintah propinsi tidak hanya dipandang dari segi penertiban saja tetapi juga harus dari segi keadilan. Dengan demikian pemerintah propinsi, kota/kabupaten dan masyarakatnya dalam mengelola sumber daya yang ada harus mampu menentukan empat peran (*rule*) yang akan dilakukan dalam proses pembangunan di daerah.

Menurut Lincoln Arsyad<sup>52</sup>, keempat peran itu, adalah : Pertama *Entrepreneur*, (bertanggung jawab) menjalankan suatu usaha bisnis dan bisa mengembangkan suatu usaha tersendiri (BUMD). Kedua, *Kordinator*, untuk menetapkan atau mengusulkan strategi-strategi bagi pembangunan di daerahnya dan melibatkan kelompok masyarakat dalam proses pengumpulan dan pengevaluasian informasi ekonomi. Ketiga, *Failisator*, pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan, pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan *attitudinal* (perilaku atau budaya masyarakat) di daerahnya. Keempat, *Stimulator* Pemerintah

---

51. Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya, Bandung, 2000, Hal. 159.

52. Lincoln Arsyad, *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, BPFE, Yogyakarta, 1999, Hal. 121.

daerah dapat menstimulasi penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang akan mempengaruhi perusahaan-perusahaan untuk masuk ke daerah tersebut dan menjaga agar perusahaan yang telah ada tetap berada di daerah tersebut.

#### **D. Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Daerah**

Salah satu cara mengatasi kemacetan dan ketidaksesuaian antara kebijaksanaan yang diputuskan dari pusat dan kondisi daerah harus segera dibuat sebuah kerangka kebijaksanaan yang sangat strategis. Salah satu kebijaksanaan mendasar yang sesuai dengan keadaan saat ini adalah “otonomi daerah”.

Sebagai pelaksanaan dari Pasal 18 UUD 1945, di dalam penyelenggaraan pemerintah daerah telah dibuat beberapa kali undang-undang tentang pemerintah daerah yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 PENPRES Nomor 6 Tahun 1959, PENPRES Nomor 5 Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintah di Daerah. Namun sesuai dengan perkembangan keadaan, undang-undang tersebut dalam pelaksanaannya tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan tantangan persaingan global.

Selama ini terdapat ketimpangan antara pusat dan daerah. Menurut lembaga kajian ekonomi Advisory Group <sup>53</sup>, menyebutkan setidaknya terdapat lima kesenjangan yang sangat kronis :

1. Kesenjangan pendapatan antar daerah yang besar;
2. Kesenjangan investasi antar daerah yang besar;

---

53. Tim Lapera, Loc. Cit., Hal. 58-60.

3. Pemusatan industri di Jawa. Akibat dari kebijakan investasi dan birokrasi terpusat, serta infrastruktur di pulau Jawa yang lebih baik, maka pertumbuhan investasi hanya terkonsentrasi di Jawa;
4. Pendapatan daerah dikuasai oleh pusat. Sentralisasi pusat sangat menguasai pendapatan daerah;
5. *Net negative transfer* yang besar. Salah satu yang mendorong melebarnya kesenjangan regional adanya kepentingan dalam alokasi kredit.

Untuk mengantisipasi hal-hal tersebut Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia telah mengeluarkan Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan atas ketetapan inilah kemudian diterbitkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dengan prinsip otonomi pada daerah kabupaten dan atau kota lebih luas, antara lain <sup>54</sup>

1. Perkembangan lingkungan strategis.

Perkembangan lingkungan lingkungan strategis ini bergerak cepat dan dinamis dengan memperhatikan :

- a. Pada tingkat nasional telah digerakkan reformasi nasional dalam suasana krisis moneter dan ekonomi. Era baru pasca orde baru sedang mencari bentuknya menuju kehidupan yang demokratis, adil dan sejahtera.
- b. Pada tingkat internasional, gerakan liberalitas perdagangan dan investasi terus berkembang dengan komitmen Indonesia terhadap AFTA, APEC, WTO dan kesepakatan IMF. Indonesia menghadapi persaingan yang kian tajam dalam pasar internasional.

---

54. Gubernur Jawa Tengah, *Antisipasi Permasalahan Pada Era Otonomi Daerah*, Semarang, 2000, Hal. 6-10.



## 2. Paradigma penyelenggaraan otonomi daerah

Paradigma penyelenggaraan otonomi daerah pada masa mendatang mencakup hal-hal sebagai berikut :

- a. Distribusi kewenangan pemerintah dan pembangunan secara lebih luas;
- b. Demokratisasi harus tumbuh dan berkembang;
- c. Pelaksanaan otonomi daerah luas, utuh dan bulat;
- d. Penyelenggaraan otonomi daerah perlu didukung sumber pembiayaan;
- e. Wujud kemandirian daerah;
- f. Peranan Pemerintah Daerah;
- g. Peningkatan sumberdaya manusia.

Tujuan yang ingin dicapai dengan sistem otonomi daerah yang baru adalah semakin meningkatnya pelayanan publik melalui demokratisasi pemberdayaan masyarakat, pemerataan dan keadilan serta pemanfaatan keanekaragaman dan potensi daerah. Oleh karena itu diperlukan 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi, yaitu:<sup>55</sup>

1. Sumber daya manusia yang dapat mendukung diberlakukannya peraturan;
2. Organisasi dan manajemen;
3. Perkuatan akses dan kemampuan seluruh pelaku (*stakeholders*) pembangunan.

Selain beberapa persyaratan yang telah dikemukakan di atas, maka daerah otonom diharapkan memiliki beberapa strategi dalam penyelenggaraan otonomi daerah, yaitu <sup>56</sup> :

---

55. Bappeda Jawa Tengah, *Strategi Dan Kebijakan Dalam Mengantisipasi Pelaksanaan UU.Nomor 22 Tahun 1999 dan UU.Nomor.25 Tahun1999 di Jawa Tengah*, Hal. 4.

56. Gubernur, Opcit, Hal. 16.

1. *Self Regulating Power*, adalah kemampuan mengatur otonomi secara optimal tanpa intervensi pemerintah pusat.
2. *Self Modifying Power*, adalah penyelenggaraan pemerintah daerah diharapkan mempunyai legitimasi kuat dari masyarakatnya baik pada posisi kepala daerah sebagai unsur eksekutif maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur legislatif.
3. *Financial Resources*, adalah kemampuan sumber-sumber penghasilan yang memadai untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan yang secara riil menjadi kebutuhannya.
4. *Brain Power*, adalah ketersediaan sumber daya manusia yang memadai baik sumber daya aparatur maupun masyarakatnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka diperlukan langkah-langkah kegiatan yang harus ditempuh dalam pelaksanaan otonomi daerah, yaitu <sup>57</sup> :

1. Masalah pembagian kewenangan;
2. Penyesuaian kelembagaan;
3. Penataan aparatur/personil;
4. Pembiayaan/keuangan daerah;
5. Peralatan/prasarana kelengkapan;
6. Penyesuaian pranata hukum/Perda;
7. Pelibatan partisipasi masyarakat.

Pertanyaan utama yang layak diajukan adalah : (1) Dimana dan bagaimana posisi Pemerintah Daerah dalam kerangka otonomi daerah ? dan (2) Apakah dalam

---

57. Gubernur, Loc. Cit.

konsep otonomi daerah ini, kekuasaan di daerah tidak dibagi, atau ada pembagian kekuasaan yang jelas ? serta (3) Jika ada pembagian sejauh mana fungsi dari masing-masing institusi tersebut ?

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, posisi pemerintah daerah menjadi jelas bahwa : Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Esekutif Daerah. Konsep baru ini, secara langsung atau tidak menegaskan dua hal penting : (1) Bahwa Pemerintah Daerah memiliki eksistensi, sejalan dengan keberadaan daerah . Pemerintah Daerah tidak semata-mata ada karena ada Pemerintah Pusat, melainkan sebagaimana organisasi daerah yang bertugas menyelenggarakan urusan daerah sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat; (2) Bahwa pemerintahan terdiri dari dua jenis kekuasaan, yakni eksekutif dan legislatif dimana keduanya dipisahkan<sup>58</sup>.

Pemerintah Daerah dalam menyongsong otonomi daerah telah mengadakan restrukturisasi bentuk pemerintahan, lembaga, struktur pemerintahan, kedudukan eksekutif atau Bupati, kedudukan sekretaris daerah, lembaga legeslatif daerah. Dasar yang melatarbelakangi restrukturisasi tersebut karena adanya arus reformasi<sup>\*</sup>, reformasi telah menimbulkan pergeseran organisasi berupa pelimpahan wewenang secara desentralisasi melalui otonomi daerah. Tatanan ini disepakati menjadi dasar pijakan baru dalam menyusun sistem pemerintahan yang lebih demokratis. Maka

---

58. I Widarta, Loc. Cit., Hal. 31.

\* Arus reformasi merupakan bentuk perubahan yang memiliki berbagai dimensi :

- a. Adanya upaya untuk merubah struktur pemerintahan/tatanan politik yang dianggap membungkam kebebasan hak asasi manusia.
- b. Adanya upaya yang lebih konkret untuk memberdayakan lembaga/organisasi sosial politik yang selama ini dimarginalkan bisa terlibat dalam mengurus kelangsungan bangsa.
- c. Adnya upaya memfungsikan kembali peran-peran berbagai komponon masyarakat yang semasa pemerintahan terdahulu tidak di fungsikan (Syaukani, *Menatap harapan masa depan Otonomi Daerah*, Gerbang Dayaku, 2000, Kalimantan Timur, Hal 218).

dalam pelaksanaan selanjutnya, reformasi yang demokratis mengarahkan ke bentuk Pemerintahan yang baik (*good government*) dan pemerintahan yang jujur, bersih dan berwibawa (*accountability*). Hanya pemerintahan yang memiliki keinginan baik maka akan menjadikan pemerintahan semakin kuat. Pemerintahan Daerah diberi wewenang yang lebih luas untuk melakukan perubahan sistim birokrasi di daerah berdasarkan urgensinya masing-masing.

#### **E. Fungsi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah**

Pajak daerah dan retribusi daerah adalah bentuk pajak yang dipungut oleh negara yang pelaksanaan pemungutannya diserahkan kepada daerah. Sebagai pungutan yang dilakukan oleh negara, maka pajak daerah dan retribusi daerah seperti yang telah dikemukakan diatas merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, oleh karena itu pelaksanaannya tetap diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal pemungutannya secara konstitusional Undang-Undang Dasar 1945 menentukan sebagai berikut :

Pasal 5 Ayat (1) yang menyatakan :

*"Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat"*.

Pasal 18 yang menyatakan :

*"Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang"*.

Pasal 20 Ayat (1) yang menyatakan :

*"Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang"*.

Pasal 23 Ayat (2) yang menyatakan :

*"Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-Undang".*

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, di antara pasal-pasal nya menentukan antara lain :

1. Pasal 79 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menentukan, bahwa sumber-sumber pendapatan daerah diantaranya terdiri dari :
  - a. Hasil Pajak Daerah
  - b. Hasil Retribusi Daerah .<sup>59</sup>
2. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menentukan Pajak dan Retribusi Daerah ditentukan dengan Undang-Undang.

Dengan adanya peraturan Perundang-Undangan Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dalam upaya penyelenggaraan otonomi daerah yang berupa pemberdayaan masyarakat dalam berbagai bidang, maka dalam mempersiapkan penyelenggaraan otonomi daerah fungsi pemungutan pajak oleh pemerintah daerah<sup>60</sup> :

1. Tumbuhnya kemandirian dan keberanian mengambil peran, yaitu :

Pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah diharapkan sebagai bentuk kesiapan masyarakat mengambil peranan juga sebagai kesiapan pemerintah keputusan yang tepat disertai rasa tanggung jawab.
2. Adanya komitmen rasa persatuan, yaitu :

Dengan adanya komitmen pengurusan rumah tangga sendiri terutama dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang selama ini pemungutannya diserahkan kepada daerah tetapi hasil pemungutan tersebut diserahkan kepada

---

59. Lebih jelas lihat Pasal 79 huruf a angka 1 dan 2 UU Nomor 22 Tahun 1999.

60. Syaekani HR, Op. Cid., Hal.176-177.

pusat dengan prinsip perimbangan keuangan daerah, dengan diberlakukannya otonomi daerah, segala kebijakan tentang pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dilimpahkan wewenangnya kepada daerah, begitu juga mengenai hasil pungutan diserahkan kepada pemerintah daerah.

3. Adanya masyarakat yang Egaliter, yaitu :

Dengan adanya persamaan hak dan kewajiban dalam masyarakat terutama, hak dan kewajiban yang dipunyai oleh pemerintah daerah, maka fungsi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah menjadi suatu tolok ukur suatu asas kebersamaan (*Egalitarian*), yang merupakan salah satu instrumen dari otonomi daerah.

4. Meningkatnya kemampuan pemberdayaan masyarakat, yaitu :

Fungsi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah merupakan suatu indikator dari suatu daerah mengenai kemampuan pemberdayaan masyarakat dan tingkat kemajuan suatu daerah dengan indikator meningkatnya hasil pendapatan daerah melalui pajak daerah dan retribusi daerah.

Hal-hal dibawah ini merupakan prinsip-prinsip dalam pemberian otonomi daerah yang dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan otonomi daerah :

1. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemeratan, serta potensi dan keanekaragaman daerah.
2. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab.

3. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota, sedangkan daerah propinsi merupakan otonomi yang terbatas.
4. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga terjamin hubungan serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah.
5. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom, dan karenanya dalam daerah kabupaten dan daerah kota tidak ada lagi wilayah administrasi.
6. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi Badan Legislatif Daerah.
7. Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada daerah propinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi.
8. Pelaksanaan tugas pembantuan dimungkinkan, tidak hanya dari pemerintah kepada daerah, tetapi juga dari pemerintah dan daerah kepada desa yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan pertanggungjawaban kepada yang menugaskan.<sup>61</sup>

Secara teoritis bahwasanya penyelenggaran otonomi daerah dilaksanakan berdasarkan kekuasaan yang dibagi dengan vertikal dan horisontal, yaitu :

1. Secara vertikal, yaitu pembagian kekuasaan menurut tingkatnya, maksudnya ialah pembagian kekuasaan antar beberapa tingkat pemerintahan. Carl. J. Freidrich memakai istilah pembagian kekuasaan secara teritorial (*teritorial devision of power*).

---

61. Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Butir i, Hal.64.

2. Secara horisontal, yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsinya. Pembagian ini menunjukkan perbedaan antara fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang lebih dikenal dengan *trias politica* atau pembagian kekuasaan (*division of power*).<sup>62</sup>

Prinsip-prinsip otonomi daerah pada dasarnya untuk mengembangkan kedaulatan daerah yang harus dilihat sebagai suatu dialektika antara kebutuhan dan tuntutan masyarakat, yang berhadapan dengan kepentingan kekuasaan.<sup>63</sup> Oleh sebab itu, kebijakan yang hanya mengatur mengenai hak dasar daerah, tanpa eksplisit menyebutkan apa hak rakyat, akan masih menyimpan potensi penyimpangan.<sup>64</sup> Kondisi ini menurut Charles. O. Jones merupakan suatu proses kebijakan.<sup>65</sup> Proses kebijakan didefinisikan sebagai “sebuah rangkaian tindakan yang secara definitif berkaitan dengan tujuan”.<sup>66</sup>

Proses pembuatan kebijakan tersebut meliputi penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan.<sup>67</sup> Penyusunan agenda mempunyai karakteristik para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Banyak masalah yang tidak disentuh sama sekali, sementara lainnya ditunda untuk waktu yang lama. Formulasi kebijakan mempunyai karakteristik para pejabat merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah. Alternatif kebijakan melihat perlunya membuat perintah eksekutif, keputusan peradilan dan tindakan legislatif. Adopsi kebijakan mempunyai karakteristik alternatif kebijakan yang diadopsi dengan

---

62. Syahda Guruh LS, Op. Cit., Hal. 68-69.

63. Tim Laper, *Otonomi Versi Negara*, Laper Pustaka Utama, Yogyakarta, 2000, Hal. 81.

64. Tim Lampera, Ibid, Hal. 80.

65. Charles O Jones, *Pengantar Kebijakan Publik*, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, Hal. 43.

66. Charles O Jones, Ibid.

67. William N Dunn, *Pengantar Analisa Kebijakan Publik*, Gajah Mada University Press, 2000, Hal. 24



dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus diantara direktur lembaga, atau keputusan peradilan. Implementasi kebijakan mempunyai karakteristik kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Penilaian kebijakan mempunyai karakteristik unit-unit pemeriksaan dan akuntansi dalam pemerintahan menentukan apakah badan-badan eksekutif, legislatif dan peradilan memenuhi persyaratan undang-undang dalam pembuatan kebijakan dan pencapaian tujuan.<sup>68</sup>

Dengan diberlakukannya otonomi daerah maka dalam hal kebijakan terjadi paradigma pergeseran kebijakan dari kebijakan lama ke kebijakan baru.<sup>69</sup> Perubahan paradigma segi utama yang harus diperjelas, bahwa kebijakan otonomi daerah produk reformasi, berangkat dari paradigma yang berbeda dengan paradigma rezim otoriter orde baru. Kebijakan lama memformat otonomi daerah berawal dan berpusat pada pemerintah pusat, maka kebijakan baru sebaliknya berawal dan berpusat pada pemerintahan daerah. Hal ini tercermin dari muatan yang lebih menekankan desentralisasi ketimbang dekosentrasi. Pada yang lama lebih ditekankan dekosentrasi, ketimbang desentralisasi.<sup>70</sup> Kebijakan lama dan kebijakan baru merupakan kebijaksanaan negara, menurut James E. Anderson merumuskan kebijaksanaan negara sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.<sup>71</sup>

Mewujudkan pemerintahan yang kuat di bidang perekonomian maka perlu perekonomian yang disusun sesuai dengan ekonomi kerakyatan dalam sistem ekonomi kerakyatan yang diamanatkan oleh Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945

---

68. William N Dunn, Ibid, Hal. 24.

69. I Widarta, *Cara Mudah Memahami Otonomi Daerah*, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta, 2001, Hal.16.

70. I Widarta, Ibid, Hal.24.

71. Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijaksanaan*, Bumi Aksara, Jakarta, 1997, Hal. 5.

adalah suatu situasi perekonomian dimana berbagai kegiatan ekonomi diselenggarakan dengan melibatkan partisipasi seluruh warga masyarakat, hasilnya dinikmati oleh seluruh anggota masyarakat, sementara penyelenggaraan kegiatan ekonomi itu berada di bawah pengendalian atau pengawasan anggota-anggota masyarakat, yang diutamakan adalah kemakmuran masyarakat, bukan kemakmuran orang seorang.<sup>72</sup>

Menurut Sri-Edi Swasono sistem ekonomi Indonesia yang berdasarkan atas Demokrasi Eekonomi itu akan lebih cepat terwujud jika dalam setiap penyusunan kebijaksanaan dikaitkan lebih langsung dengan butir-butir demokrasi ekonomi. Dengan demikian perencanaan pembangunan sekaligus perencanaan sistem, dan pembangunan ekonomi sekaligus merupakan pembangunan sistemnya.<sup>73</sup>

Dalam pandangan aliran hukum sosiologis seperti pendapat Pound<sup>74</sup>, kita perlu memperhitungkan dengan sungguh-sungguh fakta-fakta sosial yang harus dihadapi oleh hukum, dan terhadap fakta tersebut hukum harus diterapkan. Semua itu untuk memungkinkan, mendorong, dan sekaligus penerapan peraturan-peraturan hukum agar lebih baik dan memiliki indikator ekonomi sebagai wacana untuk menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Pendapatan Asli Daerah (PAD)<sup>75</sup> di dalam menyongsong otonomi daerah.

---

72. Revrisond Baswir, *Politik Ekonomi Indonesia Baru*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000, Hal. 7.

73. Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi*, BPFE Yogyakarta, Yogyakarta, 2000, Hal. 241.

74. Muhammad Djumhana, *Hukum Ekonomi Sosial Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, Hal.41.

75. Lihat: Suseno Triyanto Widodo, *Indikator Ekonomi*, Kanisius, Yogyakarta, 1990; Lihat juga : Ahmad Erani Yustika, *Industrialisasi Pinggiran*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000, Hal. 244.

## **F. Peraturan–Peraturan Daerah Mengenai Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah**

Penyelenggaraan tugas pemerintahan disuatu negara, memerlukan sumber-sumber pembiayaan guna menunjang kegiatan yang dijalankan oleh masing-masing tingkat pemerintahan yang bersangkutan, dalam arti bahwa penyediaan sumber keuangan tersebut sebanding dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh penyelenggara negara. Adanya kaitan yang erat antara kegiatan pemerintahan dengan sumber keuangan pada hakikatnya memberikan petunjuk bahwa pengaturan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah tidak terlepas dari masalah pembagian kewenangan antara tingkat pemerintahan. Uraian pelaksanaan desentralisasi di Indonesia yang lebih serius ditandai dengan diundangkannya 2 (dua) undang-undang yang mendukung otonomi daerah, yaitu Pasal 79 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Jo Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang dulu diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, maka sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri atas :<sup>76</sup>

1. Pendapatan Asli Daerah, yaitu :
  - a. Hasil pajak daerah;
  - b. Hasil retribusi daerah;
  - c. Hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ;
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
2. Dana perimbangan;
3. Pinjaman daerah;
4. Lain- lain pendapatan daerah yang sah.

---

76. Dinas Pendapatan Daerah Prop. Jawa Tengah, *Kebijakan Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah Dalam Rangka Pelaksanaan UU.18 Tahun 1997*, Hal. 2.

Sumber pendapatan daerah tersebut diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

Dengan pertimbangan bahwa dalam perkembangannya, Negara Republik Indonesia, telah menghasilkan pembangunan yang pesat dalam kehidupan nasional, yang perlu dilanjutkan dengan dukungan pemerintah dan seluruh potensi masyarakat, karena itu menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan yang merupakan sarana peran serta dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Disamping itu, pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggungjawab dengan titik berat pada Daerah Tingkat II. Sebagaimana kita ketahui, bahwa dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah saat ini dilandasi pada Undang-Undang Nomor 11 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah. Kedua undang-undang tersebut dipandang tidak sesuai dengan kondisi sekarang ini. Oleh karena itu pemerintah pada Tanggal 23 Mei 1997 telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan dirubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Ada beberapa hal yang melandasi pemikiran diajukanya Undang-Undang tersebut, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan penyederhanaan dari berbagai pungutan daerah.
2. Memperkuat landasan penerimaan daerah khususnya daerah tingkat II baik dari segi pajak daerah maupun retribusi daerah, sehingga akan mengurangi jenis pajak dan retribusi daerah yang tidak rasional dan efisien.

Sedangkan dasar hukum pelaksanaannya lebih lanjut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah yaitu <sup>77</sup> :

1. Dasar hukum Peraturan Pemerintah Pajak Daerah yang berlaku sekarang :
  - a. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah ;
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
  - c. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
  - d. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 tentang Kriteria Wajib Pajak yang Menyelenggarakan Pembukuan dan Tata Cara Pembukuan;
  - f. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
  - g. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1998 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Tingkat I dan Tingkat II tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

---

77. Muqodim, Loc. Cit., Hal. 112-114.

2. Dasar hukum Peraturan Pemerintah Retribusi Daerah yang berlaku sekarang :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah;
- c. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- d. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 tentang Kriteria Wajib Pajak yang Menyelenggarakan Pembukuan dan Tata Cara Pembukuan;
- e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
- f. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah.
- g. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1998 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Tingkat I dan Tingkat II tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dengan demikian beberapa peraturan dinyatakan tidak berlaku lagi sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah beserta revisinya yaitu Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sedangkan Undang-Undang atau Ordonansi yang dinyatakan tidak berlaku lagi adalah :

1. Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor 1934;
2. Ordonansi Pajak Potong 1936;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1947 tentang Pajak Radio sebagaimana ditambah dan diubah , terakhir dengan Undang-Undang Nomor 27 Drt. Tahun 1957;

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1947 tentang Pajak Pembangunan I sebagaimana telah ditambah dan diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 27 Drt. Tahun 1957;
5. Pasal 3 ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1956 tentang Pertimbangan Keuangan antara Negara dan Daerah-Daerah yang berhak Mengurus Rumah Tangganya Sendiri;
6. Undang-Undang Nomor 11 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957 tentang Pajak Bangsa Asing sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 87 Tahun 1958;
9. Undang-Undang Nomor 27 Prp. Tahun 1959 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1968 tentang Penyerahan Pajak-Pajak Negara, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bangsa Asing dan Pajak Radio kepada Daerah.

Sehubungan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdapat beberapa jenis-jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu <sup>78</sup> :

---

78. Muqodim, Loc. Cit., Hal. 115-133.

## 1. Pajak Daerah

a. Pungutan Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang dan dapat dipaksakan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sehingga dapat dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan dan Pembangunan Daerah.

### b. Jenis Pajak Daerah :

#### b.1. Pajak Daerah Tingkat I terdiri dari :

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN. KB);
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB.KB)
- 4) Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan Tanah.

#### b.2. Pajak Daerah Tingkat II terdiri dari :

- 1) Pajak Hotel;
- 2) Pajak Restoran;
- 3) Pajak Hiburan;
- 4) Pajak Reklame;
- 5) Pajak Penerangan Jalan;
- 6) Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Gol. C.

### c. Tarif Pajak Daerah :

Tarif paling tinggi untuk setiap jenis Pajak Daerah ditetapkan dengan undang-undang sedang Tarif Definitif ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dan atau Peraturan Daerah.

Khusus untuk tarif PKB, BBN.KB dan PBB.KB untuk seluruh Indonesia ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.



Adapun tarif paling tinggi yang diajukan dalam undang-undang tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor paling tinggi (5%);
- 2) Bea Balik Naman Kendaraan Bermotor paling tinggi (10%);
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor paling tinggi (5%);
- 4) Pajak Hotel dan Restoran paling tinggi (10%);
- 5) Pajak Hiburan paling tinggi (10%);
- 6) Pajak Reklame paling tinggi (25%);
- 7) Pajak Penerangan Jalan paling tinggi (10%);
- 8) Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Gol. C paling tinggi (20%);
- 9) Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan Tanah paling tinggi (20%);
- 10) Sedangkan Pajak terhutang dihitung dengan mengalikan Tarif Pajak dengan dasar Pengenaan.

d. Jenis Pajak Daerah lainnya :

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah jenis Pajak Daerah lainnya selain yang ditetapkan dalam undang-undang yang memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut :

- 1) Bersifat sebagai pajak dan bukan retribusi;
- 2) Obyek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan;
- 3) Umum;
- 4) Potensi obyek memadai;
- 5) Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif;
- 6) Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat;
- 7) Menjaga kelestarian lingkungan.

e. Obyek, Subyek dan Dasar pengenaan Pajak Daerah :

Ketentuan tentang obyek, subyek dan dasar pengenaan Pajak Daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

f. Pembagian hasil :

Hasil Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada Daerah Tingkat II setelah dikurangi 10% untuk Daerah Tingkat I yang bersangkutan, pelaksanaannya lebih lanjut diatur dengan Peraturan Pemerintah.

g. Tata Cara Pemungutan :

- 1) Pajak dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak.
- 2) Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajak yang dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- 3) Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajak yang dibayar sendiri dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan.

h. Tata Cara Penerbitan Ketetapan Pajak :

- 1) Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar.
- 2) Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan.
- 3) Penerbitan Ketetapan Pajak Daerah Nihil.

i. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan :

- 1) Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terhutang paling lama 30 hari setelah saat terhutangnya pajak.
- 2) Keterlambatan dalam pembayaran masa tersebut berakibatkan dikenakannya sanksi administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- 3) Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 bulan sejak tanggal diterbitkan.
- 4) Kepala Daerah atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% sebulan.
- 5) Tata Cara Pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan keputusan Kepala Daerah.

j. Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah tentang Pajak :

- 1) Pajak ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 2) Peraturan Daerah tentang pajak tidak berlaku surut.
- 3) Peraturan Daerah tentang pajak setidaknya mengatur tentang (1) nama, obyek dan subyek pajak; (2) dasar pengenaan, tarif dan cara perhitungan pajak; (3) wilayah pemungutan; (4) masa pajak; (5) penetapan; (6) tata cara pembayaran dan penangguhan; (7) Kadaluwarsa; (8) sanksi administrasi dan (9) tanggal mulai berlakunya.

- 4) Peraturan Daerah tentang Pajak mengatur ketentuan mengenai (1) pemberian pengurangan, keringan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak dan sanksinya; (2) tata cara penghapusan piutang pajak yang kadaluwarsa dan (3) asas timbal balik.

k. Keberatan dan Banding :

- 1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- 2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- 3) Keberatan tidak memenuhi persyaratan tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- 4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai kebutuhan yang berlaku.

l. Kadaluwarsa Penagihan :

- 1) Kadaluwarsa Penagihan pajak tertangguh apabila (1) diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa dalam hal ini Kadaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut dan (2) adanya pengakuan hutang pajak dari Wajib Pajak bail langsung maupun tidak langsung.

2. Retribusi Daerah

a. Pengertian Retribusi Daerah :

Retribusi Daerah adalah Pungutan Daerah sebagai Pembayaran atas Jasa atau Pemberian Izin tertentu yang khusus disediakan dan atau/diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi dan atau badan.

b. Obyek Retribusi Daerah :

b.1. Obyek Retribusi terdiri dari :

b.1.1. Jasa Umum :

Adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.

b.1.2. Jasa Usaha :

Adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan mengatur prinsip komersial karena pelayanan tersebut belum cukup disediakan oleh swasta.

b.1.3. Perijinan tertentu :

Adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

b.2. Pengertian Jasa, Jasa Umum, Jasa Usaha dan Perjanjian tertentu :

b.2.1. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa Usaha dan Pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

b.2.2. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

- b.2.3. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- b.2.4. Perijinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang penggunaan sumber daya alam, barang, perijinan, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- b.3. Jenis-jenis Retribusi dapat dibagi menjadi 3 (tiga) golongan :
- b.3.1. Retribusi Jasa Umum, terdiri dari :
- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan;
  - 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
  - 3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil;
  - 4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
  - 5) Retribusi Parkir dan di Tepi Jalan Umum;
  - 6) Retribusi Pasar;
  - 7) Retribusi Air Bersih;
  - 8) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - 9) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
  - 10) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
  - 11) Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.

b.3.2. Retribusi Jasa Usaha, terdiri dari :

- 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- 2) Retribusi Pasar Grosir;
- 3) Retribusi Terminal;
- 4) Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- 5) Retribusi Penitipan Anak;
- 6) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vulla;
- 7) Retribusi Penyedotan Kakus;
- 8) Retribusi Rumah Potong Hewan;
- 9) Retribusi Tempat Pendaratan Kapal;
- 10) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
- 11) Retribusi Penyeberangan di atas Air;
- 12) Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
- 13) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

b.3.3. Retribusi Perijinan tertentu, terdiri dari :

- 1) Retribusi Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah;
- 2) Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan;
- 3) Retribusi Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- 4) Retribusi Ijin Gangguan;
- 5) Retribusi Ijin Trayek;
- 6) Retribusi Ijin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan.

b.4. Tarif Retribusi Daerah :

b.4.1. Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan :

- 1) Tingkat penggunaan jasa;
- 2) Tarif Retribusi.

b.4.2. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif ditentukan sebagai berikut :

- 1) Untuk Retribusi Jasa Umum, ditetapkan berdasarkan kebijaksanaan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan. Kemampuan masyarakat dan aspek keadilan;
- 2) Untuk Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperluas keuntungan yang layak;
- 3) Untuk Retribusi Perijinan tertentu, didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian ijin yang bersangkutan;
- 4) Jenis-jenis Retribusi Daerah yang termasuk golongan Retribusi jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perijinan tertentu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Dalam Peraturan Pemerintah akan memuat daftar jenis-jenis Retribusi yang dapat dipungut Retribusinya oleh Pemerintah Daerah.

c. Kadaluwarsa Penagihan :

Kadaluwarsa penagihan retribusi tertangguh apabila :

- 1) Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa. Kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut;
- 2) Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.



Peluang penetapan jenis pajak dan retribusi baru selain yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut, memang masih dimungkinkan tetapi harus ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan pemerintah setelah memenuhi kriteria-kriteria yang ditentukan. Dengan ditetapkannya secara limitatif jenis-jenis pajak dan retribusi daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah, maka secara langsung mengakibatkan terjadinya penurunan penerimaan daerah yang relatif besar, karena banyak jenis-jenis pajak dan retribusi daerah yang sebelumnya ada dan cukup potensial di daerah tertentu.

#### **G. Kendala-Kendala Umum Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Dalam Otonomi Daerah**

Mengamati secara umum tentang kendala-kendala mengenai pajak daerah dan retribusi daerah dapat diprediksikan dan diungkapkan melalui pemikiran secara universal :<sup>79</sup>

1. Tentang tarif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah seperti Pasal 3 ayat 1 huruf d sampai dengan huruf i Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dengan tarif sebagai berikut :

a. Pajak Hotel	10 %
b. Pajak Restoran	10 %
c. Pajak Hiburan	35 %
d. Pajak Reklame	25 %
e. Pajak Penerangan Jalan	10 %
f. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C	20 %
g. Pajak Parkir	20 %

---

79. Dalam UU.18 Tahun 1997 yang telah dirubah dengan UU.34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sedangkan tarif retribusi berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 besar tarif tidak ditentukan, tetapi berdasarkan kepada prinsip dan sasaran penetapan tarif.\*

Dari ketentuan diatas terdapat kendala teknis tentang penentuan tarif pajak yang akan dikenakan kepada wajib pajak di daerah karena obyek yang dikenakan pajak daerah mempunyai klasifikasi tertentu misalnya pajak hotel dan restoran. Kedua obyek pajak ini oleh undang-undang tarifnya limitatif dan lebih rancu lagi teknis cara menentukan besar retribusi yang akan dikenakan kepada masyarakat.

2. Tentang tanggung jawab (*accountability*) Pemerintah Daerah dalam mengelola dan memanfaatkan pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), atau dokumen lain yang dipersamakan. Untuk melakukan pembayaran Pajak Daerah menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dan untuk Retribusi Daerah menggunakan Surat Retribusi Daerah (SSRD), pembayaran dilakukan pada kantor Pos atau Bank Persepsi. Jika wajib pajak dan wajib retribusi tidak membayar akan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) dan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).<sup>80</sup>

Kalau diperhatikan ketentuan Undang-Undang di atas pengaturannya belum mencerminkan penerapan asas-asas pemungutan pajak, terutama asas keadilan.

---

\* Prinsip dan sasaran penentuan Tarif :

- Retribusi Jasa Umum
- Ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.
- Retribusi Jasa Usaha
- Ditentukan berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- Retribusi Perizinan Tertentu.
- Ditentukan berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

Dimana masyarakat sebagai wajib pajak, kewajiban diatur secara tegas diatur dalam Undang-Undang tetapi kewajiban fiskus berkenaan dengan *accountability* belum diatur secara tegas pertanggung jawabannya cenderung menggunakan kebijakan kepala daerah. Kondisi ini secara teoritis pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah masih mengarah kepada konsep hukum yang represif, pada hal di era reformasi tuntutan hukum yang responsif semakin meningkat, dimana transparansi jalannya pemerintahan selalu di kontrol oleh masyarakat.

---

80. Erly Suandy, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, 2000, Hal. 143.

### **BAB III**

#### **HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN**

##### **A. Peran Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Otonomi Daerah**

Pemerintah Daerah dalam menjalankan otonomi daerah perlu mendapat dukungan dari berbagai sumber-sumber pembiayaan yang cukup baik terutama yang berasal dari sumber-sumber pendapatan asli daerah, dari pajak daerah dan retribusi daerah. Untuk memperoleh gambaran mengenai seberapa jauh peran pajak daerah dan retribusi daerah dalam otonomi daerah di Kota Tegal dilakukan penelitian mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Total pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang dikaitkan dengan kuantitas dan kualitasnya.
2. Alokasi tentang penggunaan hasil pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
3. Peraturan-peraturan yang membentengi peran pajak daerah dan retribusi daerah.

Langkah selanjutnya untuk menggambarkan hasil penelitian dalam tulisan ini akan dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

##### **A.1. Konsep Teori Dan Analisis Penelitian**

Sebelum menguraikan dan mengungkapkan serta menganalisis data yang diperoleh melalui penelitian, terlebih dahulu diketengahkan hubungan antara konsep teori dan analisis penelitian mengenai permasalahan nomor 1 sebagaimana tampak pada tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1.

**Hubungan Teori Dan Analisis Penelitian  
Mengenai Permasalahan Nomor 1**

<b>Rumusan Permasalahan</b>	<b>Data Penelitian</b>	<b>Persoalan Potensial</b>	<b>Teori Yang digunakan</b>
Seberapa jauh peran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam otonomi daerah di Kota Tegal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Total pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah yg dikaitkan dengan kuantitas dan kualitasnya.</li> <li>2. Alokasi penggunaan hasil pemungutan Pajak dan Retribusi daerah.</li> <li>3. Peraturan yang membentengi peran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</li> </ol>	Peningkatan pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara signifikan tidak diiringi oleh sosialisasi peraturan daerah tentang obyek pajak baru .	Teori Peran Pajak. Rachmat Soemitro (1982; Hal.2). R.Santoso Brotodihardjo (1998; Hal.17)

Sumber data: Data Penelitian diolah

Ternyata dari tabel 1 diatas dapat dijelaskan permasalahan tentang seberapa jauh peran pajak daerah dan retribusi daerah dalam otonomi daerah di Kota Tegal. Ditemukan sesuai dengan data penelitian (1.Total pemungutan pajak dan retribusi daerah yg dikaitkan dengan kuantitas dan kualitasnya. 2. Alokasi penggunaan hasil pemungutan pajak dan retribusi daerah. 3. Peraturan yang membentengi peran pajak daerah dan retribusi daerah.). Bila dianalisis dengan menggunakan teori peran pajak oleh Rochmat Soemitro,1982 tentang fungsi regulierend (mengatur) dari pajak dan R.Santoso Brotodihardjo,1998 tentang iuran kepada negara yang dapat dipaksakan. Diketahui bahwa untuk peningkatan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah secara signifikan tidak diiringi dengan sosialisasi peraturan pajak daerah dan retribusi daerah. Hal ini akan berakibat pertumbuhan pajak daerah dan retribusi daerah setiap tahunnya belum mencapai target.

## A.2. Target Dan Realisai Pendapatan Asli Daerah

Berikut akan dikemukakan target dan realisasi tentang pendapatan asli daerah dan pertumbuhan penduduk selama lima tahun terakhir (Tabel 2 sampai dengan Tabel 6) untuk menjelaskan dan menggambarkan mengenai peningkatan dan penurunan pendapatan asli daerah dan dari tabel-tabel tersebut akan tergambar adanya sumbangan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap jalannya pembangunan yang pada gilirannya kemudian akan terlihat pula besar kecilnya peran pajak daerah dan retribusi daerah terhadap otonomi daerah dari segi pembiayaan otonomi daerah.

**Tabel 2.**

### **Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Tegal Periode 1996/1997 s/d 2000**

<b>Tahun</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>			
	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Selisih</b>	<b>Pertumbuhan</b>
1996/1997	15.590.278.800,00	14.264.537.635,00	91.50	- 8.50 %
1997/1998	17.584.495.900,00	16.317.736.852,00	92.80	- 7.20 %
1998/1999	15.600.894.400,00	14.835.963.852,00	95.10	- 4.90 %
1999/2000	22.332.989.670,00	12.662.511.637,00	56.70	- 43.30 %
2000	18.082.725.000,00	21.420.868.016,00	105.69	+ 5.69 %

Sumber data : Dipenda Kota Tegal, data diolah

Tabel 2 diatas menunjukan tidak terealisasinya target Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 1996 sampai Tahun 1999 dan pada Tahun Anggaran 1999-2000 terdapat penurunan yang sangat drastis yakni minus 43.30 % . Secara teoritis penurunan pendapatan asli daerah itu disebabkan oleh perlawanan pasip di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. Yang dimaksud

perlawanan pasip.<sup>81</sup> tersebut adalah perlawanan dari masyarakat tetapi karena kondisi ekonomi masyarakat akan membayar setelah perekonomian pulih.

### A.3. Target Dan Realisai Pajak Daerah

Pajak daerah memiliki kontribusi yang paling besar diantara keempat komponen pendapatan asli daerah. Perkembangan penerimaan dari pajak daerah selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya, hal ini dapat dilihat dari tabel 3.

Tabel 3.

#### Target Dan Realisasi Pajak Daerah Kota Tegal Periode 1996/1997 s/d 2000

Tahun	Pajak Daerah			
	Target	Realisasi	Selisih	Pertumbuhan
1996/1997	1.290.250.000,00	1.287.776.301,00	99.81 %	- 0.19 %
1997/1998	1.411.597.000,00	1.433.329.535,00	101.54 %	+ 1.54 %
1998/1999	1.414.597.000,00	1.771.686.486,00	125.23 %	+ 25.23 %
1999/2000	1.611.500.000,00	1.501.922.544,00	93.20 %	- 6.80 %
2000	1.550.136.000,00	1.653.995.665,00	104.28 %	+ 4.28 %

Sumber data : Dipenda Kota Tegal, data diolah

Tabel 3 diatas dapat dianalisis bahwa terlihat penurunan penerimaan pajak daerah pada anggaran Tahun 1996/1997, pada Tahun 1999/2000 mengalami penurunan penerimaan lagi. Sedangkan peningkatan penerimaan pada Tahun 1997/1998 dan Tahun 1998/1999 yang memenuhi target dikarenakan pemerintah daerah telah menekan biaya pemungutan pajak dengan penyederhanaan prosedur pemungutan dan efesiensi pemungutan sehingga hasil penerimaan pajak memenuhi target. Dari hasil wawancara peneliti dengan pejabat Dipenda Kota Tegal penerimaan pajak pada Tahun

81. Erly Suandy, Op. Cit, Hal. 16.

2000 mengalami peningkatan disebabkan pemerintah Kota Tegal telah menggali sumber-sumber pendapatan baru.

#### A.4. Target Dan Realisasi Retribusi Daerah

Perkembangan penerimaan dari retribusi daerah selalu mengalami penurunan dari tahun ke tahunnya, hal ini dapat dilihat dari tabel 4.

**Tabel 4.**

#### **Target Dan Realisasi Retribusi Daerah Kota Tegal Periode 1996/1997 s/d 2000**

Tahun	Retribusi Daerah			
	Target	Realisasi	Selisih	Pertumbuhan
1996/1997	4.312.388.000,00	4.175.382.601,00	96.82 %	- 3.18 %
1997/1998	4.814.421.000,00	4.331.254.495,00	89.96 %	- 10.04 %
1998/1999	5.957.512.000,00	4.660.594.441,00	78.23 %	- 21.77 %
1999/2000	5.404.594.000,00	4.381.146.173,00	81.06 %	- 18.94 %
2000	4.867.454.000,00	4.863.800.681,00	99.78 %	- 0.22 %

Sumber data : Dipenda Kota Tegal, data diolah

Dari tabel diatas terlihat bahwa penerimaan retribusi daerah mengalami penurunan lima tahun terakhir, walaupun dalam masing-masing tahun berbeda prosentase penurunannya. Hal ini disebabkan antara lain karena pemungutan retribusi daerah banyak menimbulkan distorsi/penyimpangan dalam bentuk beberapa obyek pajak daerah dan retribusi daerah yang dihilangkan sebagai akibat lahirnya Undang-Undang Nomer 18 Tahun 1997 beserta revisinya yaitu Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diikuti dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomer 10 Tahun 1998 dan Instruksi Gubernur Nomer 188.3/42.A/1998.



#### A.5. Kontribusi Pajak Daerah Dan Realisasi Retribusi Daerah Terhadap P.A.D

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan unsur yang paling besar dalam mendukung pendapatan asli daerah. Hal ini disebabkan pajak daerah dan retribusi daerah merupakan wewenang yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk menarik pungutan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Hasil prosentase kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah dapat diketahui dari tabel 5.

**Tabel 5.**

**Anggaran P.A.D, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  
Dalam Prosentase-periode 1996/1997 s/d 2000**

Tahun	Dalam Persentase %		
	PAD	Pajak Daerah	Retribusi Daerah
1996/1997	- 8.50 %	- 0.19 %	- 3.18 %
1997/1998	- 7.20 %	+ 1.54 %	- 10.04 %
1998/1999	- 4.90 %	+ 25.23 %	- 21.77 %
1999/2000	- 43.30 %	- 6.80 %	- 18.94 %
2000	+ 5.69 %	+ 4.28 %	- 0.22 %

Sumber data : Dipenda Kota Tegal, data diolah

Terlihat peningkatan pemungutan pendapatan asli daerah yang sangat signifikan di Kota Tegal, walaupun pada tahun penerimaan Tahun 1999/2000 terdapat penurunan penerimaan. :

#### A.6. Pertumbuhan Penduduk Kota Tegal

- Jumlah penduduk menurut jenis kelamin.

Jumlah penduduk Kota Tegal berdasarkan jenis kelamin dari Tahun 1995 sampai dengan Tahun 1999 dapat dilihat dalam tabel 6.

Tabel 6.

**Pertumbuhan Penduduk Kota Tegal  
Periode 1996-2000  
(Dalam Jiwa)**

Tahun	Penduduk			Pertumbuhan (%)
	Pria	Wanita	Jumlah	
1995	114.124	118.314	232.438	0,13 %
1996	115.071	119.283	234.352	0,82 %
1997	115.101	119.085	234.186	0,07 %
1998	115.246	119.159	234.405	0,09 %
1999	115.196	119.147	234.343	0,03 %

Sumber data : Badan Pusat Statistik Kota Tegal, data diolah.

Pertambahan pajak daerah dan retribusi daerah tidak saja meningkat melalui dibuatnya aturan-aturan baru tentang cara dan prosedural pajak seperti pemberlakuan tarif dan besarnya retribusi tetapi juga signifikan dengan pertumbuhan penduduk seperti tercantum dalam tabel 6, yang dapat dianalisis dari tahun pertahun, dimana prosentase pertumbuhan penduduk secara otomatis akan menambah wajib pajak.

#### A.7. Keadaan perekonomian

- Pertumbuhan ekonomi dapat dinilai dari kontribusi sektor-sektor Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dominan. Dari hasil penelitian di Kota Tegal diperoleh data sekunder melalui penelusuran dokumen terdapat sektor-sektor yang telah diprosentasekan, antara lain :
  - Sektor Perdagangan 22.41%
  - Sektor Industri 20.41%
  - Sektor Transportasi dan Komunikasi 14.22%
  - Sektor Jasa 13.55%
  - Sektor Bank dan Keuangan 9.78%

Sumber data: Pemda Kota Tegal

PDRB adalah merupakan jumlah nilai tambah yang timbul dari semua unit produksi didalam suatu wilayah tertentu dalam jangka waktu tertentu, PDRB tiap tahun menggambarkan kemampuan daerah dalam mengelola sumber-sumber alam yang dimiliki menjadi suatu proses produksi.

#### **A.8. Memperbesar peranan Pendapatan Asli Daerah**

##### **A.8.1. Kebijakan anggaran pendapatan yaitu :**

- a. Intensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah;
- b. Penetapan target pendapatan lebih realistis;
- c. Pemberdayaan kemampuan BUMD;
- d. Perencanaan penerimaan dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah diusulkan se-realistis mungkin;

Sumber data : hasil wawancara peneliti dengan pejabat Pemda Tegal

##### **A.8.2. Membuka peluang investasi**

Upaya untuk mengembangkan investasi dimaksudkan untuk menumbuhkan sinergi positif dalam menggali pendapatan daerah menjadi sarana meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui :

- a. Inventarisasi peluang investasi;
- b. Mengundang para pemilik modal untuk berinvestasi di Kota Tegal;
- c. Pemberian kemudahan perijinan.

A.8.3. Dari hasil wawancara peneliti dengan pemerintah kota Tegal, dapat disimpulkan hasil wawancara tersebut dalam bentuk kesiapan pemerintah Kota Tegal memberlakukan otonomi daerah yang dapat diantisipasi sebagai berikut :

- a. Menentukan kewenangan daerah;
- b. Membentuk kelembagaan;

- c. Menerima pelimpahan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi;
- d. Menginventarisasi potensi daerah dalam bentuk potensi sumber daya alam dan potensi sumber daya manusia, dari hasil penelitian didapat :
  - 1. Sumber daya alam berupa;
    - a) Perikanan dan kelautan berupa adanya pelabuhan niaga dan sedang dibangunnya pusat pelelangan ikan (PPI).
    - b) Letak geografis kota Tegal yang cukup strategis yaitu berada pada jalur simpang tiga antara Jakarta, Semarang dan Cilacap sangat memungkinkan berkembangnya sektor jasa dan perdagangan.
  - 2. Sumber daya manusia berupa;
    - a) Jumlah penduduk sebanyak 234.343 jiwa
    - b) Angkatan kerja (usia 15 s/d 50 tahun) 96.254 jiwa
    - c) Angkatan kematian kasar (CDR) 7.92/100 jiwa
    - d) Mata pencarian penduduk usia 10 tahun keatas :
      - (1) Industri 16.557 jiwa (13,48 %)
      - (2) Pedagang 16.539 jiwa (13,45 %)
      - (3) Bangunan 15.702 jiwa (12,77 %)
      - (4) Nelayan 10.113 jiwa (8,22%)
- e. Menyusun program tahunan daerah;
- f. Kesiapan perangkat, prasarana dan aparat hukum untuk melaksanakan isi dan substansi hukum yang ada utama untuk menjalankan peraturan daerah.

g. Langkah-langkah mengoptimalkan pendapatan daerah dengan upaya sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan fasilitas publik;
2. Pemberdayaan ekonomi masyarakat;
3. Intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi pendapatan daerah;
4. Meningkatkan penerimaan daerah terutama dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah antara lain :
  - a) Melaksanakan penyesuaian tarif terhadap peraturan daerah yang memang saatnya dilakukan perubahan karena sudah tidak sesuai dengan kondisi yang ada baik dari sisi pendapatan maupun dari sisi kemampuan wajib pajak / wajib retribusi serta sarana yang dapat diberikan oleh pemerintah daerah;
  - b) Melaksanakan intensifikasi pemungutan, penyederhanaan prosedur pemungutan dan efisiensi pemungutan;
  - c) Menggali sumber-sumber pendapatan baru (lihat juga lampiran 1 tentang realisasi pendapatan daerah dari Tahun 1996-2000).

Peningkatan pembangunan di Kota Tegal merupakan realisasi dari pengalokasian dana yang berasal dari pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Bentuk dari pengalokasian tersebut tidak dicantumkan secara rinci di dalam manajemen anggaran Kota Tegal, sesuai dengan hasil wawacara peneliti dengan kepala Dipenda Kota Tegal yang menyatakan pengalokasian dana untuk pembangunan melalui anggaran yang ditetapkan, untuk penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tidak dilakukan pengalokasian

untuk pembangunan tetapi sesuai dengan kebutuhan yang tidak diprosentasekan serta ditotalkan jumlahnya, karena seluruh anggaran pembangunan dimaksukan dalam anggaran pembangunan daerah yang direkrut pendanaannya melalui pendapatan asli daerah ditambah dengan anggaran pembangunan bantuan pusat.

#### **A.9. Peraturan-peraturan yang membentengi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**

Dasar hukum pelaksanaannya adalah Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan-peraturan yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah dapat diungkapkan dari peraturan pusat sampai daerah yang antara lain :

##### **A.9.1. Dasar hukum Pajak Daerah yang berlaku sekarang :**

- a. Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 20000 Tentang Pajak Daerah dan Retibusi Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah ;
- c. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- d. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
- e. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- f. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 172 Tahun 1997 tentang Kriteria Wajib Pajak yang Menyelenggarakan Pembukuan dan Tata Cara Pembukuan;
- g. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
- h. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 10 Tahun 1998 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Tingkat I dan Tingkat II tetang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

A.9.2. Dasar hukum Retribusi Daerah yang berlaku sekarang :

- a. Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah;
- d. Keputusan Meteri Dalam Negeri No. 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- e. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 172 Tahun 1997 tentang Kriteria Wajib Pajak yang Menyelenggarakan Pembukuan dan Tata Cara Pembukuan;
- f. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 174 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
- g. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
- h. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 10 Tahun 1998 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Tingkat I dan Tingkat II tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, beserta peraturan pelaksanaanya, maka jenis-jenis pajak dan retribusi daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah sudah ditentukan secara limitatif. Jenis-jenis pajak dan retribusi daerah tersebut adalah :

Jenis Pajak Daerah Tingkat I terdiri dari :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

Jenis Pajak Daerah tingkat II terdiri dari :

- a. Pajak Hotel dan Restoran;
- b. Pajak Hiburan;
- c. Pajak Reklame;
- d. Pajak Penerangan Jalan;
- e. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C;
- f. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Sedangkan untuk retribusi daerah baru bisa dilakukan pemungutannya apabila ada pelayanan atau jasa nyata yang diterima oleh wajib retribusi dari pemerintah daerah. Retribusi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah dibagi atas tiga golongan retribusi, yaitu :

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha;
- c. Retribusi Perijinan Tertentu.

Sebelum diberlakukannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang termasuk jenis-jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Tegal :

Jenis-jenis Pajak Daerah Kota Tegal :

- a. Pajak Potong Hewan;
- b. Pajak Pembangunan I;
- c. Pajak Radio;
- d. Pajak Bangsa Asing;
- e. Pajak Tontonan dan Keramaian;
- f. Pajak Reklame;
- g. Pajak Anjing;
- h. Pajak Penjualan Minuman Keras;
- i. Pajak Kendaraan Tak Bermotor;
- j. Pajak Penguburan dan Perabuan Jenasah;
- k. Pajak Penerangan Jalan;
- l. Pajak Rumah Bola;
- m. Pajak Pendaftaran Perusahaan;
- n. Pajak Perusahaan;
- o. Pajak Kendaraan di Atas Air;
- p. Mengadakan Pajak Kendaraan;
- q. Pajak Sarang Burung Walet.

Jenis-jenis Retribusi Daerah Kota Tegal :

- a. Uang Leges;
- b. Uang Dispensasi Jalan/Jembatan;
- c. Uang Pangkalan/Parkir;
- d. Pemotongan Hewan;
- e. Uang Sempadan/ Ijin Bangunan;
- f. Uang Atas Pemakaian Tanah;
- g. Uang Penguburan;
- h. Terminal Bus;



- i. Rumah Sakit Umum Kardinah;
- j. Tempat Rekreasi Pantai;
- k. Pasar;
- l. Pemeriksaan Susu;
- m. Puskesmas;
- n. Retribusi Sampah;
- o. Pemeriksaan Ternak;
- p. Ijin H.O;
- q. Ijin Perusahaan Angkutan;
- r. Pendaftaran Penduduk/KK/KTP;
- s. Rekomendasi/Ijin Tempat Usaha;
- t. Ijin Penimbunan Minyak;
- u. Ijin Tanam Bawang Merah;
- v. Pemotongan dan Daging Unggas.

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang termasuk jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Tegal :

Jenis-jenis Pajak Daerah Kota Tegal :

- a. Pajak Hotel dan Restoran;
- b. Pajak Hiburan;
- c. Pajak Reklame;
- d. Pajak Penerangan jalan;
- e. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Jenis-jenis Retribusi Daerah Kota Tegal :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Pelayanan Sampah/Kebersihan;
- c. Biaya KTP/Catatan Sipil;
- d. Pelayanan Pemakaman dan Perabuan;
- e. Parkir Jalan Umum;
- f. Pasar;
- g. Pemakaian Kekayaan Daerah;
- h. Terminal Bus;
- i. Rumah Potong Hewan;
- j. Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
- k. Ijin Mendirikan Bangunan/IMB;
- l. Ijin Gangguan.

Sedangkan dasar hukum pelaksanaannya lebih lanjut dari pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan di Kota Tegal adalah dengan menetapkan berbagai Peraturan Daerah yang sesuai dengan isi dan jiwa Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 50 Tahun 1981 Tentang Pemakaian Lapanga Olah Raga Yos Sudarso;
2. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 11 Tahun 1993 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 33 Tahun 1978 Tentang Retribusi Atas Pemakaian Mesin Gilas;
3. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 10 Tahun 1987 Tentang Pemakaian Tanah;
4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Retribusi Terminal;
5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Pajak Penerangan Jalan;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Pajak Hotel Dan Restoran;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah Dan Air Permukaan;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Pajak Reklame;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 7 Tahun 1998 Tentang Pajak Hiburan;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Retribusi Izin Gangguan;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 2000 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Tempat Olah Raga;
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Retribusi Pasar.

Untuk menganalisis peraturan-peraturan diatas, dilakukan dengan tiga elemen yaitu :

- a. Pembeneran (*Warrant*). Pembeneran merupakan suatu asumsi didalam argumen kebijakan yang memungkinkan analisis untuk berpindah dari informasi yang relevan dengan kebijakan ke klaim kebijakan. Pembeneran dapat mengandung berbagai macam asumsi otoritatif, analisenris, kausal, pragmatis, dan kritik nilai, peranan dari pembeneran adalah untuk membawa informasi yang relevan dengan kebijakan kepada klaim kebijakan tentang terjadinya ketidaksepakatan atau konflik, dengan demikian memberi suatu alasan untuk menerima klaim
- b. Dukungan (*Backing*). Dukungan bagi pembeneran terdiri dari asumsi-asumsi tambahan atau argumen-argumen yang dapat digunakan untuk mendukung pembeneran yang tidak diterima pada nilai yang tampak Dukungan terhadap pembeneran dapat mengambil berbagai macam bentuk, yaitu hukum-hukum ilmiah, pertimbangan para pemegang otoritas keahlian, atau prinsip-prinsip moral dan etis. Dukungan terhadap pembeneran memungkinkan analisis bergerak ke belakang dan menyatakan asumsi-asumsi yang menyertainya.
- c. Bantahan (*Rebuttal*). Bantahan merupakan kesimpulan yang kedua, asumsi, atau argumen yang menyatakan kondisi dimana klaim asli tidak diterima, atau klaim asli hanya dapat diterima pada derajat penerimaan tertentu. Secara keseluruhan klaim kebijakan dan bantahan mementuk subnasi isu-isu kebijakan, yaitu kebijakan, yaitu ketidak sepakatan di antara segmen-segmen yang berbeda dalam masyarakat terhadap serangkaian alternatif tindakan pemerintah.

Pertimbangan terhadap bantahan-bantahan membantu analisis mengantisipasi tujuan-tujuan dan menyediakan perangkat sistimatis untuk mengkritik salah satu klaim ,asumsi, dan argumennya.<sup>82</sup>

Menganalisis peraturan-peraturan yang telah dibuat untuk meregulasikan pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan pandangan kebijakan publik melalui peraturan-peraturan yang ada, tiga konsep di atas merupakan suatu cara yang paling efektif, pembenaran sebagai kekuatan untuk berperannya suatu perundang-undangan dengan mengkaji ulang dan mengamati substansial undang-undang, secara keilmuan tidak bertentangan dengan rasa keadilan dan ketertiban umum serta susila maka suatu peraturan itu dapat dibenarkan.

Demikian juga dukungan yang diberikan kepada suatu peraturan untuk menjamin berlakunya suatu peraturan dapat diterima oleh masyarakat, sementara itu bantahan akan diungkapkan melalui pengamatan dan penelitian terhadap kinerja perundang-undangan serta permasalahan yang timbul di masyarakat setelah suatu perundangan tersebut diberlakukan.

## **B. Konsistensi Peraturan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Otonomi Daerah Di Kota Tegal**

Dalam sistem perpajakan dikenal ada tiga unsur pokok,yaitu:<sup>83</sup>

1. Kebijaksanaan perpajakan (tax policy);
2. Undang-undang perpajakan (tax laws);
3. Administrasi perpajakan (tax administration).

---

82. William N.Dunn, Loc. Cit., hal. 104.

83. Mansury, *Paduan Konsep Utama Pajak Penghasilan Indonesia*,Bina Rena Pariwara, Jakarta,1994,hal.37.

Ketiga unsur tersebut saling kait mengkait dan terjadi menurut proses sesuai dengan urutan, sebagai sebuah kebijaksanaan pemerintah. Sebagai kebijaksanaan pemerintah maka sistem perpajakan merupakan sesuatu yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan, yang ditetapkan secara jelas dalam peraturan-peraturan perundang-undangan dan bagaimana tindakan-tindakan tersebut akan dilakukan<sup>84</sup>. Kebijaksanaan perpajakan merupakan sesuatu yang akan dituju, sedangkan undang-undang perpajakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan tersebut, dan administrasi perpajakan merupakan sarana mengimplementasikan kebijaksanaan perpajakan dalam bentuk undang-undang.

Kebijaksanaan perpajakan merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan. Alternatif-alternatif tersebut meliputi :

1. Pajak yang akan dipungut ?
2. Siapa yang akan dijadikan subyek ?
3. Apa saja yang merupakan obyek pajak ?
4. Berapa besar tarif pajak ?
5. Bagaimana prosedurnya ?

Kebijaksanaan perpajakan tersebut selanjutnya akan ditetapkan dalam bentuk undang-undang, yang akan dikelompokkan dalam hukum (UU) pajak Materiil yang mengatur tentang norma-norma yang menerangkan keadaan, perbuatan dan peristiwa-peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, yang meliputi : siapa yang menjadi subyek pajak, apa yang menjadi obyek pajak dan berapa besar tarif pajaknya. Dengan kata lain hukum pajak materiil memuat segala sesuatu tentang timbulnya, besar dan hapusnya hutang pajak dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak.

---

84. Thomas R Dye, *Understanding public Policy*, Englowood Cliff,NJ.7632Prentice Hall,Inc,3rded,1978,Hal.3 dan Chief J.O Udoji,dalam Solichin Abdoul Wahab,Opcit.Hal.5

Kelompok kedua dikenal dengan hukum (UU) formil, yang mengatur tentang tata cara menjelmakan hukum materiil menjadi kenyataan. Hukum formil memuat tentang tata cara penyelenggaraan penetapan suatu hutang pajak, pengawasan pemerintah terhadap penyelenggaraannya, kewajiban para wajib pajak, kewajiban pihak ketiga dan prosedurnya. Prosedur pelaksanaan, meliputi administrasi pajak atau instansi pajak, tata cara pemungutan yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban wajib pajak serta birokrat (aparatur) pajak. Maksud dari hukum formil disini adalah untuk melindungi, baik aparat pajak maupun wajib pajak.

Pembagian hukum (UU) pajak dalam hukum pajak materiil dan hukum formil di Indonesia baru terjadi sejak 1984, yaitu setelah terjadinya *tax reform* (reformasi pajak) pertama. Sebelum antara hukum pajak materiil dan hukum pajak formil dimuat dalam setiap undang-undang perpajakan. Setelah reformasi perpajakan yang pertama (1984) hukum pajak materiil dan hukum pajak formil diatur dalam undang-undang yang berbeda.

Berdasarkan pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, segala pajak untuk kegunaan kas negara berdasarkan undang-undang. Dengan demikian tidak mungkin negara memungut pajak dari rakyat, tanpa ada undang-undangnya. Hal ini mengandung maksud pajak yang dipungut dari rakyat untuk membiayai pengeluaran negara (kepentingan umum) tanpa adanya imbalan secara langsung yang dapat ditunjuk, harus berdasarkan pada ketentuan yang dibentuk melalui proses demokrasi yang dilakukan oleh perwakilan rakyat (DPR) sebagai perwujudan rakyat Indonesia agar diperoleh keadilan. Karena pajak itu menyayat daging sendiri, dimana terjadi peralihan kekayaan tetapi tanpa imbalan,

peralihan kekayaan tanpa imbalan hanya dapat berupa perampokan, pencurian, perampasan atau dapat juga merupakan pemberian secara suka rela. Padahal pajak tidak bermaksud demikian, sehingga setiap pajak harus mendapat persetujuan rakyat melalui DPR. Apabila telah berbentuk undang-undang berarti telah mendapat persetujuan dari rakyat, karena DPR merupakan pencerminan rakyat yang dipilih secara langsung melalui pemilihan umum. Sehingga sekalipun pajak dipungut tanpa memberikan imbalan secara langsung, namun tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum.

Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 selanjutnya dipahami juga sebagai falsafah pajak, yang falsafah tersebut juga merupakan falsafah-falsafah negara Amerika dan Inggris. Sehingga falsafah pajak kebetulan juga digunakan oleh negara-negara maju seperti Amerika dan Inggris.

Sampai tahun 1983 kebijaksanaan perpajakan masih diatur oleh undang-undang pajak yang dibuat di zaman kolonial, yang mempunyai landasan, pemikiran, jiwa, sasaran dan tujuan yang tidak sesuai dengan harkat, hakekat dan jiwa bangsa Indonesia.<sup>85</sup>

Hal yang utama dalam ketentuan tersebut adalah perlunya diadakan penyempurnaan terhadap sistem perpajakan, dan segala pajak harus didasarkan atas perundang-undangan. Untuk melaksanakan amanat tersebut, pemerintah melalui pidato kenegaraan Presiden Soeharto di depan sidang Pleno DPR-RI tanggal 16 Agustus 1983 menyampaikan rumusan sasaran-sasaran yang hendak dicapai dalam penyempurnaan sistem perpajakan nasional, sebagaimana dapat disimpulkan sebagai berikut:

---

85. Soemitro, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, Bandung, 1987, Hal. 13-15.

1. Penerimaan negara dari sektor perpajakan menjadi bagian dari penerimaan yang mandiri dalam rangka pembiayaan pembangunan nasional
2. Pemerataan dalam pengenaan pajak dan keadilan dalam pembebanan pajak.
3. Menjamin adanya kepastian.
4. Sederhana.
5. Menutup peluang penghindaran pajak dan atau penyelundupan pajak oleh wajib pajak dan penyalahgunaan wewenang oleh petugas pajak.
6. Memberikan dampak yang positif dalam bidang ekonomi.

Kebijaksanaan pembaharuan sistem perpajakan nasional mempunyai tujuan utama mencapai pertumbuhan penerimaan yang sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, yang harus ditunjang oleh empat tujuan pendukung, yaitu penyederhanaan, pemerataan, beban pajak, kepastian hukum dan menutup peluang.<sup>86</sup>

Penyederhanaan struktur pajak yang menjadi sasaran utama dari reformasi pajak 1984 dan penurunan tarif ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sedangkan pemerataan beban pajak dicapai melalui dua sarana, yaitu pemajakan dengan pajak yang luas (*broad-based taxation*) dan tarif pajak yang progresif. Pemajakan dengan obyek pajak yang luas dimaksudkan agar setiap tambahan kemampuan ekonomis, tanpa memperhatikan dari mana sumber penghasilan itu didapat, asalkan dapat dipakai untuk membeli barang dan jasa guna memenuhi keperluan wajib pajak dan keluarganya, harus dikenakan pajak.<sup>87</sup> Pemajakan yang demikian, keadilan yang dituju adalah keadilan horisontal.

---

86. Mansury, Opcit, Hal.164.

87. Ibid.



Sebelum menguraikan dan mengungkapkan serta menganalisis data yang diperoleh melalui penelitian, terlebih dahulu diketengahkan hubungan antara konsep teori dan analisis penelitian mengenai permasalahan nomor 2 sebagaimana tampak pada tabel 7 dibawah ini.

**Tabel 7.**

**Hubungan Teori Dan Analisis Penelitian Mengenai Permasalahan Nomor 2**

<b>Rumusan Permasalahan</b>	<b>Data Penelitian</b>	<b>Persoalan Potensial</b>	<b>Teori Yang digunakan</b>
Bagaimana konsistensi peraturan di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Otonomi Daerah di Kota Tegal.	Mengamati sinkronisasi peraturan perundang-undangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara vertikal dan horisontal	Konsistensi peraturan Pajak dalam pelaksanaannya belum membuktikan dan mencerminkan tentang keinginan masyarakat sedangkan keputusan yang diambil masih sepihak (pemerintah) untuk memenuhi target PAD.	Teori Hukum Modern oleh Marc Galanter, dalam Satjipto Rahardjo, 1980, Hal 158.

Sumber : Data Penelitian diolah

Dari tabel 7 diatas dapat dijelaskan permasalahan tentang seberapa jauh konsistensi peraturan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah terhadap otonomi daerah di Kota Tegal. Ditemukan sesuai dengan data penelitian mengenai sinkronisasi peraturan perundang-undangan pajak daerah dan retribusi daerah secara vertikal dan horisontal Bila dianalisis dengan menggunakan teori hukum modern tentang ciri-ciri hukum modern oleh Marc Galenter dalam Satjipto Rahardjo,1980: Diketahui bahwa terdapat persoalan potensial mengenai konsistensi peraturan pajak daerah dan retribusi daerah dalam pelaksanaannya belum membuktikan dan mencerminkan tentang keinginan masyarakat, sedangkan keputusan yang diambil masih sepihak (pemerintah) untuk memenuhi target Pendapatan Asli Daerah.

Sehubungan dengan konsistensi peraturan daerah, peneliti mengamati melalui hubungan vertikal yang diartikan kebersesuaian peraturan-peraturan daerah dengan peraturan yang di atasnya. Jika diamati lebih lanjut dapat diungkapkan secara hirarkis tentang peraturan-peraturan, antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai pedoman bagi peraturan-peraturan dibawahnya yang pada prinsipnya kebersesuaian merupakan faktor utama untuk menjamin agar peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan dibawahnya tidak bertentangan dengan pokok-poko pikiran yang pada undang-undang ini.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Retribusi Daerah, sebagai tindak lanjut dari penjabaran ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang memberikan rekomendasi didalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 Tentang:

1. Ketentuan Umum;
2. Pajak Kendaraan Bermotor;
3. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
4. Pajak Hotel dan Restoran;
5. Pajak Hiburan;
6. Pajak Reklame;
7. Pajak Penerangan Jalan;
8. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C;
9. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan;
10. Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Yang Kedaluarsa dan Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak;
11. Peraturan Daerah Tentang Pajak;
12. Ketentuan Peralihan;
13. Ketentuan Penutup.

Dan merekomendasikan pada Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 ..

Tentang :

1. Ketentuan Umum;
2. Retribusi Jasa Umum;
3. Retribusi Jasa Usaha;
4. Retribusi Perizinan Tertentu;
5. Penghitungan Dan Pelaksanaan Pemungutan Retribusi;
6. Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kadaluarsa;
7. Peraturan Daerah Tentang Retribusi;
8. Ketentuan Peralihan;
9. Ketentuan Penutup.

Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 sebagai konsekuensi dari era reformasi yang menuntut adanya otonomi daerah. Peraturan-peraturan pemerintah ini merupakan kebijaksanaan negara yang dapat dianalisa dengan konsep kebijaksanaan negara. *Pertama* kebijaksanaan negara merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan. Kebijaksanaan dalam sistem politik modern pada umumnya bukanlah merupakan tindakan yang serba kebetulan. *Kedua* Kebijaksanaan pada hakikatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri. *Ketiga* kebijaksanaan bersangkutan paut dengan apa yang senyatanya yang dilakukan pemerintah dalam bidang-bidang tertentu. *Keempat* kebijaksanaan negara mungkin akan mencakup beberapa bentuk tindakan pemerintah yang dimaksud untuk mempengaruhi masalah tertentu.<sup>88</sup> Dengan demikian terlihat bahwasannya Peraturan Pemerintah tersebut diberlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi daerah.

---

88. Solichin Abdul Wahab, Opcit, hal.6.

Peraturan tersebut diberikan arahan dan petunjuk dengan melalui keputusan Menteri sebagai arahan implementasi. Dalam hal ini mengenai penelitian peraturan perundang-undangan didapatkan beberapa kesesuaian dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Dibidang Pajak Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 Tentang Ruang Lingkup Dan Jenis-Jenis Retribusi Daerah Tingkat I Dan Daerah Tingkat II dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 Tentang Komponen Penetapan Tarip Retribusi yang berisikan antan lain :

1. Pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Dibidang Pajak Daerah :

- a. Ketentuan Umum;
- b. Tujuan Pemeriksaan;
- c. Bentuk Pemeriksaan;
- d. Norma Pemeriksaan;
- e. Pedoman pemeriksaan;
- f. Tata Cara Pemeriksaan;
- g. Ketentuan Penutup.

Ketentuan ini secara umum mengungkapkan bahwa Keputusan Menteri Tentang Tata Cara Pemeriksaan Di bidang Pajak Daerah bertujuan untuk mengatur dan menjadi pedoman pelaksanaan bagi setiap daerah dalam pemungutan Pajak Daerah merujuk pada Keputusan Menteri tersebut.

2. Pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 Tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah :

- a. Ketentuan Umum;
- b. Tata Cara Pendaftaran Dan Pendataan;
- c. Tata Cara Penetapan Retribusi;
- d. Tata Cara Pembayaran;
- e. Tata Cara Pembukuan dan Pelaporan;

- f. Tata Cara Penagihan Retribusi;
- g. Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi;
- h. Tata Cara Pembetulan, Pengurangan Ketetapan, Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi Dan Pembatalan;
- i. Tata Cara Penyelesaian Keberatan;
- j. Tata Cara Perhitungan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi;
- k. Ketentuan Lain-lain;
- l. Ketentuan Penutup.

Ketentuan ini secara umum mengungkapkan bahwa Keputusan Menteri Tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah bertujuan untuk mengatur dan menjadi pedoman pelaksanaan bagi setiap daerah dalam pemungutan Retribusi Daerah merujuk pada Keputusan Menteri tersebut.

3. Pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 Tentang Tentang Ruang Lingkup Dan Jenis-Jenis Retribusi Daerah Tingkat I Dan Daerah Tingkat II :

- a. Ketentuan Umum;
- b. Golongan Dan Jenis-Jenis Retribusi;
- c. Jenis-Jenis Retribusi Daerah;
- d. Ruang Lingkup Retribusi;
- e. Ketentuan Lain-Lain;
- f. Ketentuan Penutup.

Dengan maksud supaya tidak terjadi tumpang tindih antara Retribusi Daerah Tingkat I dengan Tingkat II sehingga Menteri Dalam Negeri beranggapan perlu dikeluarkan keputusan tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat II.

4. Pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 Tentang Komponen Penetapan Tarip Retribusi :

- a. Ketentuan Umum;
- b. Komponen Tarip Retribusi Jasa Umum;
- c. Komponen Tarip Retribusi Jasa Usaha;
- d. Komponen Tarip Retribusi Perizinan Tertentu;
- e. Pembinaan;
- f. Ketentuan Penutup.

Penetapan komponen penetapan tarif berdasarkan kebijakan, argumentasi kebijakan tidak berhenti pada penggunaan berbagai metode pengkajian untuk menghasilkan dan mentransformasikan informasi yang melihat dan mengindikasikan berdasarkan kemampuan masing-masing retribusi. Setiap usaha untuk merekomendasikan serangkaian tindakan untuk sebagian tergantung pada bagaimana kita mampu untuk menjelaskan masalah-masalah kebijakan. Untuk merekomendasikan solusi terhadap masalah komponen. Misalnya, untuk sebagian tergantung pada kemampuan kita mendefinisikan faktor-faktor yang dianggap sebagai kemampuan dari komponen tersebut.

Selanjutnya untuk melaksanakan perundang-undangan, peraturan pemerintah dan keputusan menteri pada setiap daerah dibentuk peraturan-peraturan daerah yang berkenaan dengan ketentuan diatas, sebagai aplikasi dan pedoman serta pegangan bagi setiap daerah untuk melaksanakan kebijakan dan operasional administratif, tak terkecuali pemerintah Kota Tegal. Pemerintah Kota Tegal menerbitkan dan memberlakukan tentang peraturan daerah mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. Dibawah ini diuraikan yang secara otomatis dianggap sebagai kebersesuaian peraturan-peraturan daerah tersebut antara lain :

- a. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Pajak Penerangan Jalan, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Pajak Hotel Dan Restoran, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pajak Hiburan, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Pajak Reklame, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 7 Tahun 1998 Tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, yang mengatur antara lain tentang :

- a.1. Ketentuan Umum;
  - a.2. Nama,Obyek dan Subyek Pajak;
  - a.3. Dasar Pengenaan dan Tarip Pajak;
  - a.4. Wilayah Pemungutan dan Tata Cara Penghitungan Pajak;
  - a.5. Masa Pajak, Saat Pajak Terutang dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah;
  - a.6. Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Pajak;
  - a.7. Tata Cara Pembayaran;
  - a.8. Tata Cara Penagihan Pajak;
  - a.9. Pengurangan Keringanan dan Pembebasan Pajak;
  - a.10. Tata Cara Pembetulan,Pembatalan,Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi;
  - a.11. Keberatan Banding;
  - a.12. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak;
  - a.13. Kadaluausa;
  - a.14. Ketentuan Pidana;
  - a.15. Penyidikan;
  - a.16. Ketentuan Penutup.
- b. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal, Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi Organisasi Dinas-Dinas Kota Tegal, Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Kota Tegal, Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Tegal.
- b.1. Ketentuan Umum;
  - b.2. Pembentukan;
  - b.3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi;
  - b.4. Organisasi;
  - b.5. Ketentuan Lain-Lain;
  - b.6. Ketentuan Penutup.

Peraturan daerah ini dapat diberikan analisis bahwa kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah Kota Tegal merupakan kebijakan yang berorientasi kepada sistem ekonomi, dimana diketahui untuk terwujudnya setiap penyusunan kebijaksanaan dikaitkan langsung dengan butir-butir ekonomi,

jadi penyusunan peraturan daerah ini merupakan penyusunan perencanaan pembangunan sekaligus merupakan pembangunan sistemnya melalui butir-butir dalam peraturan pemerintah daerah tersebut.

Dari kerangka analisis di atas bisa dipahami setidaknya ada dua dataran yang dapat dikembangkan, pertama, motif dan sikap pengambil kebijakan yang melatarbelakangi keinginan untuk lebih memprioritaskan kepada pemungutan pajak daerah dalam rangka otonomi daerah, jenis dan model pemungutan yang ditempuh oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

- c. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum yang memuat antara lain;
  - c.1. Ketentuan Umum;
  - c.2. Nama,Obyek dan Subyek Retribusi;
  - c.3. Golongan Retribusi;
  - c.4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
  - c.5. Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif;
  - c.6. Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi;
  - c.7. Wilayah Pemungutan;
  - c.8. Masa Saat Retibusi Terutang;
  - c.9. Penetapan Retribusi;
  - c.10. Tata Cara Pemungutan;
  - c.11. Tata Cara pembayaran;
  - c.12. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi;
  - c.13. Ketentuan Penyidikan;
  - c.14. Ketentuan Pidana;
  - c.15. Ketentuan Penutup.
- d. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Retribusi Izin Gangguan yang memuat antara lain :
  - d.1. Ketentuan Umum;
  - d.2. Nama,Obyek dan Subyek Retribusi;
  - d.3. Golongan Retribusi;
  - d.4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
  - d.5. Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif;



- d.6. Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi;
  - d.7. Cara Menghitung Retribusi;
  - d.8. Ketentuan Perizinan;
  - d.9. Masa Berlaku dan Pengajuan Herregristasi Izin Ganguan;
  - d.10. Wilayah Pemungutan;
  - d.11. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang;
  - d.12. Surat Pendaftaran;
  - d.13. Penetapan Retribusi;
  - d.14. Tata Cara Pemungutan;
  - d.15. Sanksi Administrasi;
  - d.16. Tata Cara Pembayaran;
  - d.17. Tata Cara Penagihan;
  - d.18. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi;
  - d.19. Kadaluarsa Penagihan;
  - d.20. Ketentuan Pidana;
  - d.21. Penyidikan;
  - d.22. Ketentuan Penutup.
- e. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 2000 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil yang memuat antara lain :
- e.1. Ketentuan Umum;
  - e.2. Nama,Obyek dan Subyek Retribusi;
  - e.3. Golongan Retribusi;
  - e.4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
  - e.5. Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif;
  - e.6. Struktur Dan Besarnya Tarif;
  - e.7. Wilayah Pemungutan;
  - e.8. Tata Cara Pendaftaran;
  - e.9. Tata Cara Penetapan Retribusi;
  - e.10. Tata Cara Pemungutan;
  - e.11. Pengurangan dan Keringanan Retribusi;
  - e.12. Ketentuan Pidana;
  - e.13. Penyidikan;
  - e.14. Ketentuan Penutup.
- f. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Tempat Olah Raga yang memuat antara lain :
- f.1. Ketentuan Umum;
  - f.2. Nama,Obyek dan Subyek Retribusi;

- f.3. Golongan Retribusi;
- f.4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
- f.5. Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif;
- f.6. Struktur Dan Besarnya Tarif;
- f.7. Wilayah Pemungutan;
- f.8. Saat Retibusi Terutang;
- f.9. Tata Cara Pemungutan, Pembayaran dan Penyetoran Retribusi;
- f.10. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi;
- f.11. Pelaksanaan dan Pengawasan;
- f.12. Ketentuan Pidana;
- f.13. Ketentuan Penyidikan;
- f.14. Ketentuan Penutup.

g. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 9 Tahun

2000 Tentang Retribusi Pasar yang memuat antara lain :

- g.1. Ketentuan Umum;
- g.2. Nama,Obyek dan Subyek Retribusi;
- g.3. Golongan Retribusi;
- g.4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
- g.5. Ketentuan Tata Tertib Pasar;
- g.6. Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif;
- g.7. Struktur Dan Besarnya Tarif;
- g.8. Wilayah Pemungutan;
- g.9. Masa Retribusi dan Saat Retibusi Terutang;
- g.10. Surat Pendaftaran;
- g.11. Penetapan Retribusi;
- g.12. Tata Cara Pemungutan;
- g.13. Tata Cara Pembayaran;
- g.14. Sanksi Administrasi;
- g.15. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi;
- g.16. Kadaluarsa Penagihan;
- g.17. Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kadaluarsa;
- g.18. Ketentuan Penyidikan;
- g.19. Ketentuan Pidana;
- g.20. Ketentuan Penutup.

h. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 10 Tahun

1998 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan yang memuat antara lain :

- h.1. Ketentuan Umum;
- h.2. Rumah Potong Hewan dan Kegitannya;
- h.3. Nama,Obyek dan Subyek Retribusi;
- h.4. Golongan Retribusi;
- h.5. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;

- h.6. Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif;
- h.7. Struktur Dan Besarnya Tarif;
- h.8. Ketentuan Pemeriksaan;
- h.9. Saat Retribusi Terutang;
- h.10. Tata Cara Pemungutan dan wilayah Pemungutan Retribusi;
- h.11. Tata Cara Pembayaran Retribusi;
- h.12. Sanksi Administrasi;
- h.13. Tata Cara Penagihan Retribusi;
- h.14. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi;
- h.15. Kadaluarsa;
- h.16. Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi yang Kadaluarsa;
- h.17. Pelaksanaan dan Pengawasan;
- h.18. Ketentuan Pidana;
- h.19. Penyidikan;
- h.20. Ketentuan Penutup.

Penganalisisan tentang retribusi dapat dilakukan melalui telaah konsep dan peraturan yang merupakan kebijak pemerintah daerah untuk melakukan dan melaksanakan peran retribusi daerah yang berorientasi pada pemungutan sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh pemerintah dan berdasarkan peraturan umum yang di buat pemerintah, pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan negara bagi penduduk secara perorangan, sedangkan pengertian retribusi daerah telah dirumuskan dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (26) Undang-Undang Nomer 18 Tahun 1997 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomer 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu :

*“Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus diberikan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang atau badan.”*

Konsistensi peraturan pajak daerah dan retribusi daerah terlihat dari konsistennya peraturan-peraturan yang dikeluarkan dan diberlakukan oleh pemerintah daerah Kota Tegal dengan prinsip kebersesuaian peraturan seperti yang

diuraikan dalam sub b bab III, sehingga keterkaitan peraturan tersebut sebagai konsistensi dari perkembangan pendapatan masing-masing jenis penerimaan daerah yang dapat dijelaskan dari hasil penelitian dan wawancara sebagai berikut/:

1. Pendapatan Asli Daerah / PAD :

a. Pajak Daerah.

Target pada tahun 1998 / 1999	Rp. 1.562.400.000,00
Target pada tahun 2001	Rp. 2.205.323.000,00
Kenaikan sebesar	41,14 %
Kenaikan rata-rata / tahun	13,71 %

Alasan : Karena adanya penyesuaian tarif atas pelaksanaan perda sesuai dengan Undang-undang Nomor.18 Tahun 1997 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor.34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disisi lain untuk pajak hiburan terjadi penurunan karena semakin maraknya VCD,LD dan siaran melalui TV yang diminati masyarakat sehingga jumlah penonton bioskop semakin menurun.

b. Retribusi Daerah.

Target pada tahun 1998 / 1999	Rp. 4.802.257.000,00
Target pada tahun 2001	Rp. 10.883.482.880,00
Kenaikan sebesar	126,63 %
Kenaikan rata-rata / tahun	42,21 %

Alasan : Karena adanya penyesuaian tarif atas pelaksanaan perda sesuai dengan Undang-undang Nomor.18 Tahun 1997 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor.34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kenaikan cukup besar ini dipengaruhi dari retribusi pelayanan kesehatan dengan dilaksakannya pengelolaan RSU Kardinah menjadi Swadana.

c. Bagian Laba Usaha Daerah.

Target pada tahun 1998 / 1999                      Rp. 85.000.000,00

Target pada tahun 2001                                Rp. 56.000.000,00

Penurunan sebesar                                      (32,95 %)

Penurunan rata-rata / tahun                      (10,98 %)

Alasan : Hasil laba operasional dari PDAM terjadi penurunan dan pada Bank Pasar saat terjadi krisis ekonomi menerapkan pola kehati-hatian dalam pengelolaan keuangannya sehingga sempat merugi, namun keadaan saat ini sudah mulai pulih kembali, disisi lain untuk penerimaan dari BPR/BKK keadaannya cukup baik.

d. Pendapatan Lain-lain :

Target pada tahun 1998 / 1999                      Rp. 231.553.000,00

Target pada tahun 2001                                Rp. 95.980.000,00

Penurunan sebesar                                      (58,54 %)

Penurunan rata-rata / tahun                      (19,51 %)

Alasan : Pada ayat ini sifatnya hanya menghimpun pos-pos penerimaan yang belum/tidak mempunyai ayat penerimaan tersendiri, sedangkan penerimaan dari penjualan barang bekas Pemda tidak setiap tahun dilaksanakan.

Secara keseluruhan perkembangan PAD adalah :

Target pada tahun 1998 / 1999                      Rp. 6.681.210.000,00

Target pada tahun 2001                                Rp. 13.241.475.649,00

Penurunan sebesar                                      (98,18 %)

Penurunan rata-rata / tahun                      (32,72 %)

2. Bagian Dana Perimbangan :

a. Bagi Hasil Pajak

Target pada tahun 1998 / 1999                      Rp. 2.526.593.000,00

Target pada tahun 2001                                Rp. 4.607.226.000,00

Kenaikan sebesar                                        82,34 %

Kenaikan rata-rata / tahun                        27,44 %

Alasan : Adanya penerimaan baru dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ( PBB-KB ) dan dilaksakannya intensifikasi pemungutan PBB.

b. Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam.

Target pada tahun 1998 / 1999                      Rp. 99.014.000,00

Target pada tahun 2001                                Rp. 596.928.000,00

Kenaikan sebesar                                        502,87 %

Kenaikan rata-rata / tahun                        167,62 %

Alasan : Adanya perubahan bagi hasil TPI dari 0,40% menjadi 0,95 %

c. Dana Alokasi Umum.

Target pada tahun 1998 / 1999    Rp. -

Target pada tahun 2001                      Rp. 178.270.000.000,00

Alasan : Dana aloksi umum diterima mulai Tahun 2001

d. Penerimaan dari Propinsi :

Target pada tahun 1998 / 1999                      Rp. 70.222.000,00

Target pada tahun 2001                                Rp. 464.440.000,00

Kenaikan sebesar                                        (561,38 %)

Kenaikan rata-rata / tahun                        (187,12 %)

Alasan : Adanya penerimaan dari Propinsi berupa bantuan dari Tingkat I

Dari data yang dikumpulkan di atas dapat dilakukan analisis tentang keterkaitan (*konsistensi*) peraturan dengan perkembangan penerimaan pendapatan pemerintah Kota Tegal melalui beberapa teori yang secara implisit tersirat bahwa

pemerintah Kota Tegal berupaya untuk melakukan pemungutan menggunakan prinsip-prinsip teori yang antara lain terdapatnya teori asuransi, teori kepentingan, teori daya/gaya pikul, teori bakti, teori daya beli, teori pemungutan berdasarkan hukum, teori pemungutan pajak secara sederhana dan tidak mengganggu perekonomian.

Dilihat dari prosentase yang dikumpulkan melalui PAD dapat diungkapkan bahwa pemerintah Kota Tegal telah menjalankan syarat-syarat pemungutan pajak seperti apa yang disampaikan oleh Adam Smith dalam bukunya "*An Inquiry into the Nature and causes of the Wealth Of Nation*". Pemungutan pajak oleh Adam Smith disebut juga dengan "*The Four Canons*" yaitu :<sup>89</sup>

1. *Equality* (kesamaan);
2. *Certainty* (kepastian);
3. *Convience Of Payment* (kesenangan);
4. *Effisiency* (ekonomi).

### **C. Faktor-Faktor Yang Menjadi Kendala Untuk Berperannya Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Otonomi Daerah Di Kota Tegal**

Pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana digariskan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 memang menuntut kesiapan sumber daya manusia di daerah, bukan hanya aparat pemerintah (birokrat) di daerah melainkan juga para elit lokal (daerah) lainnya dan seluruh anggota masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, otonomi daerah diartikan sebagai kewenangan daerah otonomi untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat setempat sesuai

---

89. Muqodim, Loc. Cit., hal. 19.

dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, desentralisasi merupakan suatu proses pemindahan satu perangkat kewenangan dari satu tingkat pemerintahan ke tingkat pemerintahan yang lain yang lebih bawah, dalam hal ini dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan titik berat kepada pemerintah daerah kabupaten dan kota. Kewenangan yang diserahkan itu mencakup dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, dan kewenangan bidang lain.<sup>90</sup>

Tetapi kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada daerah dalam rangka desentralisasi disertai pula dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan, saran dan prasarana serta sumber daya manusia sesuai dengan kewenangan yang diserahkan.<sup>91</sup> Karenanya aparat pemerintah pusat yang diserahkan kepada daerah tidak akan berkurang tingkat kompetensinya dalam melaksanakan kewenangan yang telah diserahkan. Akibatnya kesiapan mereka untuk melaksanakan otonomi daerah dalam arti kompetensi melaksanakan kewenangan yang telah diserahkan cukup memadai. Keadaan yang sama juga ditemui pada birokrat daerah. Tetapi siapakah mereka untuk melaksanakan otonomi daerah secara mental ?

Selama ini, khususnya mulai tahun 1959 pada saat dimulainya zaman demokrasi terpimpin (orde Soekarno) dan dilanjutkan pada zaman orde baru (rezim Soeharto) selama tiga dasawarsa lebih, pemerintah pusat telah mengukuhkan sistem sentralisasi yang kuat sehingga ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat dirasakan sangat kental. Walaupun terdapat beberapa Undang-Undang mengenai

---

90. Lihat pasal 7 ayat (2) UU No.22 Tahun 1999.

91. Lihat Pasal 8 Ayat (1) dan (2) UU No.22 Tahun 1999.



otonomi daerah seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1945, Undang-Undang No. 18 Tahun 1965 dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1974, realisasi otonomi daerah yang dimaksud tidak pernah terlaksana kecuali desentralisasi administrasi.<sup>92</sup>

Karenanya sampai dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 pada tanggal 1 Januari 2001 yang lalu, semua birokrat yang bekerja pada pemerintah (pusat dan daerah) sudah terbiasa dan sangat berpengalaman dengan sistem sentralisasi yang kuat sebab kurang menguntungkan daerah. Mereka juga terbiasa mengabdikan kepada pemerintah pusat dengan sikap “asal bapak senang”, sebagian memperoleh kesempatan melakukan korupsi, dan selama ini kurang memperhatikan kepentingan daerah serta kurang optimal memberikan pelayanan kepada masyarakat di daerah. Akibatnya para birokrat yang diserahkan kepada pemerintah daerah dan birokrat pemerintah daerah sendiri diperkirakan belum siap mental untuk melaksanakan otonomi daerah sebelumnya sekurang-kurangnya pada tahun pertama dan masa transisi pelaksanaan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999.

Ketidaksiapan para birokrat di daerah dalam melaksanakan otonomi daerah juga terlihat dari cara mereka (terutama yang bertugas di pemerintah daerah propinsi) dalam menafsirkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999. kesalahan dalam menafsirkan pasal demi pasal dari Undang-Undang tersebut oleh aparat pemerintah daerah beberapa propinsi telah membuahkan kesimpulan yang keliru, misalnya mereka menyimpulkan bahwa tugas pemerintah daerah propinsi masih seperti sebelum diperlakukannya Undang-Undang mengenai otonomi daerah sehingga disusunlah struktur organisasi dan tata kerja pemerintah daerah propinsi, padahal

---

92. Mohammad A.S. Hikam dan Syarif Hidayat, *Hubungan Pusat dan Daerah : Dari Ketergantungan Menuju Keseimbangan Dalam Indonesia Menapak Abad 21* : Kajian Ekonomi, Politik, Jakarta, 2000, IPSK-LIPI, hal. 5170.

kegiatan operasional di tingkat propinsi telah jauh berkurang karena sudah disentralisasikan ke pemerintah daerah, kabupaten dan kota. Kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah propinsi lebih banyak terbentuk kewenangan pengaturan dan pengawasan.

Selanjutnya, kesiapan birokrat menghadapi otonomi daerah bukan hanya dituntut dari sudut kualitas (kompetensi dan mental) tetapi juga dari segi kuantitas. Fakta memperlihatkan bahwa cukup banyak jumlahnya para birokrat pemerintah pusat, khususnya selama ini yang bekerja pada kantor wilayah departemen yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Mereka tersebut ditambah dengan para birokrat yang selama ini sudah bekerja pada pemerintah daerah kabupaten dan kota, saya kira cukup memadai jumlahnya untuk melaksanakan otonomi daerah. Karenanya pemerintah daerah kabupaten dan kota tidak akan mengalami banyak kesulitan dalam merekrut para pejabat eselon dua, tiga dan empat dalam melaksanakan otonomidaerah asalkan tidak mengutamakan putra/putri asli daerah (PAD). Jika pemerintah kabupaten dan kota masih merasakan menemukan kesulitan dalam mendapatkan tenaga dan kompeten, bantuan dapat dimintakan kepada perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang sudah mapan yang berada pada masing-masing propinsi, khususnya pejabat eselon untuk bidang perencanaan pembangunan yang selama ini memang dirasakan rendahnya kompetensi mereka yang berada pada pemerintah daerah propinsi, kabupaten and kota untuk menyusun perencanaan.

Dengan demikian terlihat bahwa dari segi akuantitas dan kualitas dalam arti kompetensi melaksanakan tugas, kecuali untuk bidang perencanaan pembangunan,

kesipan para birokrat di daerah cukup memadai, tetapi ditinjau dari segi mental, mereka memerlukan perubahan sikap dan perilaku selama masa transisi.

Otonomi daerah yang dicanangkan seperti sekarang ini diharapkan akan mempercepat pertumbuhan dan pembangunan daerah, disamping menciptakan keseimbangan pembangunan antar daerah di Indonesia. Kebijakan pembangunan yang sentralistik dampaknya sudah kita ketahui, yaitu ketimpangan antar daerah di Indonesia. Kebijakan pembangunan yang sentralistik dampaknya sudah kita ketahui, yaitu ketimpangan antar daerah, terutama antara Jawa dan Luar Jawa dan antara Indonesia Bagian Barat dan Indonesia Bagian Timur. Ahli pembangunan ekonomi regional sudah melakukan kajian yang intensif akan hal itu.

Akan tetapi, pembangunan daerah tidak akan datang dan terjadi dengan begitu saja. Pembangunan di daerah baru akan berjalan kalau sejumlah prasyarat dapat dipenuhi, terutama oleh para penyelenggara pemerintahan di daerah, yaitu pihak legislatif dan eksekutif di daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota, serta DPRD-DPRD propinsi, kabupaten dan kota).

Otonomi daerah memiliki sejumlah kewenangan, terutama *sebelas (11) kewenangan wajib* sebagaimana ditentukan oleh UU No. 22 Tahun 1999. Kesebelas kewenangan wajib itu merupakan modal dasar yang sangat penting untuk pembangunan daerah. Yang diharapkan dari pemerintah daerah itu adalah sejumlah hal, antara lain :

1. *Fasilitas*. Disamping fungsi lainnya, fungsi pemreintah daerah yang sangat esensial adalah memfasilitasi segala bentuk kegiatan di daerah, terutama dalam bidang perekonomian. Segala bentuk *perijinan* hendaklah dipermudah, bukan

sebaliknya, yaitu dengan menciptakan segala bentuk birokrasi yang akan menyulitkan kalangan pengusaha dan investor untuk menanamkan modalnya di daerah tersebut. Logika yang hendaknya digunakan oleh pemerintah daerah adalah silahkan menggunakan sarana dan prasarana serta sumber daya daerah (tanah, hutan, tambang, dll) untuk kegiatan ekonomi daerah. Yang paling utama adalah bagaimana menciptakan lapangan kerja secara maksimal bagi warga masyarakat, sehingga, di samping warga masyarakat akan memiliki harga diri, pengangguran juga dapat dikurangi. Pemerintah daerah juga dapat menawarkan *fasilitas perpajakan* yang merangsang penanaman modal. Jadi, bukan sebaliknya dengan melihat kegiatan ekonomi semata-mata sebagai subyek pemungutan untuk memperoleh peningkatan PAD. Kalau pemerintah daerah mempunyai kecenderungan untuk memungut, maka tidak mustahil kalangan pengusaha mencari tempat lain untuk menanamkan modalnya yang memberikan rangsangan berusaha dengan lebih baik.

2. *Pemerintah Daerah Harus Kreatif.* Pembangunan daerah berkaitan pula dengan inisiatif lokal, dan untuk berinisiatif diperlukan kreativitas dari para penyelenggara pemerintahan. Karena itu, pejabat pemerintah daerah sekarang ini benar-benar dituntut untuk kreatif, kalau tidak demikian masyarakat akan mempertanyakan kapasitasnya. Dan jika hal itu sampai terjadi maka biasanya umur pemerintahannya tidak akan terlalu lama. Seorang Gubernur/Bupati/Walikota tidak mungkin menghendaki untuk memperlama masa jabatannya kalau tidak mampu merangsang kreativitas dalam pemerintahannya yang mendorong pada percepatan dan peningkatan pembangunan. Kreativitas tersebut menyangkut bagaimana mengalokasikan dana, apakah yang bersumber

dari Dana Alokasi Umum (DAU) ataupun dari PAD, secara tepat dan adil dan proporsional. Beberapa untuk gaji/honor, biaya operasional, sarana sosial, sarana dan prasarana fisik, dan lain-lainnya. Kreativitas juga menyangkut kapasitas untuk menciptakan keunggulan komparatif bagi daerahnya, sehingga kalangan pemilik modal akan beramai-ramai menanamkan modal di daerah tersebut. Kreativitas juga menyangkut kemampuan untuk menarik Dana Alokasi Khusus dari pemerintah sehingga banyak dana dari Jakarta disedot ke daerahnya. Untuk itu, pemerintah daerah harus mampu menyiapkan program-program sosial, ekonomi yang menarik sehingga pemerintah tidak ragu memberikan dukungannya.

3. *Politik Lokal Yang Stabil.* Masyarakat dan Pemerintah di daerah harus menciptakan suasana politik lokal yang kondusif bagi dunia usaha dan pembangunan ekonomi. Orang tidak akan mungkin menanamkan uangnya di suatu daerah dengan situasi politik lokal yang tidak stabil. Karena pemerintah tidak transparan dalam pembuatan kebijaksanaan publik maka hal itu kemudian mendorong terjadinya gerakan protes, dan tentu saja akan mengganggu jalannya pemerintahan. Selain itu, pejabat eksekutif harus bekerja dengan suasana yang tenang sehingga merangsang kreativitas. Banyak diketahui, di mana Gubernur/Bupati/Walikota sering merasa terganggu karena sikap anggota DPRD yang arogan dan selalu mengancam untuk setiap waktu meminta pertanggungjawaban, atau pertanggungjawaban tahunan akan ditolak. Orang tidak akan mungkin mau menanamkan modal pada suatu daerah kalau Gubernur/Bupati/Walikota selalu terancam dan bahkan kemudian akan dinonaktifkan oleh DPRD, karena kalangan pengusaha menghendaki adanya

kepastian kepada siapa mereka berurusan. Hal itu tidak akan terjadi kalau Kepala Daerah diganti setiap tahun karena alasan-alasan yang sulit untuk dipertanggungjawabkan.

4. *Pemerintah Daerah Harus Menjamin Kestinambungan Berusaha.* Ada kecenderungan yang mengkhawatirkan berbagai pihak bahwa pemerintah daerah seringkali merusak tatanan yang sudah ada. Apa yang sudah disepakati sebelumnya, baik melalui "*Kontrak*" dalam negeri atau dengan pihak asing, seringkali diancam untuk ditinjau kembali, bahkan hendak dinafikan oleh pemerintah daerah yang baru dengan alasan otonomi daerah. Kalangan pengusaha asing dan domestik seringkali merasa terganggu dengan sikap kalangan politisi dan birokrasi lokal yang mencoba mengutak-utik apa yang sudah disepakati sebelumnya. Bagi kalangan pengusaha asing, satu kali sebuah kontrak disepakati dan ditandatangani maka hal itu mempunyai ikatan hukum yang harus dihormati. Kalau sampai membatalkan sebuah kontrak maka implikasi hukumnya akan besar sekali, terutama dalam dunia bisnis internasional. Karena itu, pemerintah daerah harus meningkatkan kapasitas aparatnya, khususnya jika berhubungan dengan bisnis internasional. Harus ada yang ahli dalam hal kontrak dan dalam bidang *Corporate and Business Law* supaya jangan sampai terkecoh di kemudian hari. Di samping itu, dunia usaha juga akan merasa terlindungi dalam kestinambungan usaha.

5. *Pemerintah Daerah Harus Komunikatif dengan LSM/NGO, terutama dalam Bidang Perburuhan dan Lingkungan Hidup.* Pemerintah daerah sekarang dituntut untuk memahami dengan intensif aspirasi yang berkembang di kalangan perburuhan, baik yang menyangkut upah minimum dan jaminan

lainnya, hak-hak buruh pada umumnya, perlindungan kepada buruh wanita, ataupun menyangkut keselamatan kerja dan kesehatan kerja. Dengan demikian, pemerintah daerah hendaknya menjadi jembatan antara kepentingan dunia usaha dengan aspirasi kalangan pekerja/buruh. Pemerintah daerah juga harus lebih sensitif dengan masalah atau isu lingkungan hidup serta gender. Dengan demikian, sikap-sikap radikal dari kalangan buruh yang didukung oleh LSM/NGO akan dapat diakomodasi, dan pada akhirnya dua kepentingan akan dapat terjembatani. Tentu saja, sikap-sikap yang seperti diperlihatkan oleh para pejabat masa lampau, yang selalu memihak kepentingan pengusaha, harus ditinggalkan.

Kelima elemen yang diungkapkan di atas merupakan prakondisi bagi terselenggaranya pembagunan daerah. Dengan kebijaksanaan otonomi yang luas maka peluang bagi daerah menjadi sangat luas pula, dan semuanya sanga bergantung pada daerah itu sendiri.

Yang paling utama bagi daerah adalah *penciptaan lapangan kerja*. Ukuran yang paling fundamental bagi keberhasilan sebuah pemerintahan dalam sebuah negara modern adalah seberapa jauhkah pemerintahan tersebut berhasil menciptakan lapangan kerja bagi kalangan warga masyarakat, dan kemudian disusul dengan kemampuan untuk menghadapi laju inflasi, serta keseimbangan neraca perdagangan internasional. Hal-hal itu merupakan isu utama yang selalu dimunculkan bagi setiap pergantian pemerintahan melalui pemilihan umum. Setiap kali saya mengamati pemilihan umum di Amerika Serikat dan Inggris, selalu yang ditonjolkan adalah seberapa jauh pemerintahan yang sedang berkuasa (*the incumbent government*) memerangi kemiskinan dengan menciptakan lapangan

kerja, menahan laju inflasi, serta kemampuan untuk menangani masalah-masalah sosial pada umumnya, serta pelayanan kesehatan.

Penciptaan lapangan kerja merupakan masalah yang sangat esensial karena "*multiplier effect*"nya tinggi sekali. Lapangan kerja berkaitan erat dengan harga diri dan martabat. Orang yang memiliki sebuah pekerjaan tetap akan memiliki martabat yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang pengangguran. Lapangan kerja atau kesempatan kerja berkaitan erat pula dengan dua dimensi ekonomi yang sangat esensial, yaitu peningkatan daya beli dan kecenderungan untuk menabung. Dengan penciptaan lapangan kerja yang tinggi, maka daya beli akan meningkat pula, dan bagaimanapun juga akan mempengaruhi kecenderungan untuk menabung, yang pada akhirnya, akan mempengaruhi pula basis perpajakan dalam sebuah negara. Daya beli meningkat artinya pajak penjualan atas barang dan jasa juga meningkat, dan itu berarti pendapatan daerah dan negara juga akan meningkat, yang semuanya akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk proyek dan sejumlah insentif lainnya. Roda pembangunan juga akan berputar dengan sendirinya, sehingga pada akhirnya kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Tentu saja keadaan seperti itu baru akan terjadi dalam suasana politik negara yang stabil, baik di tingkat nasional ataupun di tingkat lokal. Stabilitas akan menentukan semangat dan kepercayaan, karena tidaklah mungkin orang akan menanamkan uang pada suatu tempat kalau di situ terjadi huru-hara politik, demonstrasi terjadi setiap hari, keamanan dan ketertiban terganggu.

Sebelum menguraikan dan mengungkapkan serta menganalisis data yang diperoleh melalui penelitian, terlebih dahulu diketengahkan hubungan antara



konsep teori dan analisis penelitian mengenai permasalahan nomor 3 sebagaimana tampak pada tabel 8 dibawah ini :

**Tabel 8**

**Hubungan Teori Dan Analisis Penelitian Mengenai Permasalahan Nomor 3**

Rumusan Permasalahan	Data Penelitian	Persoalan Potensial	Teori Yang digunakan
Faktor-faktor yang menjadi kendala untuk berperannya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Otonomi Daerah di Kota Tegal.	Terdapatnya beberapa faktor kendala teknis dalam bentuk : kesiapan (kuantitatif/kualitatif) para fiskus, dokumentasi tentang obyek dan subyek pajak, sarana dan prasaran pendukung, persoalan internal obyek pajak(kesadaran, kesiapan, waktu yang tepat).	Tentang sanksi, penyesuaian tarip dan kinerja aparat birokrasi yang lemah.	Teori Kesadaran hukum/budaya hukum. Satjipto Raharjo (1980 ; Hal.144). Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra (1993; Hal.114). L.M Friedman (1969 ; Hal.27-30).

Sumber : Data Penelitian Diolah

Dari tabel 8 diatas dapat dijelaskan permasalahan tentang faktor-faktor yang menjadi kendala untuk berperannya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Otonomi Daerah di Kota Tegal. Ditemukan sesuai dengan data penelitian dimana terdapatnya beberapa faktor kendala teknis dalam bentuk: kesiapan (kuantitatif/ kualitatif) para fiskus, dokumentasi tentang obyek dan subyek pajak, sarana dan prasaran pendukung, persoalan internal obyek pajak (kesadaran, kesiapan, waktu yang tepat) Bila dianalisis dengan menggunakan teori kesadaran/budaya hukum oleh Satjipto Rahardjo, 1980: Diketahui bahwa terdapat persoalan potensial mengenai sanksi, penyesuaian tarip dan kinerja aparat birokrasi yang lemah.

Hal itu terungkap dari hasil penelitian melalui wawancara dengan pemerintah Kota Tegal dan kepala Dipenda Kota Tegal dalam menghadapi kesiapan otonomi daerah tentang peran pajak daerah dan retribusi daerah, terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala yang secara teknis dapat diungkapkan antara lain :

1. Tentang sanksi, sering terdapat kendala untuk menerapkan sanksi pada wajib pajak dan wajib retribusi yang melalaikan pajak daerah, terutama pada waktu terjadinya krisis moneter yang membawa dampak kurangnya pendapatan dari pajak hotel dan restoran serta tempat-tempat hiburan yang lainnya.
2. Penyesuaian tarif, yang kadangkala membingungkan masyarakat sebagai wajib pajak dan wajib retribusi yang tidak pernah diberitahu sebelumnya tentang penyesuaian tarif.
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang kewenangan penerimaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang dialihkan penerimaannya melalui propinsi (berdasarkan Pasal 2 undang-undang nomor 34 Tahun 2000), yang pada mulanya kewenangan penerimaan untuk Kabupaten/Kota (berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997), sementara itu Undang-Undang mengenai Pemerintah Daerah (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 pada pasal 80 ayat 2 dengan tegas mencantumkan tentang Bagian Daerah dari Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan, perkotaan, dan perkebunan serta Bea Perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diterima langsung oleh Daerah penghasil.
4. Tentang pengesahan peraturan daerah kabupaten/Kota, yang semula dilaksanakan oleh pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, pengesahannya dilakukan oleh

Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Menteri Keuangan yang notabene Pemerintah Pusat. Hal ini menimbulkan rentang birokrasi yang semakin panjang dan pengendalian/pengawasan menjadi semakin lemah. Disamping itu pemerintah Propinsi tidak dapat lagi melakukan pembinaan, pengawasan serta pengendalian secara intensif terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota, karena pada hakekatnya pembinaan telah dilakukan atau diambil oleh Pemerintah Pusat, sehingga dimungkinkan sangat lemah pengawasannya, karena terlalu banyaknya jumlah Tingkat kabupaten / kota di Indonesia.

5. Kendala umum aparat birokrasi pada pemerintah Kota Tegal dalam menghadapi otonomi daerah ditemukan lemahnya kinerja dan kurangnya ketrampilan dari para petugas pemungut pajak daerah dan retribusi daerah khususnya tentang pemahaman Undang-Undang Nomer 18 Tahun 1997 yang dirubah dengan Undang-Undang 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan Undang-Undang-Nomor 22 Tahun 1999 Pemerintah Daerah .

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang telah peneliti analisis dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Tegal mempunyai peran dalam pembiayaan pelaksanaan pembangunan di Kota Tegal dan memberikan kontribusi yang signifikan sebagai komponen Pendapatan Asli Daerah.
2. Ternyata ditemukan banyaknya peraturan daerah yang diperlakukan sebagai aturan pelaksana dari perundang-undangan pemerintah pusat mempunyai konsistensi atau kebersesuaian diantara peraturan-peraturan tersebut, begitu juga keterkaitan peraturan daerah dengan operasionalnya dilapangan sehingga terlihat adanya konsistensi aturan-aturan terutama yang berkenaan dengan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
3. Faktor yang menjadi kendala untuk berperannya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Tegal, ditemukan pada para wajib pajak baik perorangan maupun badan walaupun dia sudah menyadari kewajibannya namun cenderung untuk menghindar dari melaksanakan kewajiban tersebut. Hal ini memberikan dampak dalam bentuk kurang optimalnya penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Tegal.
4. Dalam pelaksanaan otonomi daerah terutama yang berkaitan dengan usaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sangat ditentukan oleh kemampuan aparaturnya pelaksana dilapangan, ternyata di Kota Tegal ditemukan lemahnya kinerja dan ketrampilan para fiscus dalam memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

## **B. SARAN-SARAN**

Berangkat dari kesimpulan tersebut ada beberapa saran/rekomendasi yang dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Sehubungan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 yang telah di revisi dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempunyai kaitan langsung dengan Pendapatan Asli Daerah maka dibutuhkan aturan pelaksana (Peraturan Pelaksana dan Peraturan Daerah) sehingga daerah dapat mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah.
2. Untuk terlaksana secara efektif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :
  - a. Sosialisasi aturan terhadap pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilapangan dan sosialisasi aturan terhadap masyarakat luas.
  - b. Dalam operasional Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu didukung oleh sarana dan prasarana petugas lapangan.
3. Perlu diadakan inventarisasi aturan yang berguna untuk mempelajari konsistensi pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Wahab, Solichin, 1997, *Analisis Kebijaksanaan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Abdurahman, 1987, *Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah*, Media Sarana Press, Jakarta.
- Adisubrata, Winama Surya, 1999 *Otonomi Daerah di Era Reformasi*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Ardhiwisastra, Yudha Bhakti, 2000, *Penafsiran Dan Konstruksi Hukumi*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Aini, Hamdan, 1985, *Perpajakan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Albrow, Martin, 1989, *Birokrasi*, PT. Tiara Wacana, Yogya.
- Alfian & Nazaruddin Sjamsudin, 1991, *Profil Budaya Politik Indonesia*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Ali Chidir, 1993, *Hukum Pajak Elementer*, PT Eresco, Bandung.
- Ali Faried, 1996, *Hukum Tata Pemerintah dan Proses Legislatif Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Aminata, 1990, *Dasar-Dasar Perpajakan*, Pustaka Prima, Surakarta.
- Anwar, Yozar, 1990, *Strategi Perpajakan Mendukung Pembangunan*, Bina Rena Pariwara, Jakarta.
- Anggerjati Wijaya, Eko Budi Marwanto, Sunarjo, Oddie Shalahudin, Kiswondo, 2000, *Politik Ekonomi Indonesia Baru*, Forum LSM, Yappika dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Arsyad, Lincoln, 1999, *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, BPFE, Yogyakarta.
- Arikunto, Suharsimi, 1990, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Ashshofa, Burhan, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Rinika Cipta, Jakarta.
- Asikin, Agustini, dkk, 1990, *Pajak, Citra dan Bebanannya*, Bina Rena Pariwara, Jakarta.
- Benveniste, Guy, 1999, *Birokrasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Budihardjo , Mariam, 1989, *Dasar-dasar Ilmu Polituik*, PT.Gramedia, Jakarta
- Bohari, 1993, *Pengantar Hukum Pajak*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bonger, W.A., 1981, *Pengantar tentang Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.
- Brotodihardjo, Santoso, 1987, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT. Eresco, Bandung.
- Cipto, Bambang, 1995, *Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Era Pemerintahan Modern-Industrial*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Cohen, Morris L, 1995, *Penelitian Ilmu Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Cokro, Amijoyo, Bintoro, 1988, *Perencanaan Pembangunan*, Gunung Agung, Jakarta.
- Daliyo, JB, 1992, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Danuredjo, SLS, 1967, *Otonomi di Indonesia Ditinjau Dalam Rangka Kedaulatan*, Laras, Jakarta.
- Dumairy, 1999, *Perekonomian Indonesia*, Erlangga, Jakarta.
- Djojohadikusumo, Sumitro, 1994, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*, LP3ES, Jakarta.
- Djumhana, Muhammad, 1994, *Hukum Ekonomi Sosial Indonesia*,PT. Citra Adhitya Bakti, Bandung.
- Dunn, William N, 1996, *Analisa Kebijaksanaan Publik*, PT. Hanindito, Yogyakarta.
- Donnelly, Gibson Ivancevic, 1996, *Organisasi Edisi 8, Jilid I*, Binarupa Aksara, Jakarta.
- Donnelly, Gibson Ivancevic, 1996, *Organisasi Edisi 8, Jilid II*, Binarupa Aksara, Jakarta.
- Faisal, Sanafiah, 1990, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar Dan Aplikasi*, Yayasan Asih Asah Asuh, Malang.
- Fakrulloh, Zudan Arif dan Hadi Wuryan, 1997, *Hukum Ekonomi*, Karya Abditama, Surabaya.
- Fakhri, Husein MuhammaddanTjahyono Achmad, 2000, *Perpajakan Edisi Kedua* , AMP YKPN, Yogyakarta.
- Friedmann W, 1996, *Teori dan Filsafat Hukum, Hukum dan Masalah-Masalah Kontemporer*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- , 1996, *Teori dan Filsafat Hukum*, Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Furchan, Arief, 1992, *Pengantar Metoda Penelitian Kualitatif*, Usaha Nasional, Surabaya.
- George, Vic dan Paul Wilding, 1992, *Ideologi dan Kesejahteraan Rakyat*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Gerungan, WA., 1987, *Psikologi Sosial*, Eresco, Bandung.
- Gie Kwik Kian, 1999, *Ekonomi Indonesia Dalam Krisis dan Transisi Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- , 1996, *Praktek Bisnis dan Orientasi Ekonomi Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Gie The Liang, 1967, *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jilid I, Gunung Agung, Jakarta
- , 1968, *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jilid II, Gunung Agung, Jakarta
- , 1968, *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jilid III, Gunung Agung, Jakarta
- Guruh, Syahda, 2000, *Menimbang Otonomi VS Federal*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Hadi, Sutrisno, 1973, *Metodologi Riset*, Yayasan Penerbit Psikologi UGM, Yogyakarta.
- , 2000, *Metodologi Research*, Penerbit Andi, Jilid I, Yogyakarta.
- , 2000, *Metodologi Research*, Penerbit Andi, Jilid II, Yogyakarta.
- , 2000, *Metodologi Research*, Penerbit Andi, Jilid III, Yogyakarta.
- , 2000, *Metodologi Research*, Penerbit Andi, Jilid IV, Yogyakarta.
- Hartono, Sunaryati C.F.G, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung.
- Hasan, M. Ali, Zakat, 1996, *Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Huijbers, Theo, 1995, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta.



- Hutabarat, Martin H., dkk, 1996, *Hukum dan Politik Indonesia Tinjauan Analisis Dekrit Presiden dan Otonomi Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Ibrahim, Jimmi Mohammad, 1997, *Prospek Otonomi Daerah*, Dahara Prize, Semarang.
- Istanto, F. Sugeng, 1971, *Beberapa Segi Hubungan Pemerintahan Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Karya Putra, Yogyakarta.
- Ichsan, H.M., 1986, *Administrasi Perpajakan*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Terbuka, Jakarta.
- Jones, Charles O, 1996, *Pengantar Kebijakan Publik*, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- J, Wajong, 1989, *Administrasi Keuangan Daerah*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Kahò, Riwu, 1987, *Analisa Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah Di Indonesia*, Tarsito, Jakarta.
- Kartasapoetra, G., dkk, 1989, *Pajak Bumi dan Bangunan, Prosedur dan Pelaksanaannya*, Bina Aksara, Jakarta.
- Kartini, Kartono, 1988, *Pengantar Metodologi Research sosial*, Alumni, Bandung.
- Keraf, Gorys, 1995, *Eksposisi, Komposisi Lanjutan II*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Kerlinger, Fred N, 2000, *Asas-Asas Penelitian Behavioral*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Kusnardi, M dan Harmaily ibrahim, 1986, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, FH-UI, Jakarta.
- Koentjaraningrat, 1997, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Kusumahatmadja, RDH, 1959, *Pengantar Ke Arah Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung.
- Kusumah, Mulyana W dan Baut Paul S, 1988, *Politik dan Perumahan Sosial*, YLBHI, Jakarta.
- Lapera, 2000, *Otonomi Versi Negara*, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta.
- Maarif, Ahmad Syafii, dkk, 1998, *Indonesia di Simpang Jalan*, Mizan, Bandung.
- Mardalis, 1989, *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Melton Putra, Jakarta.

- Magnis-Suseno, Franz, 1988, *Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Mardiasmo, 1987, *Perpajakan*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Maris, Masri, 1989, *Keuangan Pemerintah Daerah dan Indonesia*, UI Press, Jakarta.
- Mas'oed, Mohtar, 1997, *Kritik Sosial Dalam Wacana Pembangunan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Memet, Yogie, S. 1955, *Perwujudan Otonomi Daerah, Dalam Otonomi Daerah, Peluang Dan Tantangannya*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Mikkelsen, Britha, 1999, *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Miles, Matthew B, 1992, *Analisa Data Kualitatif*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Miyasto, 1993, *Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Dilihat Dari Fungsinya Dalam Konteks Keadilan dan Pembiayaan Pembangunan*, Center For Fiscal and Monetary Studies, Jakarta.
- , 1997, *Sistem Perpajakan Nasional Dalam Era Globalisasi*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Madya Dalam Ilmu Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang.
- Moleong, Lexy J., 1993, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya.
- Mubyarto, 1999, *Membangun Sistem Ekonomi*, BPFE, Yogyakarta.
- Munawir, H.S, 1997, *Perpajakan*, Liberty, Yogyakarta.
- Muslimin, Amrah, 1982, *Aspek-aspek Hukum Otonomi Daerah*, Cetakan I , Alumni, Bandung.
- Muhadjir, Noeng, 1996, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, Yogyakarta.
- Muqodim, 1994, *Perpajakan*, Fakultas Ekonomi-UII, Yogyakarta.
- Musgrave, Richard, A and Musgrave, Peggy B, 1991, *Keuangan Negara Dalam Teori Dan Praktek*, Erlanga, Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 1994, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT.Remaja Rusdakarya, Jakarta.
- Nasution, Norman S , 1986, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada, Bandung.
- Nasution, Agussalim, 1988, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Karunuka, Jakarta.

- Nasution, Thomas M, 1996, *Buku Penuntun Membuat Tesis, Skripsi, Desrtasi dan Makalah*, Bina Aksara, Jakarta.
- Nawawi, Hadari, 1990, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Nazir, 1988, *Metode Penelitan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ningrat, Koentjoro, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta.
- Oemarkatab, 1984, *Peraturan-Peraturan Tentang Perpajakan*, Percetakan Negara RI, Jakarta.
- Oetama, Jacob & J. Widodo, 1990, *Menuju Masyarakat Baru Indonesia Antisipasi Terhadap Tantangan Abad XXI*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Osborne, David and Ted Gaebler, 1993, *Reinventing Government*, A Plume Book.
- Peters, A.A.G. dan Koesriani Siswosoebroto, *Hukum dan Perkembangan Sosial Buku Teks Sosiologi Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Pide, Andi Mustari, 1999, *Otonomi Daerah Dan Kepala Daerah Memasuki Abad XXI*, Gaya Media, Jakarta.
- Pudjosewojo, Kusumadi, 1989, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta.
- Puspa, Yan Pramadya, 1977, *Kamus Hukum*, CV Aneka Ilmu, Semarang.
- Radjab, Dasril, 1993, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Reneka Cipta, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 2000, *Wajah Hukum di Era Reformasi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rondang Pasaribu, Ashadi Siregar, 2000, *Bagaimana Mengelola Media Korporasi-Organisasi*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- , 1989, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.
- , 1996, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Ryas Rasyid, Muhammad, 1997, *Kajian Awal Birokrasi Pemerintahan Politik Orde Baru*, (anggota IKAPI), Jakarta.
- , 1997, *Kajian Awal Birokrasi dan Politik Orde Baru*, Yarsif Matampone, Jakarta.

- , 1997, *Makna Pemerintah Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*, PT. Yarsif Wetampone, Jakarta.
- , 1989, *Masalah Penegakan Hukum*, Suatu Tinjauan Sosiologis, Sinar Baru, Bandung.
- Sabon, Max Boli, *Ilmu Negara*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Santoso, Brotodiharjo R, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Eresco, Bandung.
- S.S, Soehardjo, 1990, *Konstitusi dan Demokrasi, Beberapa Pemikiran Tentang Hukum*, Dahara Prize, Semarang.
- , 1994, *Ilmu Negara Pertumbuhan Konstitusi Negara Modern* Dahara Prize, Semarang.
- Sambuaga, Theo L., dkk, 1992, *Dinamika Masyarakat dan Pembangunan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Samudra, Azhari A., *Perpajakan di Indonesia*, PT. Gramedia Pustakatama, Jakarta.
- Sasono, Adi, dkk, 1999, *Menyoal Birokrasi Publik*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Sastrosuehardjo, Soehardjo, 1991, *Hukum Administrasi Negara, Pokok-Pokok Pengertian Serta Perkembangannya di Indonesia*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang.
- Singarimbun, Masrj., 1989, Effendi Sofian, *Metode Penelitian Survei*, IP3FS, Jakarta.
- Siregar, Bismar, 1995, *Hukum Hakim dan Keadilan Tuhan Kumpulan Catatan Hukum dan Peradilan di Indonesia*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Sjarif, Amiroeddin, 1997, *Perundang-undangan Dasar, Jenis, dan Teknik Membuatnya*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- , *Pengantar Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 1995, *Penelitian Hukum Normatif*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soemanto, Wasty, 1999, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Soemitro, Rochmat, 1982, *Pajak dan Pembangunan*, Eresco, Bandung.
- , 1988, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, Eresco, Bandung.
- , 1991, *Asas dan Dasar Perpajakan*, Buku ke-1 Eresco, Bandung.

- , 1991, *Asas dan Dasar Perpajakan*, Buku ke-2 Eresco, Bandung.
- , 1991, *Asas dan Dasar Perpajakan*, Buku ke-3 Eresco, Bandung.
- Soemitro, Rony Hanitijo, 1989, *Studi Hukum, Masyarakat dan Teknologi*, CV. Agung, Semarang.
- , 1989, *Studi Hukum dan Kemiskinan*, Tugu Muda, Semarang.
- , 1990, *Hukum dan Masalah Penyelesaian Konflik*, CV. Agung, Semarang.
- , 1984, *Masalah-Masalah Sosiologi Hukum*, Sinar Baru, Bandung.
- , 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- , 1984, *Permasalahan Hukum Di dalam Masyarakat*, Alumni, Bandung.
- , 1989, *Perspektif Sosial Dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum*, CV. Agung, Semarang.
- , 1982, *Studi Hukum dan Masyarakat*, Alumni, Bandung.
- Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Kajian terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung.
- Sunggono, Bambang, 1994, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Suryabrata, Sumadi, 1988, *Metodologi Penelitian*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Syarifudin, Ateng, 1985, *Pasang Surut Otonomi Daerah*, Tarsito, Bandung.
- Syarifudin, Ateng, 1988, *Pengaturan Koordinasi Pemerintah Di Daerah*, Tarsito, Bandung.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1989, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- , 1994, *Perbandingan Antara Penelitian Hukum Normatif Dengan Penelitian Hukum Yang Empiris*, Majalah : Masalah-masalah Hukum Nomer 9 UNDIP, Semarang.
- Soehartono, Irawan, 1995, *Metode Penelitian Sosial*, PT.Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Soehino, 1995, *Perkembangan Pemerintahan Di Daerah*, Liberty, Yogyakarta.

- Sunggono, Bambang, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soetrisno, Loekman, 1995, *Menuju Masyarakat Partisipatif*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Syaukani,HR, 2000, *Menatap Harapan Masa Depan Otonomi Daerah*, Gerbang Dayaku, Kalimantan Timur.
- Tunggul, Hadia Setia, 1999, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Harvarindo.
- Thoha, Miftah, 1983, *Kepemimpinan dalam Manajemen*, CV, Rajawali, Jakarta.
- Utrecht, E., 1986, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya.
- Wahyutomo, Imam, 1994, *Pajak*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Waluyo dan Irawan B. Ilyas, 1999, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta.
- Wibawa, Samudra, 1994, *Kebijaksanaan Publik, Proses dan Analisis*, Intermedia, Jakarta.
- Widodo,Triyanto Suseno, 1990, *Indikator Ekonomi*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Wirawan, Waluyo, 2000, *Perpajakan Indonesia*, Penerbit Salemba, Jakarta.
- Wijaya Tunggal Amin, 1995, *Pelaksanaan Pajak Penghasilan Perorangan*, Rineka Cipta, Jakarta.

## MAKALAH-MAKALAH

Butarbutar, Sertrama, 18 Oktober 1997, *Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Peningkatan Kesadaran Hukum Wajib Pajak*, disampaikan dalam Seminar Perpajakan, Universitas Diponego, Semarang.

Hartono, Dimiyati, 20 Mei 1994, *Hubungan dan Pengaruh Timbal Balik Antara Hukum Dengan Politik Di Dalam Praktek Penyelenggaraan Negara*, disampaikan dalam Studium Generale pada Universitas Muhammadiyah, Jakarta.

Dalail, Ngadisah, 23 November 2000, *Peranan DPRD Dalam Pemberdayaan Pemerintahan Daerah*, disampaikan dalam Semiloka Bidang Politik Dan Pemerintahan Daerah Legislatif dan Eksekutif Propinsi Jawa Tengah, Center for Indonesian Bureaucracy Studies.

Ditjen PUOD Depdagri, 1993, *Manual Administrasi Pendapatan Daerah*, disampaikan dalam Rakontek Nasional Bidang Hukum, Jakarta.

—————, 23 November 1999, *Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Sektor Pajak dan Retribusi*, disampaikan dalam Lokakarya Penyusunan Produk Hukum, Semarang.

—————, 23 November 1999, *Strategi Optimalisasi Pendapatan Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999*, disampaikan dalam Lokakarya Penyusunan Produk Hukum, Semarang.

—————, 23 November 1999, *Strategi Pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah*, disampaikan dalam Lokakarya Penyusunan Produk Hukum, Semarang.

—————, 23 November 1999, *kajian Pembinaan Pemerintahan Daerah*, disampaikan dalam Lokakarya Penyusunan Produk Hukum, Semarang.

Imawan, Riswanda, 23 November 2000, *Demokratisasi Politik*, disampaikan dalam Semiloka Bidang Politik Dan Pemerintahan Daerah Legislatif dan Eksekutif Propinsi Jawa Tengah, Center for Indonesian Bureaucracy Studies.

Imam Zadjuli, Suroso, 23 November 2000, *Strategi Pengembangan Ekonomi Dalam rangka Otonomi Daerah*, disampaikan dalam Semiloka Bidang Politik Dan Pemerintahan Daerah Legislatif dan Eksekutif Propinsi Jawa Tengah, Center for Indonesian Bureaucracy Studies.

Lay, Cornelis, 23 November 2000, *Desentralisasi dan Demokrasi*, disampaikan dalam Semiloka Bidang Politik Dan Pemerintahan Daerah Legislatif dan Eksekutif Propinsi Jawa Tengah, Center for Indonesian Bureaucracy Studies.

Mas'ood, Mohtar, 23 November 2000, *Mengembangkan Masyarakat Madani*, disampaikan dalam Semiloka Bidang Politik Dan Pemerintahan Daerah Legislatif dan Eksekutif Propinsi Jawa Tengah, Center for Indonesian Bureaucracy Studies.

Miyasto, 1993, *Manual Administrasi Pendapatan Daerah*, Dirjend, Poud Depdagri, Jakarta.

—————, 1997, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Makalah pada Diklat Bidang pendapatan Type C, Diklat Propinsi Dati I Jateng, Semarang.

—————, 1997, *Sistem Perpajakan Nasional Dalam Era Ekonomi Global*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Madya Dalam Ilmu Ekonomi Pada fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.

—————, 1998, *Sistem dan Pelaksanaan Perpajakan di Indonesia*, Makalah Seminar, Nasional Perpajakan dalam rangka Dies Natalis Universitas Diponegoro, Semarang.

—————, 28-30 September 1998, *Kajian Pembinaan Pemerintah Daerah*, Dirjend. Poud.

—————, 1999, *Optimalisasi Pendapatan Daerah Berdasarkan Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999*, Dirjen Puod Depdagri.

—————, 1999, *Strategi Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah*, Dirjend Puod Depdagri.

—————, 1-10 Februari, *Implementasi Tugas dalam Bidang perencanaan dan pengendalian Pembangunan Daerah*, disampaikan dalam Studi Interaktif Legislatif dan Eksekutif Propinsi Jawa Tengah.

Mufiz, Ali, 13 Oktober 1997, *Demokratisasi Birokrasi di Indonesia Dalam Tantangan Global*, disajikan dalam seminar "Profil Birokrasi yang Demokratis Menghadapi Era Pasar Bebas Menuju Kualitas Pelayanan yang Efektif dan Efisien", Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang.

Pratikno, 23 November 2000, *Menyongsong Otonomi Daerah*, disampaikan dalam Semiloka Bidang Politik Dan Pemerintahan Daerah Legislatif dan Eksekutif Propinsi Jawa Tengah, Center for Indonesian Bureaucracy Studies.

Rahardjo, Satjipto, 15-16 april 1998, *Penyusunan Undang-undang Yang Demokratis suatu Kajian Sosiologis*, disampaikan dalam seminar Nasional Mencari Ideal Penyusunan Undang-undang yang Demokratis dan Kongres Asosiasi Sosiologi Hukum Indonesia, Universitas Diponegoro semarang.



- , 10 Februari 1998, *Paradigma Ilmu Hukum Indonesia Dalam Perspektif Sejarah*, disampaikan dalam Simposium Nasional Ilmu Hukum Indonesia, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
- , 12-13 Nvember 1996, *Pendayagunaan Sosiologi Hukum Untuk Memahami Proses Hukum di Indonesia Dalam konteks Pembangunan dan Globalisasi*, disampaikan dalam Seminar Nasional Pendayagunaan sosiologi Hukum Dalam Masa Pembangunan Dan Restrukturisasi Global, Pusat Study Hukum Dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
- Rais, Amin M, 13 Oktober 1997, *Profil Birokrasi Dalam Era Globalisasi*, disajikan dalam Seminar Nasional “ Profil Birokrasi Yang Birokratis Menghadapi Era Pasar Bebas Menuju Kualitas Pelayanan yang Efektif dan Efesien, Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang.
- Rasyid, Ryaas, 23 November 2000, *Aparatur Yang Profesional Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, disampaikan dalam Semiloka Bidang Politik Dan Pemerintahan Daerah Legislatif dan Eksekutif Propinsi Jawa Tengah, Center for Indonesian Bureaucracy Studies.
- Sacroni, Oman, 18 Oktober 1997, *Masalh-masalah Pemerintah Daerah Dalam Upaya Peningkatan Daerah sebagai Dampak Dari Penerpan Paket Perpajakan Tahun 1997*, disampaikan dalam seminar Perpajakan Universitas Diponegoro Semarang.
- Sidik, Machfud, 18 Oktober 1997, *Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Desentralisasi di Bidang Keuangan Daerah*, disampaikan dalam Diskusi panel Undip, Semarang.
- Sri Widyoko,Bambang, 1-10 Februari 2000, *Perencanaan, Pengendalian, dan Penilaian Pembangunan Daerah*, disampaikan dalam Studi Interaktif Legislatif dan Eeksekutif Propinsi Jawa Tengah, Semarang.
- Sudarmadji, Agus, 18 Oktober 1997, *Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Desentralisasi di Bidang Keuangan Daerah*, disampaikan dalam Diskusi panel Undip, Semarang.
- Sudarso, 1-10 Februari 2000, *Implementasi Tugas Dalam Pembangunan Bidang Ekonomi*, disampaikan dalam Studi Interaktif Legislatif dan Eeksekutif Propinsi Jawa Tengah, Semarang.
- Suwandi, Made, 23 November 2000, *Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah di Indonesia*, disampaikan dalam Semiloka Bidang Politik Dan Pemerintahan Daerah Legislatif dan Eksekutif Propinsi Jawa Tengah, Center for Indonesian Bureaucracy Studies.
- Warasih, Esmi, 15-16 April 1998, *Cita Hukum dan Proses Penyusunan Peraturan Perundang-undang Yang demokratis*, disampaikan dalam Seminar Nasinal Mencari Ideal Penyusunan Undang-undang Yang Demokratis dan Kongres Asosiasi Sosiologi Hukum Indonesia, Universitas Diponegoro Semarang.

Wignyosoebroto, Soetandyo, 15-16 April 1998, *Pokok-pokok Pikiran Tentang Model Penyusunan Peraturan Perundang-undang Yang demokratis*, disampaikan dalam Seminar Nasional Mencari Ideal Penyusunan Undang-undang Yang Demokratis dan Kongres Asosiasi Sosiologi Hukum Indonesia, Universitas Diponegoro Semarang.

-----, 10 Februari 1998, *Permasalahan Paradigma Dalam Ilmu Hukum*, disampaikan dalam Simposium Nasional Ilmu Hukum Indonesia, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

-----, 12-13 Nvember 1996, *Sosiologi Hukum : Perannya Dalam Pengembangan Ilmu Hukum dan Studi Tentang Hukum*, disampaikan dalam Seminar Nasional Pendayagunaan sosiologi Hukum Dalam Masa Pembangunan Dan Restrukturisasi Global, Pusat Study Hukum Dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

-----, 1994, *Konsep Hukum, Tipe Kajian dan Metode Penelitiannya*, Program Pascasarjana Universitas Erlangga, Surabaya.

Widarta, I, 2001, *Cara Mudah Memahami Otonomi Daerah*, Laper Pustaka Utama, Yogyakarta.

Yatman, Darmanto, 1-10 Februari 2000, *Pengembangan Visi Kebangsaan dan Kedaerahan Serta Citra Diri*, disampaikan dalam Studi Interaktif Legislatif dan Eeksekutif Propinsi Jawa Tengah, Semarang.

Yustika, Erani Ahmad, 2000, *Industrialisasi Pinggiran*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

## MAJALAH

Boediono B, 1986, *Uraian Dasar Pajak Negara (Umum) Dan Administrasinya*, Jakarta.

DEWAN , 1999, *Antara Federasi dan Otonomi Daerah*, Yayasan Suluh Praja, Jakarta.

DIPENDA Propinsi Jawa Tengah, 1999, *Peran Serta Dipenda Dalam Menyongsong Otonomi Daerah*, Semarang.

Hasil Lokakarya Penyusunan Produk-produk Hukum Dalam Rangka Pelaksanaan Reformasi Hukum Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Tengah, 1999, Biro Hukum Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Tengah, Semarang.

## **PERUNDANG-UNDANGAN / PERATURAN-PERATURAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004

Ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Retribusi Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Retribusi Daerah.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 Tentang Pedoman Tata cara Pemungutan Pajak Daerah .

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 Tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 Tentang Kreteria Wajib Pajak Yang Wajib Menyelenggarakan Pembukuaan dan Tata Cara Pembukuan .

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 Tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah .

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 Tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah .

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 Tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah .

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 Tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I Dan Retribusi Daerah Tingkat II.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1998, Tentang Pencabutan Daerah Tingkat I dan Tingkat II Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 50 Tahun 1981 Tentang Pemakaian Lapanga Olah Raga Yos Sudarso.

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 11 Tahun 1993 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 33 Tahun 1978 Tentang Retribusi Atas Pemakaian Mesin Gilas.

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 10 Tahun 1987 Tentang Pemakaian Tanah.

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Retribusi Terminal.

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Pajak Penerangan Jalan.

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Pajak Hotel Dan Restoran.

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pajak Hiburan.Pajak

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Pajak Reklame.

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 7 Tahun 1998 Tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah Dan Air Permukaan.

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum.

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Retribusi Izin Gangguan.

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 2000 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Tempat Olah Raga.

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Retribusi Pasar.

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi Daerah Dan Sekretariat Dewan.

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Dinas-Dinas Kota.

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Kota.

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan Dan Kelurahan Kota Tegal.

Penjelasan Atas Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Penjelasan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.